

**KAJIAN PENENTUAN LOKASI
GEDUNG SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Kota

Oleh :

MIARSIH

L4D 006 086



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**KAJIAN PENENTUAN LOKASI
GEDUNG SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN DEMAK**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Oleh :
MIARSIH
L4D 006 086**

Diajukan pada sidang ujian tesis
Tanggal2009

Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang,2009

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Sunarti, . MT

Ir. Nany Yuliasuti, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc
NIP 131 413 206

PERNYATAAN

Apabila dalam tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari tesis orang lain/ instansi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan lulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab..

Semarang,.....2009

MIARSIH
L4D 006 086

*Dengan menyebut nama Allah
Yang Maha Pengasih
Maha Penyayang*

Kupersembahkan untuk

SUAMI DAN ANAK-ANAKKU TERCINTA.....

ABSTRAK

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menetapkan bahwa penuntasan wajib belajar 9 tahun harus tercapai selambat-lambatnya tahun 2008/2009. Tolok ukur untuk ketuntasan tersebut ditetapkan bahwa pada tahun 2008/2009 minimal 95% (Angka Partisipasi Kasar) secara nasional (Pedoman Pelaksanaan SD-SMP Satu Atap 2006). Kendala yang dihadapi sehubungan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah masalah pendanaan pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk gedung SMP. Untuk mengatasi masalah pendanaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan SD-SMP Satu Atap dimana lokasi gedung SMP menjadi satu dengan SD yang memenuhi kriteria.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak. Kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan SD-SMP Satu Atap Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional.

Metode pendekatan yang digunakan adalah ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, pengaruh karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan dan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Desa Terpencil, Kepala SD Desa Terpencil dan Kepala rumah tangga di daerah terpencil (390 responden). Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket.

Analisis yang digunakan meliputi analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, analisis sebaran penduduk terhadap lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Demak, analisis karakteristik penduduk dan analisis kesesuaian lokasi SD-SMP Satu Atap pada tiap kecamatan di Kabupaten Demak. Teknik analisis yang digunakan adalah alat analisis perbandingan dan analisis statistik deskriptif.

Hasil dari studi ini adalah menentukan Desa Wedung Kecamatan Wedung sebagai lokasi yang Memiliki ketersediaan sarana dan prasana yang cukup sesuai dengan standar minimal sarana prasarana untuk dijadikan lokasi SD-SMP Satu Atap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan program Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak. Suksesnya pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap berarti juga membantu pencapaian target pada 2008/2009 minimal APK 95% di Kabupaten Demak.

Rekomendasi dari peneliti yaitu ada kesanggupan pemerintah Daerah untuk menetapkan kelayakan calon SD-SMP Satu Atap menjadi SD-SMP Satu Atap. a dalam penentuan, Perlu penelitian lebih lanjut tentang keterpaduan pengelolaan manajerial, referensi penentu kebijakan berkaitan dengan perencanaan Tata Ruang di daerah terpencil dan terutama dalam verifikasi kelayakan lokasi SD di Daerah Terpencil sehingg lokasi tepat pada sasaran

Kata kunci : Satu Atap, Penentuan Lokasi

ABSTRACT

Policy obliged to learn education of base 9 year contend that complete obliged to learn 9 year have to reach at the latest year 2008 / 2009. Measuring rod to the complete contended that in the year 2008 / 2009 minimizing 95% (Harsh Number Participation) nationally (Guidance Of Execution Of SD-SMP One Roof 2006). Constraint faced referring to economic crisis which knock over Indonesia the problem of financing of development of new school unit for the building of SLTP. To overcome the problem of financing, governmental release policy of SD-SMP One Roof where building location of SLTP become one with SD fulfilling criterion.

This study aim to to study determination of Building location of SD-SMP One Roof in Sub-Province of Demak. Criterion which used in determination of location as according to guidance of execution of SD-SMP One Roof Year 2006 specified by On duty Education of National

Approach method the used availability and requirement of education medium, influence of resident characteristic to education participation storey;level and disseminating consumer of education medium and of aksesibilitas resident to service of education medium. Responder in this research consist of Head On Duty Education, Cloistered Head Countryside, Head of SD Cloistered Countryside and Head household in area of tepencil (390 responder). Method intake of data which used in this research is enquette method

used analysis cover availability analysis and requirement of education medium, resident swampy forest analysis to education medium location in Sub-Province of Demak, resident characteristic analysis and analysis according to location of SD-SMP One Roof every district in Sub-Province of Demak. Technique Analysis the used is comparison analyzer and descriptive statistical analysis.

Result of from this study to determine Countryside of Wedung District of Wedung as location fulfilling criterion to be made by location of SD-SMP One Roof. Result of this research is expected can assist execution of Building program's of SD-SMP One Roof in Sub-Province of Demak. its Successful of execution of program's of SD-SMP One Roof connote to assist attainment of goals at 2008/2009 minimizing APK 95% in Sub-Province of Demak

Recommend from researcher that is government shall earn to prepare transportation go to location go to school to purilieus mayarakat to support fluency access student go to school, besides government also provide education medium in purilieuss to support process fluency learn to teach. Other alternative able to be conducted by government student in purilieus get is same opportunity in the field of education is to strive school urban recruited student have achievement of purilieuss. Student's provided hostel as residence so that they do not have to release the expense of transportasi to come to school

Keyword : Determination of Location Building

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**Kajian penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap Di Kabupaten Demak**”. Penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc Ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dan selaku penguji II tesis ini.
2. Ibu Hj. Ir. Nanny Yuliasuti, MSP selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Sunarti, SE, MT selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, nasehat dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Mukti Ali, ST, MT, M.Si selaku pembahas yang telah banyak memberikan arahan, nasehat dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Tesis ini.

Akhir kata penuh mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan semoga tesis ini bermanfaat.

Semarang, 18 Maret 2009

Penulis

MIARSIH
NIM. L4D006086

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan dan sasaran studi	5
1.3.1 Tujuan studi	5
1.3.2 Sasaran studi	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup	6
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial	6
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Metode Penelitian	11
1.7.1 Pendekatan Penelitian	11
1.7.2 Teknik Sampling	13
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.4 Variabel Penelitian.....	18
1.7.5 Teknik Analisis	21
1.7.6 Data dan Sumber Data	24
1.8 Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN LITERATUR PENENTUAN LOKASI GEDUNG SD-SMP	
SATU ATAP.....	30
2.1. Sarana Umum Dan Sarana Pendidikan	30
2.1.1 Pengertian Sarana Umum.....	30
2.1.2 Konsep dan Ruang Lingkup Pendidikan.....	33
2.1.3 Peran Pendidikan dalam Pembangunan	34
2.1.4 Jenis Sarana Pendidikan.....	37
2.1.5 Kategori Fisik Sarana Pendidikan.....	40
2.2.SD-SMP Satu Atap	41
2.1.1 Pengertian SD-SMP Satu Atap	41
2.1.2 Mekanisme Penetapan SD-SMP Satu Atap	42
2.3.Konsep Lokasi	44

2.3.1 Penentuan Lokasi Gedung SMP.....	44
2.3.2 Arti Penting Lokasi	46
2.3.3 Teori Lokasi	46
2.3.4 Aksesibilitas Pendidikan	48
2.4. Kependudukan	49
2.5. Kerangka Teoritis Penelitian	52
BAB III TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK	57
3.1. Kendala Umum Kabupaten Demak	57
3.1.1 Kondisi Geografis	57
3.1.2 Kependudukan	58
3.1.2.1 Kependudukan	58
3.1.2.2 Kependudukan Yang Berkaitan dengan Pendidikan....	60
3.1.3 Fasilitas Sosial Ekonomi	60
3.1.3.1 Fasilitas Pendidikan	60
3.1.3.2 Fasilitas Transportasi	63
3.2. Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah	64
3.2.1 Pemerataan Pendidikan	64
3.2.2 Mutu dan Relevansi Pendidikan	67
3.2.3 Efisiensi Internal Pendidikan	68
BAB IV ANALISIS PENENTUAN LOKASI GEDUNG SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN DEMAK.....	70
4.1 Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak	71
4.2 Analisis Pengaruh Karakteristik Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Demak	84
4.3 Analisis Aksesibilitas Penduduk terhadap Pelayanan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak	96
4.4 Analisis Penentuan Lokasi SD-SMP Satu Atap	118
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Rekomendasi	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Peta Hasil Analisa Penelitian

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana pendidikan merupakan sarana terpenting dan mendasar bagi manusia untuk belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan juga mempunyai arti penting bagi manusia, karena dengan pendidikan dapat memberikan keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai pada masyarakat. Peran pendidikan juga menstimulir dan menyertai perubahan-perubahan serta perkembangan yang ada di masyarakat (Tim IKIP, 1980:215).

Tercapainya tujuan pembangunan dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan Gooding bahwa mengikutsertakan pendidikan dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan (Tim IKIP,1980: 219).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menetapkan bahwa penuntasan wajib belajar 9 tahun harus tercapai selambat-lambatnya tahun 2008/2009. Tolok ukur untuk ketuntasan tersebut ditetapkan bahwa pada tahun 2008/2009 minimal Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 95% secara nasional.

Usaha peningkatan wajib belajar 9 tahun tersebut, berbagai usaha telah dilakukan antara lain dengan mengembangkan pendidikan alternatif. Pola wajib belajar yang ada saat ini ternyata masih ada tamatan SD/MI yang tidak

tertampung karena mereka berada di daerah-daerah yang terisolir, terpencil dan terpencar (Pedoman Pelaksanaan SD-SMP Satap 2006).

Permasalahan pendidikan di Demak berdasarkan profil pendidikan Tahun 2005 dapat dilihat dari tiga hal yaitu pemerataan, peningkatan mutu, dan efisiensi internal. Nilai APK di Kabupaten Demak dilihat dari segi efisiensi pada jenjang SMP dan SMA tergolong rendah. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 5,05, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMP dan MTs yaitu 0,97 dan angka lulusan yang terendah terdapat pada tingkat SM + MA yaitu 0,86 (Profil Pendidikan Kabupaten Demak, 2005)

Indikator kelayakan mengajar guru, yang paling rendah pada tingkat SM + MA. Kondisi ruang kelas rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD + MI. Fasilitas sekolah seperti perpustakaan di tingkat SD, di tingkat SLTP dan di tingkat SM masih banyak yang belum memiliki.

Efisiensi internal berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi pada tingkat SD yaitu 985 dan paling rendah pada tingkat SMP + MTs, SM + MA adalah 971. Jumlah siswa yang paling tinggi berada pada tingkat SD. Jumlah putus sekolah paling tinggi pada tingkat SMP+MTs, SMA+MA dan jumlah mengulang yang paling tinggi SD+MI. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SD+MI memiliki lama belajar yang paling tidak efisien

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut maka muncul pemikiran perlunya dikembangkan SD-SMP Satu Atap yaitu SMP dibuka di SD yang memiliki lulusan dan belum tertampung dengan memanfaatkan sarana yang telah ada atau dengan melengkapi yang belum ada agar SMP tersebut dapat operasional.

Sasaran program SD-SMP Satu Atap adalah daerah terpencil, terisolir, dan terpencar, SMP belum didirikan atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Jumlah lulusan SD di daerah tersebut pada umumnya relatif sedikit sehingga pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dipandang tidak efisien. Dilain pihak daerah tersebut merupakan kantong-kantong terkonsentrasi dimana APK SMP masih rendah dan merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat (*Panduan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap, 2006*)

Tahun 2004 telah dilakukan verifikasi kelayakan ke sejumlah provinsi dan Kabupaten yang mengusulkan pengembangan SD-SMP Satu Atap. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut telah ditetapkan sekitar 360 lokasi, dan mulai operasional tahun pelajaran 2005/2006.

Salah satu dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak adalah kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tepatnya di SD Tugu 2 Kecamatan Sayung. Program SD-SMP Satu Atap yang mulai digulirkan pada awal tahun 2007 khususnya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak masih membutuhkan banyak perhatian dan kajian yang mendalam.

Kegiatan studi ini secara umum adalah untuk mengkaji pengembangan program SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak secara menyeluruh, sedangkan secara khusus adalah untuk mengkaji penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksudkan untuk menjangkau agar anak usia 13-15 tahun yang bertempat tinggal di daerah yang terpencil, terisolir dan terpencar dapat dilayani oleh kehadiran SD-SMP Satu Atap yang didasarkan atas kebutuhan masing-masing kabupaten. Saat ini program SD-SMP Satu Atap sudah dilaksanakan di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang dimulai pada awal tahun 2007 ini, dari hasil verifikasi Dinas Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak SD Tugu 2 Kecamatan Sayung layak untuk dilaksanakan pengembangan SD-SMP satu atap, dengan 1 rombongan belajar sejumlah

43 siswa, namun tengah perjalanan ada 5 siswa yang keluar karena alasan ekonomi dan karena kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Namun pada kenyataannya di nilai kurang layak karena kondisi lokasi sekolah tersebut terkena banjir pada saat musim penghujan, sehingga hal ini mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tidak tepat dalam melakukan analisa penentuan lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap. Secara kusus masalah yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak anak usia 13-15 tahun dengan kondisi sosial ekonomi orang tuanya kurang.
2. Jangkauan geografi sulit, tempat tinggal penduduk (terpencil, terisolir dan terpencar
3. Belum terjangkaunya pelayanan pendidikan Dasar (SMP)

Bertitik tolak pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak?*.

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk *mengkaji penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak*.

1.3.2 Sasaran Studi

Sasaran studi dalam kajian penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.
2. Mengidentifikasi karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Demak.
3. Mengidentifikasi sebaran penduduk pengguna sarana pendidikan SMP dan sebaran lokasi sarana pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Demak.
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.
5. Analisis karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan SMP di Kabupaten Demak.

6. Analisis aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.
7. Analisis penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.
8. Merumuskan rekomendasi lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Penyelesaian masalah pendidikan untuk peningkatan pelayanan sarana umum, khususnya sarana pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya perencanaan kota yang seharusnya dipertimbangkan oleh perencana di masa mendatang.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan praktek perencanaan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan terkait penyediaan sarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan pemerataan pelayanannya. Manfaat khusus adalah mengkaji penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Substansi yang akan dikaji dari penelitian ini adalah materi kajian penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sarana pendidikan di wilayah studi, dengan tujuan untuk mengetahui jumlah dan ketersediaan sarana pendidikan menengah di wilayah

studi. Meliputi persebaran dan daya tampung, dengan melihat data sekunder yang diperoleh, untuk kemudian disesuaikan dengan standar yang ada. Batasan substansi ialah dalam identifikasi, menggunakan Kep Men PU No.13/KPTS/1987 sebagai perhitungan standar kesesuaian. Batasan materi penelitian ini ialah hanya pada kesediaan daya tampung, luasan bangunan dan luas areal, besar kelompok penduduk pendukung, dan radius pelayanan. Pembatasan ini juga dimaksudkan agar materi analisis lebih terfokus pada kesediaan sarana pendidikan, dengan wilayah sekitarnya.

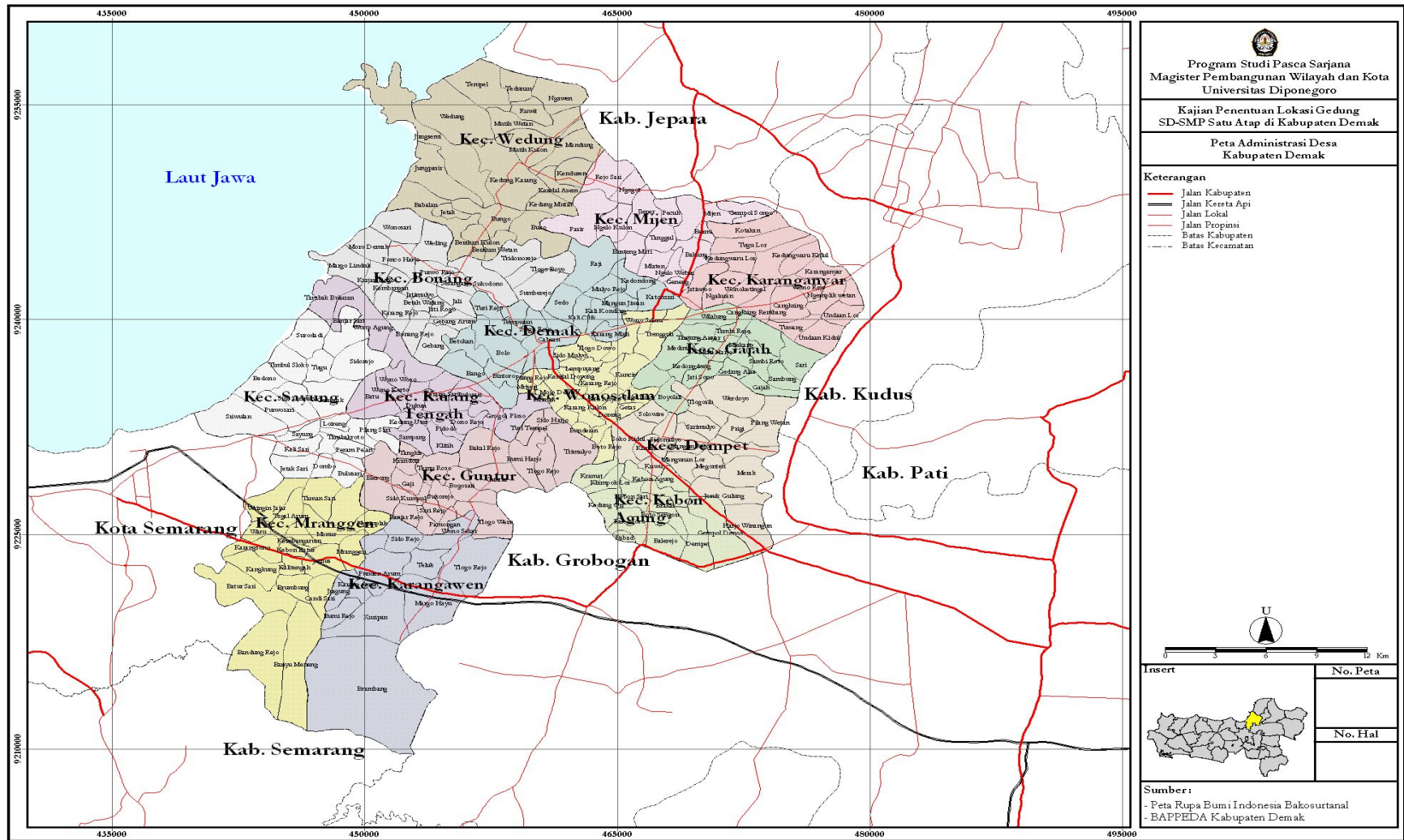
- b. Karakteristik pengguna pelayanan pendidikan di Kabupaten Demak. Karakteristik meliputi sebaran penduduk dan kondisi sosial ekonomi seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian terhadap tingkat angka partisipasi pendidikan.
- c. Sebaran penduduk dan sebaran sarana pendidikan, meliputi aksesibilitas penduduk di Kabupaten Demak, untuk melihat jangkauan, sarana jalan, moda yang digunakan dan biaya yang dikeluarkan penduduk usia (13–15 tahun) untuk menuju ke pelayanan pendidikan.

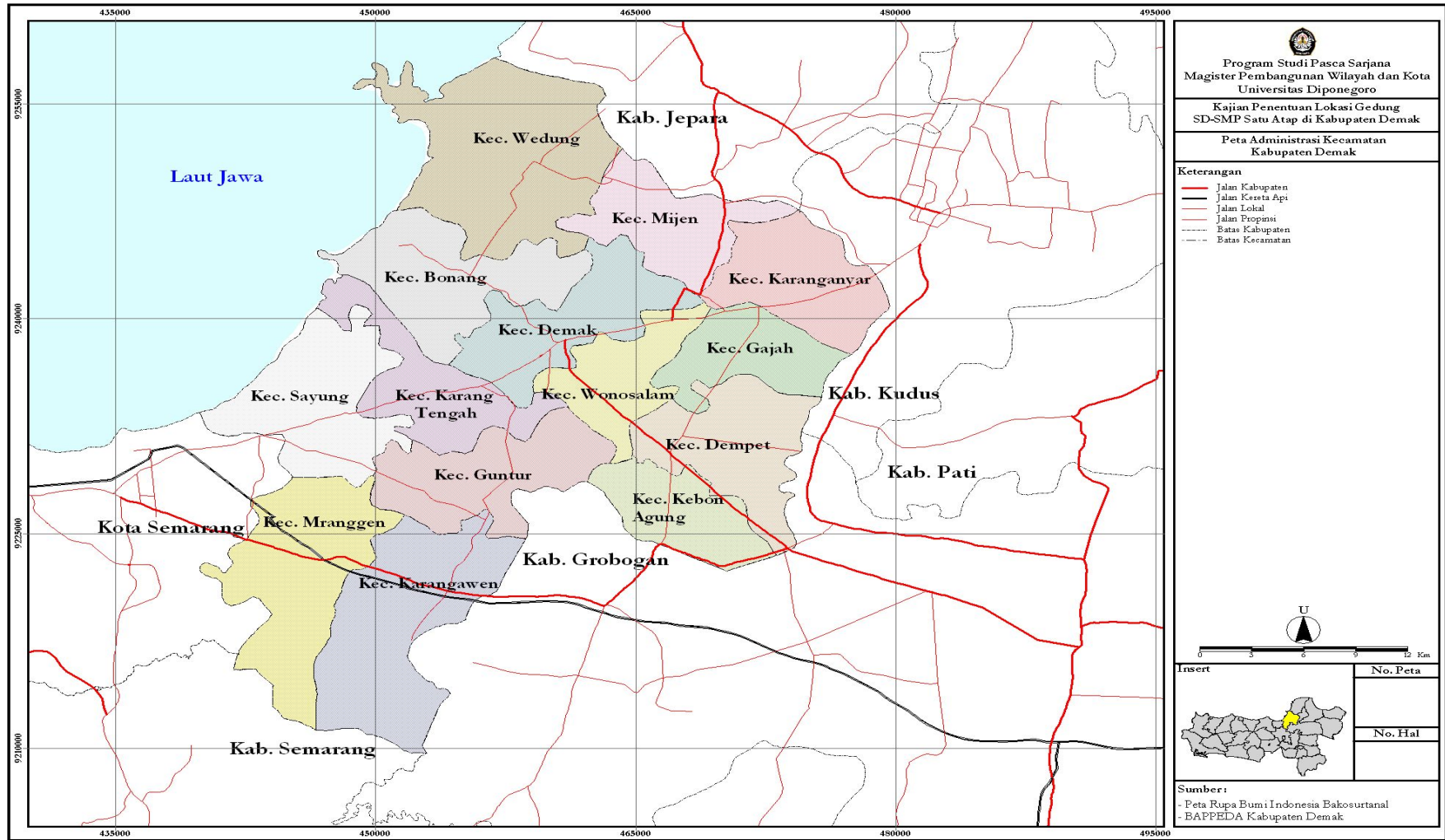
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Demak yang terdiri dari 14 Kecamatan yang masing-masing kecamatan masih terdapat kantong-kantong penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum memperoleh pelayanan pendidikan dan jangkauan untuk menuju ke sekolah SMP/MTs membutuhkan waktu yang panjang sehingga diperlukan kajian penentuan lokasi untuk SD-SMP satu atap. Agar hal tersebut segera terwujud ruang lingkup spasial dan obyek penelitian yang diambil dalam studi ini yaitu wilayah studi yang meliputi 11

Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu Sayung, Karangtengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wedung dan Kebonagung. Pengambilan 11 kecamatan didasarkan pada kenyataan bahwa di 3 kecamatan lain (Guntur, Mranggen dan Karangawen) tidak terdapat desa terpencil yang memerlukan SD-SMP Satu Atap.

Adapun peta Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



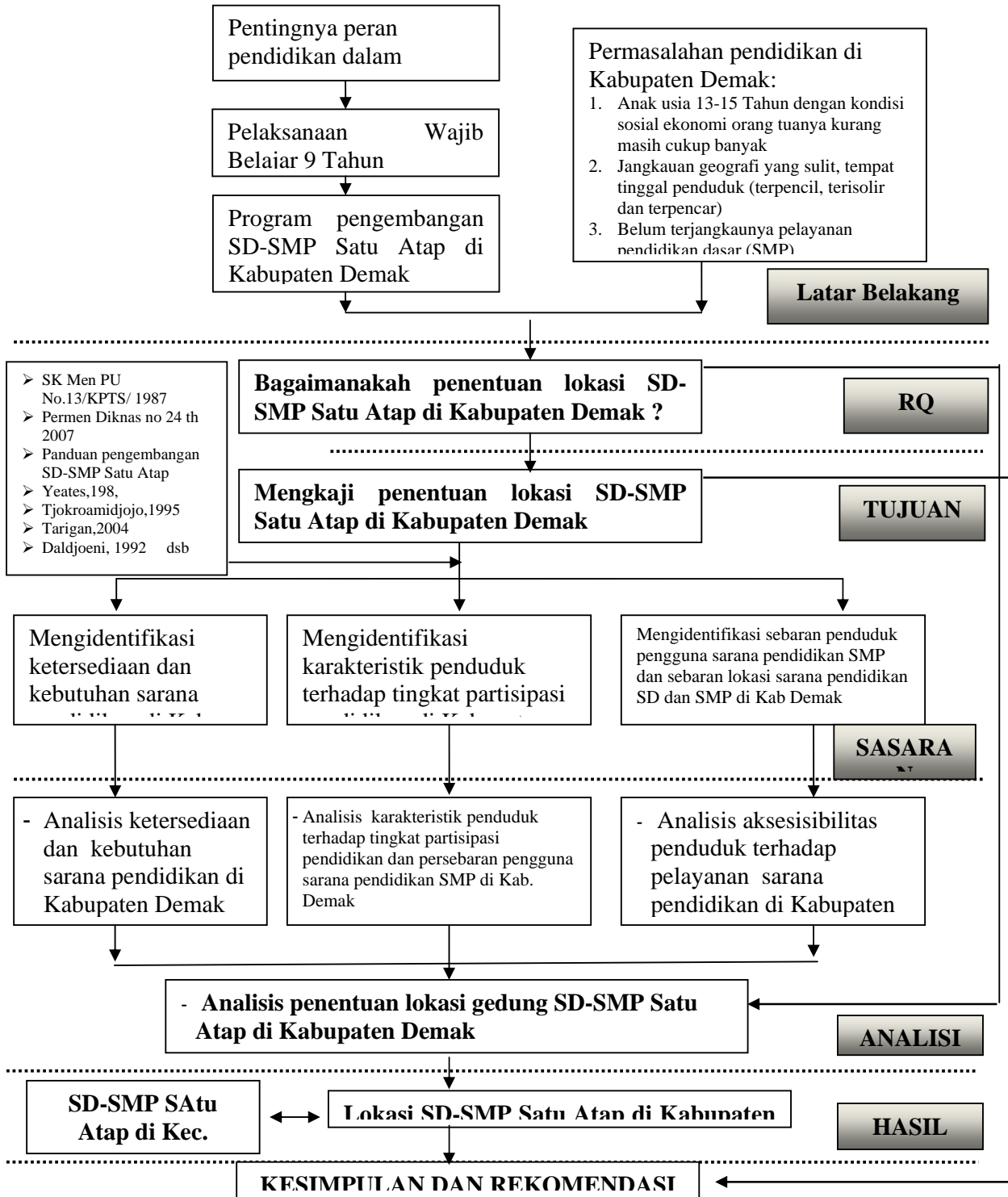


1.6 Kerangka Pemikiran

Pengembangan SD SMP Satu Atap merupakan salah satu program yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten demak dalam rangka mempercepat pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan mendirikan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung pada tahun 2007.

Tujuan kebijakan pemerintah Kabupaten Demak dari program SD - SMP Satu Atap ini sendiri untuk mengatasi kendala yang dihadapi anak - anak lulusan Sekolah Dasar di daerah - daerah terpencil yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMP. Konsep pembangunannya dengan mendekatkan SMP ke SD di daerah dengan kondisi georafis yang sulit atau terpencil, agar tamatan SD dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP.

Namun demikian, tujuan pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut tidak sepenuhnya dapat dicapai. Meskipun anak-anak di sekitar SD Tugu 2 Desa Tugu Kecamatan Sayung dapat melanjutkan ke SMP tetapi proses belajar mengajar di sekolah tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan pemerintah tidak melakukan analisa penentuan lokasi pengembangan di SD-SMP Satu Atap dengan baik. SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung sering tidak dapat digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran karena banjir pada saat musim penghujan. Selain itu beberapa siswa akhirnya harus keluar karena tidak mendapat dukungan dari orangtua untuk melanjutkan sekolah. Melihat fenomena tersebut maka diperlukan sebuah kajian secara komprehensif dalam menentukan lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap. Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Studi

Sumber : Analisis 2008

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Studi mengenai Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP satu atap termasuk penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif dengan menjadikan Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap dan Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai dasar perumusan variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian lapangan (survai).

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:245) pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status denomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Apabila data telah terkumpul maka lalu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Terhadap data yang bersifat kualitatif menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman (2000:18) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara antara lain :

- a. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase.
- b. Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga sesuatu susunanurut data (*array*), untuk selanjutnya dibuat tabel baik yang hanya berhenti sampai tabel saja, maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi data (Suharsimi Arikunto, 1998 : 246).

Metode penyekoran data dari angket yang didapat berupa data kualitatif dilakukan agar data tersebut dapat dianalisis. Menguantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut:

- skor 3 Jawaban = (Baik)
- skor 2 Jawaban = (Kurang baik)
- skor 1 Jawaban - (Tidak baik)

1.6.2 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik atau cara untuk menentukan atau mengumpulkan sampel. Menurut Kartono (1996:129) sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang digunakan sebagai wakil untuk mengetahui karakteristik objek penelitian. Sampel harus bersifat representatif, sehingga mampu mewakili sifat populasinya. Kriteria mengenai jenis sampel dan penarikan sampel dipengaruhi oleh sifat populasi dan kebutuhan data serta masalah yang ingin dipelajari. Penelitian ini memerlukan penentuan sampel terhadap objek penelitian, karena tidak mungkin meneliti keseluruhan masyarakat sejumlah

populasi di Kabupaten Demak. Hal ini ditujukan agar tetap didapatkan hasil penelitian yang baik, maka pemilihan sampel pun harus representatif.

a. Teknik sampling terpilih

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling*. Metode pengambilan sampel yang dipilih adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak atau dikenal dengan *non random sampling*, dimana sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Purposive Sampling* dinamakan juga *Quota Sampling*, keterwakilan (*representativeness*) sampel ditentukan sendiri oleh keputusan peneliti, hal ini disebabkan sampel tidak memenuhi *randomness* atau acak dan secara statistik kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik sampel dengan menggunakan teknik *purposive Sampling* ini ditentukan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan populasi (Wasito, 1995:55). Ciri tersebut misalnya berhubungan dengan kebijakan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Responden yang akan diambil adalah Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Desa, dan Kepala Sekolah Dasar.

Pemilihan masyarakat setempat sebagai sampel berkaitan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui pelayanan sarana pendidikan menengah di Kabupaten Demak. Sedangkan penentuan sampel dalam studi ini adalah dengan memilih responden berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, dan sekolah baik SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Demak.

b. Jumlah Sampel

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi. Tujuan dari penggunaan sampel ini diharapkan akan memberikan keyakinan tinggi pada populasi sampel yang sifatnya relatif sangat heterogen. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Nasution, bahwa tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia serta tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan sampel yang besar dan yang kecil (Nasution, 2001:71).

Penentuan jumlah sampel yang akan diambil adalah seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Demak, Kepala Desa di desa yang termasuk terpencil, Kepala Sekolah Dasar di daerah terpencil dan kepala keluarga sebagai wakil wali murid di SD terpencil. Pengambilan sampel kepala keluarga diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik. Salah satu formula statistik yang sering digunakan untuk menggunakan ukuran sampel adalah mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Yamane (1973) dalam Supramono (2005 : 61) berikut ini :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi (per kecamatan)

e = presisi yang ditetapkan atau persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel yang masih ditolelir atau diinginkan.

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan karena populasi terdiri dari berbagai wilayah yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga kondisi pada satu wilayah tidak akan dijadikan generalisasi pada semua populasi yang ada melainkan hanya mencerminkan kondisi pada wilayah tersebut.

Contoh perhitungan sampel untuk SD Negeri Bedono Kecamatan Sayung dengan populasi sebesar 39 diperoleh :

$$n = \frac{39}{1 + (39 \times 0.05^2)}$$

$$n = \frac{39}{1 + 0.0975}$$

$$n = \frac{39}{1,0975}$$

n = 35,5353 dibulatkan menjadi 36 responden

Berdasarkan formula diatas maka besarnya sampel kepala keluarga yang diambil pada tiap kecamatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sampel Penelitian Untuk Kepala Keluarga
(dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 5%)

Nama SD	Jumlah Siswa Kelas VI	Jumlah sampel
SD Negeri Bedono	39	36
SD Negeri Rejosari 01	33	30
SD Negeri Krajanbogo	45	40
SD Negeri Bango 02	68	58
SD Negeri Doreng	42	38
SD Negeri 01	33	30
SD Negeri Sambung 01	53	47
SD Negeri Jatirejo	21	20

Nama SD	Jumlah Siswa Kelas VI	Jumlah sampel
SD Negeri Ngegot	45	40
SD Negeri Wedung	40	36
SD Negeri Babat	16	15
Jumlah	435	390

Sumber : Data Penelitian, 2008

Berdasarkan tabel 1.3 maka jumlah sampel kepala keluarga dalam penelitian ini sebanyak 390 kepala keluarga yang tersebar di 11 Sekolah Dasar di Desa terpencil.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian yaitu :

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer bertujuan untuk mencari data yang sifatnya tidak tertulis sekaligus data yang memiliki tingkat aktualitas tinggi.

Pengumpulan data yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Observasi lapangan (*Direct Observation*), yaitu berupa kegiatan pengamatan langsung terhadap pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak yang meliputi ketersediaannya. Termasuk pula mengamati langsung persebaran sarana pendidikan di Kabupaten Demak.
- b. Kuesioner, yaitu melakukan wawancara secara tertulis yang ditujukan bagi masyarakat pengguna sarana pendidikan menengah, pihak sekolah dan pengelola sarana pendidikan dan masyarakat yang sesuai kriteria sampel. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penilaian mengenai kondisi pelayanan sarana pendidikan, jangkauan wilayah pelayanan dan

alasan menggunakan sarana pendidikan di Kabupaten Demak. Penilaian yang dilakukan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan sesuai dengan literatur yang telah dikaji. Kuesioner dalam penelitian ini terbagi dalam dua model pertanyaan, tertutup dan terbuka.

- c. Wawancara, dilakukan terhadap narasumber yang ditentukan secara purposive sampling yang dianggap sebagai narasumber yang kompeten dan mengetahui tentang perkembangan dan pelayanan sarana pendidikan menengah di Kabupaten Demak. *Purposive sampling* penentuan narasumber berdasarkan pengetahuan dan pendapat peneliti tentang siapa yang pantas untuk dijadikan narasumber (David & Sutton, 2004:152). Teknik wawancara yang digunakan adalah *snowballing* dimana narasumber pertama memberikan rekomendasi siapa saja yang dapat dijadikan sebagai narasumber berikutnya dan hal ini berlaku juga pada narasumber kedua dan seterusnya sampai dirasa tidak ada pengulangan dan kekurangan informasi yang didapat (Fink, 1995:19). Narasumber dalam penelitian adalah pihak pengelola sarana pendidikan sekolah menengah dan pejabat Dinas Pendidikan sebagai penyedia pelayanan sarana pendidikan menengah.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang melandasi dan mendukung studi. Biasanya dilakukan dalam bentuk telaah dokumentasi seperti data penduduk dari Kecamatan dalam Angka, RDTRK Kabupaten Demak data jumlah pengguna sarana pendidikan menengah, data-data dari penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Data sekunder ini didapatkan dari perpustakaan serta instansi-instansi terkait seperti Bappeda,

Kantor Desa/Kelurahan, BPS, Dinas Pendidikan dan lain-lain, lebih lengkap dapat dilihat di tabel Matriks Kebutuhan Data.

1.6.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan analisis variabel – variabel terpilih, untuk memperjelas variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan indikator variabel yang dipakai maka dalam sub bab ini akan dijelaskan definisi operasional dari variabel dan komponen indikator tersebut. Batasan lingkup penelitian dapat pula diperjelas dengan melihat variabel terpilih serta asumsi yang digunakan. Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.3.

**TABEL I.3
DEFINISI VARIABEL ANALISIS**

Sasaran	Variabel	Definisi	Asumsi
Analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak	Ketersediaan sarana pendidikan	Sarana pendidikan dapat diketahui dengan melihat jumlah sarana pendidikan di wilayah studi. Jumlah tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku sesuai kaidah perencanaan, terkait pula dengan rasio jumlah penduduk	Jumlah dan ketersediaan sarana pendidikan dapat diketahui, dengan melihat standar dan rasio jumlah penduduk. Dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan akan dapat memberikan kondisi pelayanan pendidikan berdasarkan standar yang ada.
	Kebutuhan sarana pendidikan	Kebutuhan sarana pendidikan dapat dilihat dari jumlah usia sekolah dan jumlah lulusan sekolah dasar.	
Analisis pengaruh karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan SMP di Kabupaten Demak.	Karakteristik penduduk	Karakteristik penduduk meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Jenis pekerjaan - Penghasilan - Pendidikan formal terakhir 	Dengan mengetahui hubungan karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi akan memberikan gambaran kondisi pendidikan di wilayah studi
	Tingkat partisipasi pendidikan	Tingkat partisipasi dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) dan Angka putus sekolah (APS)	

Sasaran	Variabel	Definisi	Asumsi
Analisis aksesibilitas penduduk terhadap lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Demak	Aksesibilitas penduduk terhadap lokasi pelayanan pendidikan	Sebaran penduduk pengguna pendidikan di wilayah studi. Sebaran penduduk akan dibandingkan dengan jangkauan sarana pendidikan yang ada.	Dengan mengetahui sebaran penduduk dan sebaran sarana pendidikan akan memberikan masukan untuk melihat jangkauan pelayanan pendidikan yang ada di wilayah studi.
	Sebaran sarana pendidikan	Melihat lokasi sebaran sarana pendidikan untuk melihat jangkauan pelayanan pendidikan	

Sumber : Analisis 2008

Pada variabel ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan dilakukan dengan memberikan penilaian atau pembobotan pada masing-masing indikator. Pemberian bobot dilakukan dengan dasar memisahkan kriteria pada indikator yang ada yaitu kriteria umum diberikan bobot 1 (satu) dan kriteria khusus diberikan bobot 2 (dua).

Indikator yang diberikan bobot 1 (satu) antara lain, Jumlah sarana pendidikan SD dan SMP, Daya Tampung Sarana, sebaran Layanan Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar dan Angkat Putus Sekolah sedangkan indikator dengan bobot 2 (dua) yaitu Luas Lahan.

Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing indikator maka langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi pendirian SD-SMP Satu Atap berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Wilayah yang memiliki nilai (skor) tertinggi merupakan wilayah yang diprioritaskan sebagai tempat lokasi pendirian SD-SMP Satu Atap. Adapun standar minimal yang digunakan dalam penilaian (pembobotan) sebagai berikut :

Tabel 1.1
Standar Lokasi SD-SMP Satu Atap

No	Variabel	Standart	Sumber	Nilai
1	Sarana Pendidikan SD/SMP	SD = 6 SMP = 3	Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap/permen 24 th 2007	1
2	Lahan SD	2500m ²	Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap	2
3	Angka Partisipasi Kasar	<90%	Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap	1
4	Angka Putus Sekolah	>60%	Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap	1
Jumlah				5

Sedangkan pada variabel aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan dilakukan persentase tingkat kelayakan aksesibilitas. Indikator yang akan diuji tingkat kelayakannya adalah Jarak Rumah dengan Sekolah, Waktu Tempuh ke Sekolah, Biaya Transportasi, Alat Transportasi, Kondisi Tanah, Keadaan Daerah Sekitar, Kondisi Jaringan Jalan, Kondisi Fisik Jalan.

Penilaian Deskripsi persentase di lakukan dengan rumus pokok sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- n : jumlah skor jawaban responden
 N : jumlah seluruh skor ideal
 % : tingkat keberhasilan yang dicapai

Adapun langkah-langkah menggunakan rumus deskriptif persentase adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung skor maksimum dengan cara mengalikan jumlah item pertanyaan dengan skor maksimum

- b. Menghitung skor minimum dengan cara mengalikan jumlah item pertanyaan dengan skor minimum
- c. Menghitung persentase maksimum dengan cara jumlah skor maksimum di bagi dengan jumlah skor maksimum di kalikan 100%
- d. Menghitung persentase minimum dengan cara Jumlah skor minimum di bagi dengan skor maksimum di kalikan 100%
- e. Rentang persentase
- f. Interval kelas persentase

Berdasarkan langkah – langkah tersebut diatas maka kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Skor maksimum :
 $= 8 \times 3 = 24$
- 2) Skor minimum :
 $= 8 \times 1 = 8$
- 3) Persentase maksimum
 $= 24 : 24 \times 100\% = 100\%$
- 4) Persentase minimum
 $= 8 : 24 \times 100\% = 33,33\%$
- 5) Rentang persentase
 $= 100\% - 33,33\% = 66,67\%$
- 6) Interval kelas
 $= 66,67\% : 3 = 22,22\%$

Tabel I.2
Kategori Deskriptif Persentase

Persentase	Kategori	Bobot
77.78% - 100.0%	Layak	1
55.55% - 77.78%	Kurang Layak	0
33.33% - 55.55%	Tidak Layak	0

1.6.5 Teknik Analisis

Metode analisis akan menjelaskan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian maka alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Perbandingan

Analisis komparatif atau perbandingan, merupakan alat analisis yang digunakan sesuai dengan standar ketersediaan sarana pendidikan. Analisis ini membandingkan pola pemanfaatan penduduk dengan ketersediaan sarana pendidikan di Kabupten Demak. Analisis komparatif yaitu membandingkan ketersediaan sarana pendidikan di wilayah studi dengan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan menurut Permen Diknas RI Nomor 24 tahun 2007 dan Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap. Hasil perbandingan ini nantinya dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Demak.

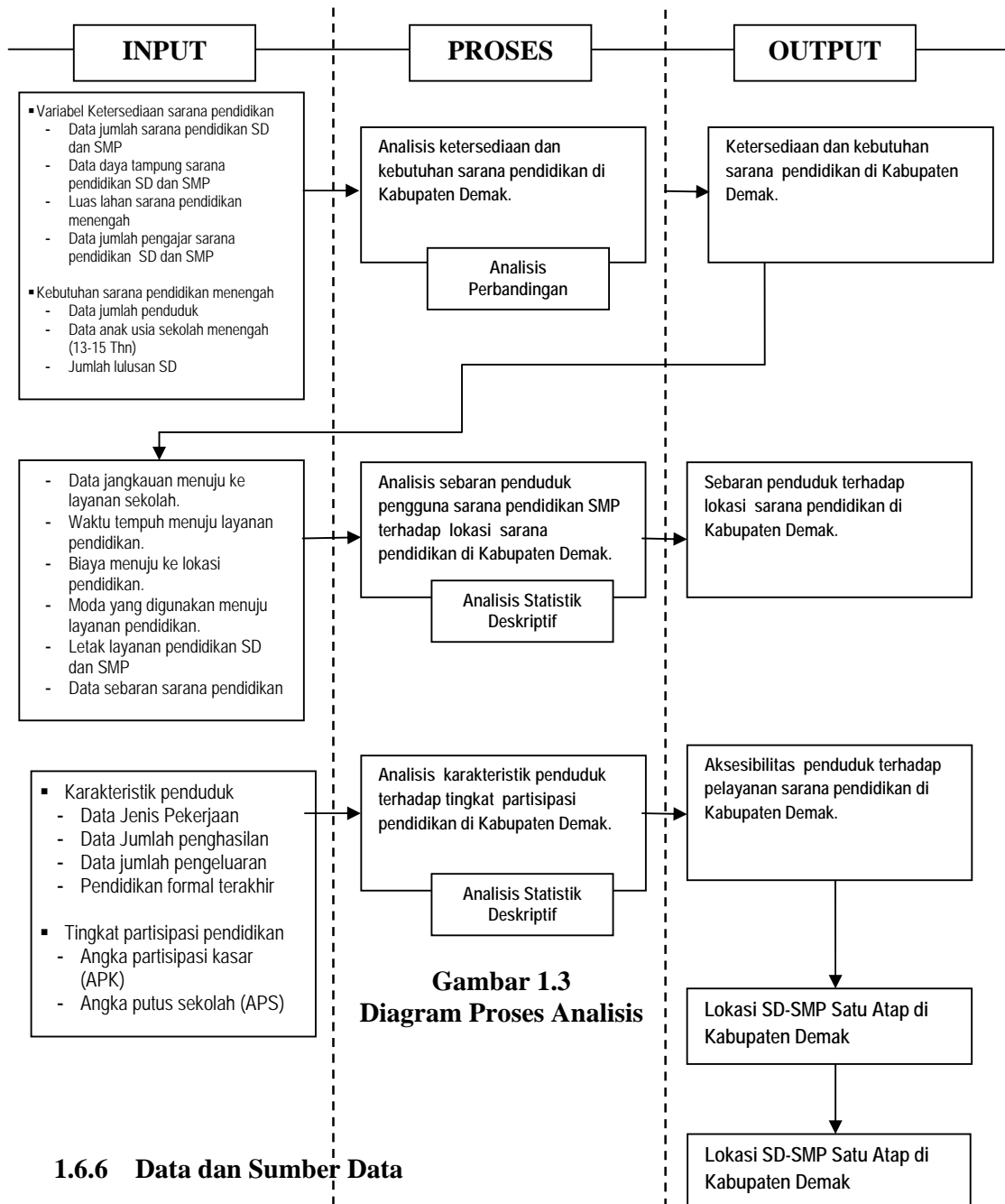
b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis untuk mendeskripsikan atau memaparkan kondisi dan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ataupun pengamatan langsung. Analisis ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Demak, setelah data-data tersebut diolah secara statistik deskriptif.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi sebaran penduduk terhadap lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Demak dan hubungan karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Demak.

Analisis deskriptif ini memberikan gambaran kondisi eksisting karakteristik masyarakat dan aksesibilitas di wilayah studi. Dikarenakan karakteristik masyarakat setempat/siswa pengguna beserta aktivitasnya dan aksesibilitas nantinya akan berpengaruh terhadap pembentukan pola konsumsi dan pemanfaatan terhadap sarana pendidikan yang ada. Untuk itu diperlukan deskripsi yang jelas mengenai kondisi yang ada berdasarkan hasil survei, kompilasi dan pengolahan data.

Untuk lebih jelasnya, proses analisis dapat dilihat dalam kerangka analisis pada **Gambar 1.3** berikut ini :



Gambar 1.3
Diagram Proses Analisis

1.6.6 Data dan Sumber Data

Data merupakan hal pokok dalam proses analisis, data dapat dibedakan menurut cara perolehannya, yaitu data primer dan data sekunder. Kebutuhan data dapat diketahui dari analisis yang akan dilakukan beserta indikator variabel yang digunakan. Adapun kebutuhan data dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I.4
DATA PENELITIAN**

No	Sasaran	Variabel	Data yang Digunakan	Sumber Data				Bentuk Data	Sumber Data	Tahun	
				Kui-sioner	Wawan-cara	Obser-vasi	Telaah - Data				
1.	Analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.	- Ketersediaan fisik sarana pendidikan SD dan SMP	- Jumlah sarana pendidikan SD dan SMP		W	O	D	Data statistik/ numerik	- Kantor Desa/Kelurahan - Dinas Pendidikan - Data Monografi Kecamatan dalam angka time series - Profil pendidikan Kabupaten Demak-	2007/terbaru	
			- Daya tampung sarana pendidikan SMP		W	O	D	Data statistik/ numerik			
			- Luas lahan sarana pendidikan SD terpencil		W	O	D	Data statistik/ numerik			
		- Kebutuhan sarana pendidikan SMP	- Jumlah penduduk)			O	D	Data statistik/ numerik			- BPS - Bappeda - Kantor Desa/Kelurahan -Dinas Pendidikan Kecamatan dalam angka time series
			- Jumlah anak usia sekolah menengah (13-15 Thn)		W		D	Data statistik/ numerik			
			- Jumlah lulusan SD		W		D	Data statistik/ numerik			
2.	Analisis karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan SMP di Kabupaten Demak.	- Karakteristik penduduk	- Jenis pekerjaan	K	W		D	Data statistik/ numerik	- Kantor Desa/Kelurahan - Dinas Pendidikan	2007/terbaru	
			- Jumlah penghasilan	K	W		D	Data statistik/ numerik			
			- Jumlah pengeluaran	K	W		D	Data statistik/ numeric			
			- Pendidikan formal terakhir	K	W		D	Data statistik/ numeric			
		Tingkat partisipasi pendidikan APK	- Angka partisipasi kasar (APK)				D	Data statistik/ numerik	- BPS	2007/	

No	Sasaran	Variabel	Data yang Digunakan	Sumber Data				Bentuk Data	Sumber Data	Tahun
				Kui-sioner	Wawan-cara	Obser-vasi	Telaah - Data			
		- APS	- Angka putus sekolah (APS)				D	Data statistik/ numerik	- Bappeda - Kantor Desa/Kelurahan - Dinas Pendidikan	terbaru
3	Analisis aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.	- Aksesibilitas Sebaran penduduk dan layanan sarana pendidikan	- Jangkauan menuju layanan pendidikan - Waktu tempuh menuju layanan pendidikan - Biaya ke lokasi pelayanan pendidikan - Moda yang digunakan	K	W			- Data statistik/numerik	- Data sekunder o Kantor Desa/Kelurahan o Dinas Pendidikan o BPS - Data primer/ lapangan	2007/ terbaru
		- Sebaran sarana pendidikan	- Sebaran layanan sarana pendidikan SD dan SMP		W	W	D	- Peta - Data statistik		

Sumber : Analisis 2008

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam studi ini ialah :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang gambaran keseluruhan studi yang dilakukan, meliputi latar belakang dan perumusan masalah. Bagian ini juga berisi tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian baik ditinjau dari aspek wilayah maupun aspek substansinya, kedudukan penelitian dalam bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

Bab II Kajian Teori Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap

Bagian kedua dalam proposal penelitian ini menjabarkan keseluruhan teori dan konsep yang menjelaskan secara teoritis mengenai kajian penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap. Dari teori tersebut dapat diperoleh variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Kajian teori yang disajikan juga digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan analisis kondisi pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak.

Bab III Tinjauan Umum Pendidikan di Kabupaten Demak

Bagian ini berisi deskripsi Kabupaten Demak sebagai wilayah studi, yang meliputi tinjauan terhadap kondisi fisik, kependudukan dan sarana umum pendidikan di Kabupaten Demak. Bagian ini juga akan diulas kondisi pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak secara umum.

Bab IV Analisis Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap Di Kabupaten Demak

Bab ini menguraikan mengenai identifikasi ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, sebaran penduduk dan sebaran lokasi sarana pendidikan, karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan menengah berdasarkan persepsi masyarakat.

BAB V Kesimpulan Dan Rekomendasi

Menguraikan mengenai kesimpulan studi dan rekomendasi studi baik rekomendasi studi lanjutan maupun rekomendasi masukan bagi penentuan lokasi SD – SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

BAB II

KAJIAN TEORI PENENTUAN LOKASI GEDUNG SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN DEMAK

Kajian teori ini akan menguraikan beberapa teori yang terkait dengan pelaksanaan program Gedung SD-SMP Satu Atap. Beberapa uraian teori mengenai sarana umum dan sarana pendidikan yang memberikan gambaran mengenai arti penting sarana umum dan sarana pendidikan dan berbagai hal yang berkaitan dengan sarana pendidikan. Diuraikan juga mengenai pedoman pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Teori yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kondisi pendidikan. Selanjutnya diuraikan mengenai teori lokasi dalam kaitannya dengan aksesibilitas sarana pendidikan.

2.1 Sarana Umum dan Sarana Pendidikan

Fasilitas atau sarana umum mempunyai fungsi dan peran dalam kehidupan suatu kota, membangun aktivitas, serta menopang kehidupan masyarakatnya. Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian sarana umum, peran pentingnya, hingga sarana pendidikan sebagai bagian sarana umum dan peran pendidikan dalam pembangunan.

2.1.1 Pengertian Sarana Umum

Fasilitas/sarana umum dan pelayanan umum merupakan berbagai bangunan fisik dan program terstruktur yang berperan dalam meningkatkan kenyamanan suatu lingkungan hunian (Jones, 1991:56). Sarana umum dapat

diartikan sebagai aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, rekreasi, dan olah raga, serta pemakaman umum.

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Peran sarana umum sebagai elemen penting dalam masyarakat ialah sarana umum merupakan aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat, yang memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual (Yeates,1980:32). Secara keseluruhan definisi sarana umum atau *community facilities* (Yeates,1980:40). meliputi:

- a. Berbagai bangunan atau gedung-gedung untuk kegiatan administrasi, pendidikan, peribadatan, budaya, kesehatan, keamanan, rekreasi dan pelayanan kebutuhan hidup lainnya.
- b. Utilitas dan pekerjaan umum yang menyediakan air, energi, pengontrol suhu, penerangan komunikasi, treatment air limbah, pengendalian banjir, pengelolaan sampah dan transportasi.
- c. Lahan – lahan publik untuk menampung berbagai bangunan dan fasilitas pekerjaan umum serta untuk penyediaan ruang terbuka seperti taman, playground dan keindahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No.13/KPTS/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat, jenis sarana sosial terdiri dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, perbelanjaan dan niaga, sarana pemerintah dan pelayanan publik, rekreasi dan kebudayaan, serta lapangan terbuka dan olahraga.

Berdasarkan pengertian di atas, sarana umum terdiri dari berbagai jenis yaitu administrasi, komunikasi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi, keamanan, transportasi, penyediaan energi, pelayanan jasa, saluran buangan, sampah padat, air bersih dan sarana khusus.

Sarana umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, sarana sosial dan sarana fisik. Sarana sosial ialah aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat, memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual. Sedangkan sarana fisik ialah aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan fisiknya seperti air, sanitasi, gas, listrik, perumahan dan sebagainya (Yeates,1980:30). Konteks perencanaan wilayah dan kota, sarana sebagai salah satu komponen pembentuk pusat pelayanan, memiliki hierarki pada setiap jenis pelayanannya.

DPU dalam Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota DPU (SKBI-2.3.51.1987:33) juga membedakan skala pelayanan fasilitas umum berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya menjadi:

1. Skala pelayanan Kelurahan, dengan jumlah penduduk pendukung 30.000 jiwa.
2. Skala pelayanan Kecamatan, dengan jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa.
3. Skala pelayanan Wilayah, dengan jumlah penduduk pendukung 480.000 jiwa.

4. Skala pelayanan Kota, dengan jumlah penduduk pendukung 1.000.000 jiwa atau lebih.

Berdasarkan jenjang hierarki di atas, terdapat skala pelayanan unit kota, fasilitas umum unit kota meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perniagaan dan industri (perdagangan), pemerintahan/pelayanan umum, olah raga/ruang terbuka dan rekreasi (DPU, 1987:22).

2.1.2 Konsep dan Ruang Lingkup Pendidikan

Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada dimasyarakat (Isbiyantoro, 2003:25). Menurut Prof. Rechey (dalam Tim IKIP 1980:4) pendidikan diartikan sebagai suatu aktifitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks, modern, dan fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yaitu sekolah, yang tetap berhubungan dengan pendidikan di luar sekolah. Menurut Prof. Lodge (Tim IKIP 1980:6) dalam pengertian yang lebih sempit pendidikan berarti, dalam praktiknya identik dengan “sekolah”, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang di atur.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut pendidikan identik dengan lembaga formal yaitu sekolah. Kajian terhadap sistem pendidikan terkait dengan kondisi lembaga sekolah yang ada.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal lahir dan berkembang dari efisiensi dan efektifitas di dalam pemberian pendidikan masyarakat dan berfungsi sebagai pendidikan formal yang terlihat pada tujuan institusional yaitu tujuan jenis

masing-masing dan tingkatan sekolah dan aneka ragam bidangnya (Isbiyantoro, 2003:25).

Masih menurut Isbiyantoro (2003:26) Hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Sekolah sebagai patner dari masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan
2. Sekolah sebagai produser yang melayani pesanan pendidikan dari masyarakat

Hubungan tersebut terdapat tiga gambaran hubungan yang rasional; pertama, sekolah sebagai lembaga layanan masyarakat sehingga terdapat konsekuensi konseptual dan teknis, hal ini mengakibatkan terjadi kesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, target yang ditangani sekolah akan ditentukan oleh kejelasan formulasi kontrak antara sekolah dengan masyarakat. Ketiga, mengingat sekolah sebagai pihak yang dikontrak masyarakat, sehingga akan dipengaruhi oleh ikatan obyektif antara keduanya seperti sarana dan prasarana yang ada (Isbiyantoro, 2003:26).

2.1.3 Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Pelayanan sosial kota dalam penyelenggaraannya memerlukan adanya penyediaan fasilitas sosial. Penyediaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dan kota seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan sumber daya manusianya. Arsyad mengemukakan konsep perencanaan wilayah pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya demi tercapainya tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang (Tarigan, 2004:4-5).

Hal tersebut, berarti bahwa harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, maka sudah seharusnya perlu diperhatikan kualitas

masyarakat. Meningkatkan kualitas masyarakat, maka pemerintah perlu mengupayakan mutu pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintah harus memberikan fasilitas dibidang kesehatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas pendidikan paling mendasar dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan.

Disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (aspek pertahanan dan keamanan), untuk memajukan kesejahteraan umum (aspek sosial dan ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (aspek kebangsaan dan kemanusiaan). Preambule UUD 1945 tersebut secara tersirat telah jelas pentingnya peran pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan utama negara Indonesia. Pendidikan juga mempunyai arti penting bagi manusia, karena dengan pendidikan dapat memberikan keterampilan, pengetahuan dan nilai – nilai pada masyarakat. Peran pendidikan juga menstimulir dan menyertai perubahan – perubahan serta perkembangan yang ada di masyarakat (Tim IKIP, 1980 :215).

Berbagai problematik peningkatan mutu sarana pendidikan termasuk rehabilitasi kondisi fisik gedung-gedung yang bermasalah tentulah terkait dengan pengelolaan dan sistem pendidikan yang belum seperti diharapkan oleh kalangan pendidikan. Pembangunan fasilitas sosial di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan, karena tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas masyarakat bahkan kualitas bangsa ini (www.suaramerdeka.com). Menurut Supriyoko pendidikan dan masyarakat multikultural itu memiliki hubungan timbal balik (*reciprocal relationship*). Artinya, bila pada satu sisi pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat, di sisi lain masyarakat dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk

memberhasilkan fungsi dan peran pendidikan umumnya” (Supriyoko,2004/www.kompas.com).

Dr.E.N.M Gooding (Tim IKIP 1980:219) bahwa mengikut-sertakan pendidikan dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Menurut Margater Mead (Tim IKIP 1980:222-223) mengatakan bahwa pendidikan dalam pembangunan dituntut untuk mengemban tugas yang semakin kompleks dan luas sesuai dengan aneka ragam masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Adapun pendidikan yang relevan dengan pembangunan diarahkan untuk:

- a. Menambah konformitas masyarakat terhadap program-program pembangunan.
- b. Menambah kepekaan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat dari pengaruh pembangunan yang terjadi.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu menyelesaikan persoalan yang ada sebagai upaya untuk memajukan pembangunan di lingkungan mereka.
- d. Mengembangkan sikap yang cocok untuk tuntutan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disimpulkan bahwa peran pendidikan dapat memberi penguatan di satu sisi, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini langsung atau tidak langsung, akan memberi penguatan pada sisi lain. Penguatan terhadap pendidikan, misalnya dengan memperbaiki sistem dan mengefektifkan kegiatan belajar dengan cara mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pendidikan, akan menambah keberhasilan dalam membangun masyarakat. Di sisi lain, penguatan pada

masyarakat yaitu dengan mengelola potensi yang dimiliki secara benar, akan menambah keberhasilan fungsi dan peran pendidikan umumnya. Implikasinya, dilakukannya penguatan pada kedua sisi secara simultan akan memberi hasil optimal, baik dari sisi peran pendidikan maupun pembangunan masyarakat secara berkesinambungan.

2.1.4 Jenis Sarana Pendidikan

Keputusan Menteri PU No.13/KPTS/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat, jenis sarana umum terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perbelanjaan dan niaga, sarana pemerintah dan umum, sarana rekreasi dan kebudayaan, serta sarana olah raga dan lapangan terbuka.

Sarana Pendidikan sebagai salah satu bagian dalam sarana umum, mempunyai peran tersendiri dan akan diangkat sebagai fokus utama penelitian ini. Jenis sarana sosial berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 13/KPTS/1987 termasuk sarana pendidikan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

TABEL II.1
JENIS SARANA PENDIDIKAN

No.	Jenis Sarana	Keterangan	Kriteria
1	Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK)	Sarana pendidikan yang digunakan untuk anak-anak usia 5-6 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum terdiri dari 2 ruang kelas yang masing-masing dapat menampung 35-40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain - Pencapaian maksimum adalah 500 meter - Kelompok penduduk pendukung 1000 jiwa

No.	Jenis Sarana	Keterangan	Kriteria
2	Sekolah Dasar (SD)	Sarana Pendidikan yang digunakan untuk anak usia 6-12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum terdiri dari 6 ruang kelas, yang masing-masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain - Pencapaian maksimum adalah 1000 meter - Kelompok penduduk pendukung 1600 jiwa
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Sarana Pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum terdiri dari 3 ruang kelas, yang masing-masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain - Luas Tanah min: 1500 m² - Luas Bangunan min: 1200 m² - Kelompok penduduk pendukung 4800 jiwa
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	Sarana Pendidikan yang digunakan untuk menampung lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum terdiri dari 6 ruang kelas, yang masing-masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain - Luas Tanah min : 5000 m² - Luas Bangunan min: 2250 m² - Kelompok penduduk pendukung 9600 jiwa

Sumber : SK Men PU No.13/KPTS/1987

Menurut Tarigan (2004:11) sarana/ fasilitas pendidikan sangat beragam. Dapat dibedakan dari sudut jenjang pengajaran maka ada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Program Diploma atau Politeknik dan Universitas/ Institut dimana ada program S-1, S-2 dan S-3. Demikian pula ada sekolah berbasis agama dan ada yang berbasis pendidikan umum dengan jenjang yang sama. Di luar itu, ada

pendidikan nonformal berupa kursus keterampilan dan pengetahuan khusus (bahasa asing).

Lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi pada jalur agama yaitu Departemen Agama dan dapat digolongkan sebagai sarana pendidikan yang di antaranya adalah;

- a. TK dan RA,
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI),
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs),
- d. Madrasah Aliyah (MA)
- e. Institut Agama Islam (IAI).

Disimpulkan bahwa jenis sekolah atau sarana pendidikan dasar dan menengah yang dijadikan obyek penelitian ialah:

- a. Sekolah Dasar dan setingkatnya,
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan setingkatnya,

Batasan ini diambil berdasar cakupan wilayah sekolah menengah yang menjangkau seluruh Kecamatan, sedang TK dan SD hanya dalam lingkup lingkungan atau Kelurahan saja. Kemudian adanya standar dan asumsi bahwa Sekolah Tinggi, Akademi dan Universitas atau sederajat merupakan sarana pendidikan dengan lingkup pelayanan antar kota/kabupaten, dan lingkup (antar) propinsi. Selain itu tingkatan pendidikan tertinggi yang terdapat di wilayah studi hanya hingga tingkatan SMA dan sederajat.

2.1.5 Kategori Fisik Sarana Pendidikan

A. Taman kanak-kanak

Taman kanak-kanak seharusnya terdiri lebih dari 3 ruang kelas, tiap kelas mempunyai murid tidak lebih dari 20 anak, melayani penduduk yang berjumlah kira-kira 780 orang. Memerlukan luas tanah sekurang-kurangnya 700m² atau 500m² bila direncanakan dihubungkan dengan lapangan bermain anak (Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006 : 1-2).

B. Sekolah Dasar

Satu Sekolah Dasar harusnya terdiri dari enam kelas, tiap kelas mempunyai murid tak lebih dari 40 anak. Tiap bangunan Sekolah Dasar memerlukan lahan seluas 600m², dan dapat melayani penduduk berjumlah setinggi-tingginya 6.400 orang, sekitar jumlah penduduk satu rukun kampung.

C. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama setidaknya terdiri dari 6 kelas, dengan murid pada tiap kelas tidak lebih dari 40 orang. Tiap Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama membutuhkan tanah sedikitnya 1500m² dan akan dapat melayani kira-kira 4800 penduduk atau kurang lebih meliputi 4 rukun kampung.

D. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sangat minimal terdiri dari 6 kelas dengan jumlah murid tiap kelas tidak lebih dari 40 orang. Tiap Sekolah Menengah Atas membutuhkan tanah minimal seluas 5000m² dan dapat melayani kira-kira 9600 orang penduduk atau sama dengan 6 rukun kampung.

2.2 SD – SMP Satu Atap

2.2.1 Pengertian SD-SMP Satu Atap

SD-SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaanya terpadu. Keterpaduan dapat secara fisik dan dapat secara pengelolaan. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Keterpaduan pengelolaan memiliki arti terpadu dalam visi dan misi; penyusunan program; penerimaan siswa baru; mengatasi DO, angka mengulang, angka transisi; mengatasi kebutuhan tenaga; mengatasi kebutuhan sarana prasarana; mengatasi kebutuhan dana dan upaya meningkatkan mutu pendidikan (Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006:3-5).

Sistem kelembagaan SD–SMP Satu Atap adalah tetap ada 2 lembaga yaitu SD dan SMP. Masing-masing memiliki kepala sekolah atau kepala sekolah hanya satu, tetapi ada wakil kepala SD dan ada wakil kepala SMP dari keduanya mana yang akan dipilih ditetapkan oleh PEMDA setempat. Jadi bisa memiliki satu pimpinan atau dua pimpinan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berlaku secara nasional. Proses belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran yang dikembangkan secara nasional.

Penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap harus memperhitungkan secara matang aksesibilitas terhadap tempat tinggal siswa yang direncanakan agar dapat dijangkau secara maksimal. Selain itu juga harus memperhatikan mekanisme yang ada pada pedoman pelaksanaan penetapan SD-SMP Satu Atap.

2.2.2 Mekanisme Penetapan SD-SMP Satu Atap

Mekanisme penetapan SD-SMP Satu Atap sudah ditentukan berdasarkan Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan panduan tersebut terlihat beberapa hal yang berkaitan dengan lokasi seperti pada tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP minimal 95 % secara nasional, daerah yang terpencil, terisolir dan sulit dijangkau (Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006:4).

A. Kriteria Calon SD-SMP Satu Atap

1. Kriteria umum

- a. SD Negeri terletak di daerah terpencil, terisolir, dan sulit dijangkau.
- b. Lulusan SD di daerah tersebut sebagian besar tidak melanjutkan (60% putus sekolah/tidak melanjutkan, dan maksimal 40 anak).
- c. Belum ada SMP baik negeri maupun swasta atau yang sederajat yang dapat terjangkau.
- d. SD terdekat tidak ada atau ada tetapi jumlah lulusan secara keseluruhan sedikit.
- e. SDM yang berkualifikasi sebagai tenaga pendidik tingkat SMP pada daerah di mana SD berlokasi sangat terbatas.
- f. Kondisi sarana dan prasarana SD yang ada cukup lengkap, baik dan memadai untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum SD.
- g. Butir b s/d e harus dilengkapi dengan data dan analisis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dapat diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dit. PSMP.

2. Kriteria khusus (Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006:4)

- a. Pada lokasi SD tersebut tersedia lahan yang memungkinkan untuk dikembangkannya prasarana tambahan, luas lahan secara keseluruhan paling sedikit adalah 2.500 m²
- b. Sambil menunggu tenaga yang diusahakan pemerintah kabupaten/kota, ada kesanggupan dari tenaga guru atau tenaga terdidik di sekitarnya untuk mengatasi sementara kebutuhan tenaga yang diperlukan, dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.
- c. Ada kesanggupan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan tenaga pendidik dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan menyediakan anggaran biaya operasional SMP yang bersangkutan mulai tahun ke dua (pada tahun pertama disediakan oleh Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP melalui dana pengembangan), dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2.3 Konsep Lokasi

2.3.1 Penentuan Lokasi Gedung SMP

Salah satu strategi kebijakan pemerintah adalah pemerataan kesempatan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek geografis dan status social masyarakat (BAPPENAS, 2000). Salah satu upaya untuk merealisasikan pemerataan pendidikan SMP adalah dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB). Pembangunan USB terkendala pada dana karena krisis yang melanda Indonesia dan kesulitan karena siswa yang menyebar sehingga

pembangunan USB tidak efisien. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan SD-SMP Satu Atap.

Penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap yang tepat harus memperhatikan konsep-konsep penentuan lokasi fasilitas umum khususnya fasilitas pendidikan. Gedung sekolah seharusnya dibangun pada lokasi yang dapat dijangkau oleh seluruh siswa yang akan bersekolah pada sekolah tersebut. Cristaller berpendapat bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keuangan adalah dengan menempatkan pelayanan tersebut pada tempat yang sentral (pusat). Lokasi sentral merupakan tempat yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara maksimum dalam hal jumlah (Djojodipusro, 1992:134).

Teori tempat pusat yang dikemukakan Christaller, selain dapat digunakan untuk menganalisis pusat-pusat pelayanan yang sudah ada terhadap daerah sekitar, dapat pula digunakan untuk merencanakan lokasi kegiatan atau lokasi pelayanan dengan penyesuaian terhadap jenis pelananaan dan kondisi daerah tertentu.

Dalam pemilihan lokasi SD-SMP Satu Atap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup kriteria minimal sarana dan kriteria minimum prasarana dan penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 jiwa yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh 3 kilo meter melalui lintas jalan kaki. Selain itu lebih memperhatikan kondisi lokasi seperti hal-hal berikut :

- 1. Luas lahan minimum 2500 m persegi*
- 2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat*
- 3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api*

Seain itu Juga berpedoman pada panduan pelaksanaan program Block Grant Unit Sekolah Baru dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang memuat tentang kriteria-kriteria umum dan khusus untuk kelayakan lokasi SD-SMP Satu Atap.

2.3.2 Arti Penting Lokasi

SD – SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaanya terpadu. Keterpaduan dapat secara fisik dan dapat secara pengelolaan. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Orientasi dalam pendekatan diri ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan bargaining power (Kotler, 1997:78).

Demikian juga halnya bagi SD-SMP Satu Atap, pemilihan lokasi yang optimal merupakan langkah strategis, karena dengan lokasi yang optimal maka diharapkan dapat memaksimalkan jumlah siswanya, membantu kontrol biaya operasinya dan dapat menunjang pertumbuhan di masa depan. Perencanaan penentuan lokasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja SD-SMP Satu Atap tersebut.

2.3.3 Teori Lokasi

Mengetahui karakteristik jenis kegiatan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu lokasi kegiatan. Menentukan lokasi sangat terkait dengan daerah pelayanan yang menjadi target pelayanan. Dari sini akan terlihat bahwa pelayanan umum yang lebih bersifat pelayanan publik akan berbeda dengan kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi ekonomi. Terdapat tiga konsep mengenai lokasi kegiatan (Daldjoeni, 1992:97):

1. Jangkauan (*range*), maksudnya seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.

2. Batas ambang penduduk (*threshold*), biasanya jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan/membutuhkan suatu fasilitas tertentu.
3. Tempat pusat (*central place*), yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan perdesaan serta wilayah yang lebih besar lagi daripada wilayahnya sendiri dengan masing-masing tempat pusat tersebut menawarkan batas ambang populasi dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayani.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perilaku lokasi dari kegiatan pada umumnya adalah memaksimalkan akses pada komunitas masyarakat (Rusthon dalam Savitri, 2002:27).

Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (*activity*). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (*local input*); permintaan lokal (*local demand*); bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*); dan permintaan luar (*outside demand*) (Hoover dan Giarratani, 2007)

Selain teori yang dikemukakan di atas, terdapat teori lokasi yang perlu untuk diketahui yaitu *Central Place Theory*. Teori ini dikembangkan oleh Christaller yang disempurnakan oleh August Losch. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini adalah bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan kepada penduduk adalah dengan menempatkan

lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk pada tempat yang sentral. Hal tersebut merupakan landasan utama bagi setiap alokasi lokasi fasilitas pelayanan (Djojodipuro, 1992:134-135).

Tempat lokasi yang sentral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tempat yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan, maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang atau jasa pelayanan yang dihasilkan. Tempat seperti itu, oleh Christaller dan Losch, diasumsikan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk yang heksagonal. Tempat-tempat tersebut memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah di sekitarnya.

Berdasar pada asumsi Christaller bahwa “orang akan berjalan ke tempat yang paling dekat tempat tinggalnya untuk mendapatkan barang kebutuhan”, maka bagi orang-orang yang tinggal di kawasan pengaruh tempat-tempat sentral yang bertampalan, mereka akan pergi ke tempat sentral yang paling dekat.

2.3.4 Aksesibilitas Pendidikan

Johnston (1983 dalam Daryono, 2002:26) mengartikan aksesibilitas sebagai transportasi dan dapat diartikan sebagai kemampuan orang-orang untuk memperoleh atau menjangkau, kesempatan yang dirasakan oleh mereka. Aksesibilitas juga bisa diartikan kemudahan lokasi terhadap lokasi lain. Aksesibilitas Pendidikan dengan demikian dapat diartikan sebagai kemudahan lokasi pendidikan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Bintarto (1979:24) menyatakan bahwa aksesibilitas menunjuk adanya kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah yang erat kaitannya dengan jarak (Hagerstand dalam Moseley 1974:45) membedakan adanya dua jenis aksesibilitas, yaitu aksesibilitas social yang meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan aksesibilitas fisik, yaitu jarak fisik yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai pelayanan.

Suharjo (1988:26) menjelaskan bahwa dalam pengukuran aksesibilitas, jarak merupakan unsur yang penting. Ada tiga dimensi dalam ukuran jarak, yaitu (1) yaitu jarak fisik/geometric yang diukur dengan satuan panjang; 2) Jarak waktu dengan satuan ukuran waktu tempuh bisa jam, menit, dll; 3) Jarak ekonomi yaitu dihitung dengan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Daldjoeni (1992:25) menyatakan bahwa jarak dapat dinyatakan sebagai jarak mutlak dan jarak nisbi. Jarak mutlak adalah jarak yang sifatnya fisik seperti misalnya mil, kilometer dan sebagainya. Jarak mutlak tidak berubah dan sifatnya tetap. Jarak nisbi adalah jarak relative yang dapat berubah seperti waktu, ongkos dan kenyamanan.

2.4 Tinjauan Kependudukan

Sektor penduduk merupakan aset utama wilayah dalam setiap aktivitas perkotaan. Lingkup keruangan dan kekotaan, aktivitas penduduk merupakan aktivitas utama kota, dan dalam studi ini peran penduduk sebagai pengguna, sarana pendidikan yang berfungsi sebagai penyedia berhubungan erat.

2.4.1 Kondisi Kependudukan

Rusli (1988:77) mengemukakan bahwa tujuan analisis kependudukan secara umum paling tidak meliputi:

- a. Mengetahui kuantitas dan kondisi penduduk, baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, bahkan kondisi sosio-ekonominya.
- b. Mengetahui pertumbuhan masa lampau, masa sekarang, penurunannya dan penyebarannya (distribusi) dalam suatu wilayah pembangunan.
- c. Mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek pembangunan.
- d. Mencoba memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan.
- e. Sebagai bahan pemantauan untuk melakukan pengendalian penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang No.3 tahun 1972 menyatakan bahwa distribusi penduduk memiliki tujuan untuk peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh wilayah, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, serta ,memperluas pertahanan dan keamanan nasional.

2.4.2 Komposisi Penduduk

Kajian tentang komposisi penduduk memperhitungkan fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap golongan penduduk dalam suatu wilayah.

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Rusli, 1983: 35). Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel terpenting dalam demografi. Komposisi penduduk menurut jenis umur, dapat disebut sebagai struktur umur penduduk. Salah satu cara menggambarkan komposisi penduduk adalah dengan piramida penduduk. Secara umum, piramida penduduk dapat terbagi dalam tiga tipe, yaitu :

- a. *Expansive*; tipe ini menggambarkan kondisi sebagian besar penduduk yang berada dalam kelompok umur termuda.
- b. *Constructive*; tipe ini menggambarkan keadaan penduduk dimana sebagian kecil penduduk berada pada usia muda dan penduduk tua relatif lebih besar.
- c. *Stationary*; tipe ini menggambarkan keadaan penduduk dalam tiap kelompok umur yang hampir sama, dan mengecil pada usia tua.

2.4.3 Sebaran Penduduk

Pola persebaran penduduk di wilayah studi akan dilihat dari pola persebaran permukiman yang diperoleh dari peta tata guna lahan. Kesimpulan atau sintesa dari tinjauan kependudukan nantinya ialah sebagai dasar kajian kondisi dan karakteristik kependudukan di Kabupaten Demak.

Perhitungan dari data statistik yang ada akan dipergunakan dalam analisis, terkait kondisi pelayanan sarana pendidikan di wilayah studi. Peran penduduk tidak dapat dipisahkan dari studi ini, untuk itu kajian kependudukan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan studi.

2.5 Sintesa Teori

Kesimpulan dari kajian terhadap literatur dan teori yang telah ada diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat dijadikan dasar dalam penelitian nantinya. Pembatasan terhadap penelitian dapat dilihat dari variabel-variabel terpilih yang akan dibahas dalam pelaksanaan studi dan menjawab pertanyaan penelitian “**Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak**” yang dapat dilihat pada tanel II.2.

2.6 Kerangka Teoritis Penelitian

Sebagai dasar untuk memperkuat justifikasi dan batasan penelitian, maka perlu digambarkan dalam sebuah *frame* apa yang telah didapatkan dari sintesa teori, yaitu dalam bentuk kerangka teoritis penelitian. Kerangka dimaksudkan untuk memperjelas alur teori dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.1.

TABEL II.2
SINTESA TEORI

No.	Sasaran	Teori	Sumber	Variabel
1	Sarana umum dan sarana pendidikan	Aktivitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat dapat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, peribadatan, rekreasi, rekreasi dan olah raga, serta pemakaman umum.	<i>Yeates, 198,</i> <i>Tjokroamidjojo, 1995</i> <i>Jones, 1991</i> <i>Permen Diknas RI no 24 Tahun 2007</i> Panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap 2006	<u>Terpilih</u> <u>Ketersediaan</u> <u>sarana pendidikan</u> <u>SD dab SMP</u> <u>(fisik)</u> - Jumlah sarana pendidikan SD dan SLTP

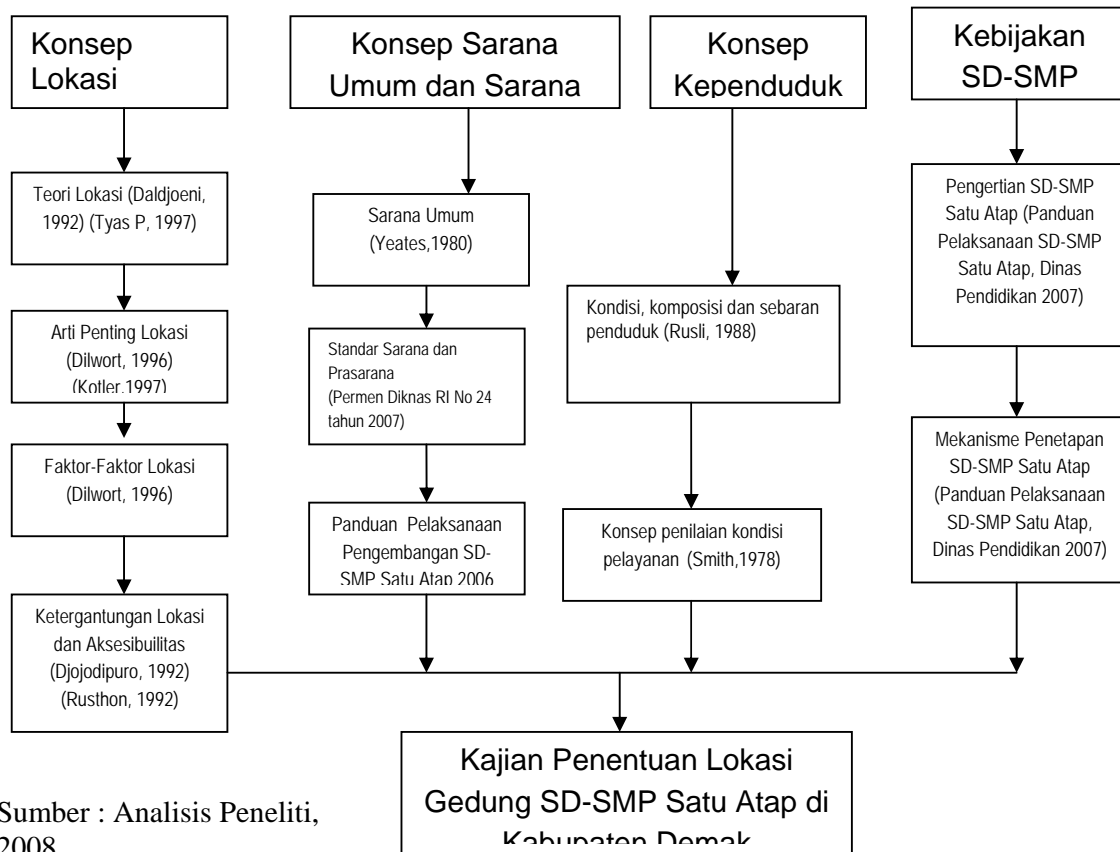
No.	Sasaran	Teori	Sumber	Variabel
2	Peran dan signifikansi pendidikan	Pendidikan dan masyarakat multikultural itu memiliki hubungan timbal balik (<i>reciprocal relationship</i>). Pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat, masyarakat dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk memberhasilkan fungsi dan peran pendidikan umumnya	<i>Tim IKIP, 1980</i> <i>Supriyoko, 2004</i> <i>Claire, 1985</i>	a. Daya tampung sarana pendidikan SD dan SLTP Luas lahan sarana pendidikan menengah
3	Fasilitas pelayanan pendidikan	Jenis dan Standar Fasilitas Sosial-Sarana Pendidikan : - TK - MI - SD - MTs - SLTP - MA - SLTA	<i>Tarigan (2004:11)</i>	<u>Kebutuhan sarana pendidikan</u> Kebutuhan Pendidikan dasar (SD dan SMP)
4	Pengertian Unit Lingkungan Neighbourhood	<i>Perbedaan konsepsi unit lingkungan yang digunakan :</i> - Konsepsi Unit Lingkungan yang Jumlah anggota keluarga - Lama tinggal - Pendidikan formal terakhir - Jenis pekerjaan - Penghasilan	<i>Bintarto, 1989</i> <i>Perry, Jose Sert,</i> <i>Engelhardt</i>	<u>Terpilih</u> 1. <u>Karakteristik penduduk</u> - Jenis pekerjaan - Jumlah penghasilan - Jumlah pengeluaran - Pendidikan formal terakhir

No.	Sasaran	Teori	Sumber	Variabel
5	Faktor mempengaruhi persepsi masyarakat	<p><i>Penilaian kondisi pelayanan sarana pendidikan berdasarkan persepsi masyarakat :</i></p> <p><i>Tuntutan faktor kebutuhan seseorang akan tempat bermukim selalu berubah sesuai kondisi sosial ekonominya.</i></p>	Smith,1978Gollany, 1984	
6	Sarana pendidikan : Keputusan Menteri PU No.13/ KPTS/1987,	Upaya peningkatan SDA dan SDM yang baik merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan maka pemerintah perlu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas sarana pendidikan	Tarigan,2004	<u>Tingkat partisipasi pendidikan</u> - Angka partisipasi kasar (APK) - Angka putus sekolah (APS)

No.	Sasaran	Teori	Sumber	Variabel
7	Konsep Lokasi	<p>Teori Lokasi</p> <p>Tiga konsep mengenai lokasi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan (<i>range</i>), maksudnya seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. • Batas ambang penduduk (<i>reshold</i>), biasanya jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan/membutuhkan suatu fasilitas tertentu. • Tempat pusat (<i>central place</i>), yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan perdesaan serta wilayah yang lebih besar lagi daripada wilayahnya sendiri dengan masing-masing tempat pusat tersebut menawarkan batas ambang populasi dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayani. 	<p>(Daldjoeni, 1992:97)</p> <p>(Djojodipuro, 1992:134-135):</p> <p>(Kotler, 1997:78)</p> <p>(Johnston 1983 dalm Daryono, 2002:26)</p>	<p><u>Variabel Terpilih</u></p> <p>∴</p> <p><u>Aksesibilitas</u></p> <p><u>Sebaran penduduk dengan layanan pendidikan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan menuju layanan pendidikan 2. Waktu tempuh menuju layanan pendidikan 3. Biaya ke lokasi pelayanan pendidikan 4. Moda yang digunakan

No.	Sasaran	<i>Teori</i>	Sumber	Variabel
		<p>– Faktor-faktor Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertama, kedekatan dengan pemukiman penduduk. Kedekatan dengan pemukiman penduduk ini akan memudahkan masyarakat menjangkau lokasi SD – SMP Satu Atap • kedua, biaya transportasi. • Ketiga, wilayah pelayanan oleh sarana pendidikan yang lainnya. Tingkat pelayanan ini perlu dipertimbangkan. • Faktor keempat adalah keunikan lokasi sarana, seperti berada di kompleks perumahan atau permukiman tertentu. 		<p><u>Sebaran layanan sarana pendidikan</u></p>

Sumber : Analsiis 2008



Gambar II.1
Kerangka Teoritis Penelitian

BAB III

TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

Studi pengembangan pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap, analisis terhadap profil pendidikan Kabupaten Demak menjadi hal yang penting. Analisis terhadap profil Kabupaten Demak dapat diketahui dengan melihat potensi dan permasalahan Kabupaten Demak. Beberapa hal yang akan di tinjau adalah keadaan umum Kabupaten Demak Berkaitan dengan pendidikan, kinerja pendidikan dasar dan menengah, serta permasalahan umum pendidikan di Kabupaten Demak.

3.1 Keadaan Umum Kabupaten Demak

3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Demak

Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ – $7^{\circ}09'43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Wilayah ini sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah sepanjang 49 km dan dari Utara ke Selatan sepanjang 41 km.

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan

laut. Sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

3.1.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak

3.1.2.1 Kondisi Umum Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2005 adalah sebanyak 1.036.521 orang terdiri atas 512.203 laki-laki (49,42%) dan 524.317 perempuan (50,58%). Jumlah penduduk ini naik sebanyak 11.207 orang atau sekitar 1,09 persen dari tahun sebelumnya.

Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Demak dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 127.131 orang, 97.696 orang, dan 97.238 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kobonagung dan Kecamatan Gajah dengan masing-masing sebanyak 38.590 orang dan 46.841 orang.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 674.343 orang (65,06%), dan selebihnya 317.508 orang (30,63%) berusia dibawah 15 tahun dan 44.657 orang (4,31%) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak adalah 537,08. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 537 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2005 kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.154 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 1.766 orang/Km², sedang

penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 802 orang/Km².

Selama tahun 2005 terdapat 4.500 orang (2.081 laki-laki dan 2.419 perempuan) yang datang dan menjadi penduduk Kabupaten Demak. Jumlah ini 31,96 persen dari tahun sebelumnya yang sekitar 3.410 orang. Penduduk yang pergi mencapai 4.237 orang (2.174 laki-laki dan 2.063 perempuan) naik sekitar 66,35 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.547 orang.

3.1.2.2 Kondisi Umum Kependudukan Yang Berkaitan Dengan Pendidikan

Profil pendidikan Kabupaten Demak 2005 mengkategorikan tingkat penduduk menjadi 9 kategori sebagai berikut :

TABEL III.1
KEADAAN DEMOGRAFI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004

No.	Komponen	Jumlah	Persentase
1.	Komposisi Penduduk	1.017.075	
	A. Penduduk 7-12 Tahun	138.425	13.61%
	B. Penduduk 13-15 Tahun	70.618	6.94%
	C. Penduduk 15-18 Tahun	69.059	6.79%
	D. Usia Lainnya	738.973	72.66%
5.	Tingkat Pendidikan	1.017.075	
	A. Tidak / Belum tamat SD	74794	7.35%
	B. Tamat SD	338913	33.32%
	C. Tamat SLTP	126964	12.48%
	D. Tamat SMU	56047	5.51%
	E. Tamat SMK	7601	0.75%
	F. Tamat Diploma I/II	3296	0.32%
	G. Tamat Diploma	2910	0.29%
	H. Tamat Sarjana	6832	0.67%
	I. Tidak Terjawab	287529	28.27%
6.	Tingkat Kepandaian	1.017.075	
	Dapat membaca dan Menulis	718995	70.69%
	Buta Huruf	298080	29.31%
7.	Angkatan Kerja	502.891	
	Bekerja	439817	87.46%
	Mencari Pekerjaan	63074	12.54%

No.	Komponen	Jumlah	Persentase
8.	Bukan Angkatan Kerja	372.993	
	Bersekolah	152329	40.84%
	Mengurus Rumah Tangga	146880	39.38%
	Lainnya	73784	19.78%
9.	Penduduk Miskin	411.721	
	Kota	61758	15.00%
	Desa	349963	85.00%

Sumber : Profil Kabupaten Demak Tahun 2005

Berdasarkan tabel keadaan demografi Kabupaten Demak di atas terlihat perbedaan yang mencolok antara angka penduduk usia 7-12 Tahun yaitu sebesar 13,61% dan angka penduduk usia 13-15 Tahun yaitu 6,94 %. Angka lulusan SD dan SMP yang menunjukkan perbedaan mencolok yaitu lulusan SD sebesar 33.32% sedangkan angka lulusan SMP sebesar 12.48%.

Data tersebut di atas menunjukkan perbedaan menonjol angka usia SD ke SMP sehingga dapat di prediksi bahwa angka transisi SD-SMP Kabupaten Demak secara umum masih besar.

3.1.3 Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Demak

3.1.3.1 Fasilitas Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk, bahkan setiap penduduk berhak untuk dapat mengenyam pendidikan, khususnya penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang pada tahun 2005 masih bersekolah sebanyak : SD 152.026 orang, SLTP 63.826 orang, dan SLTA 30.302 orang.

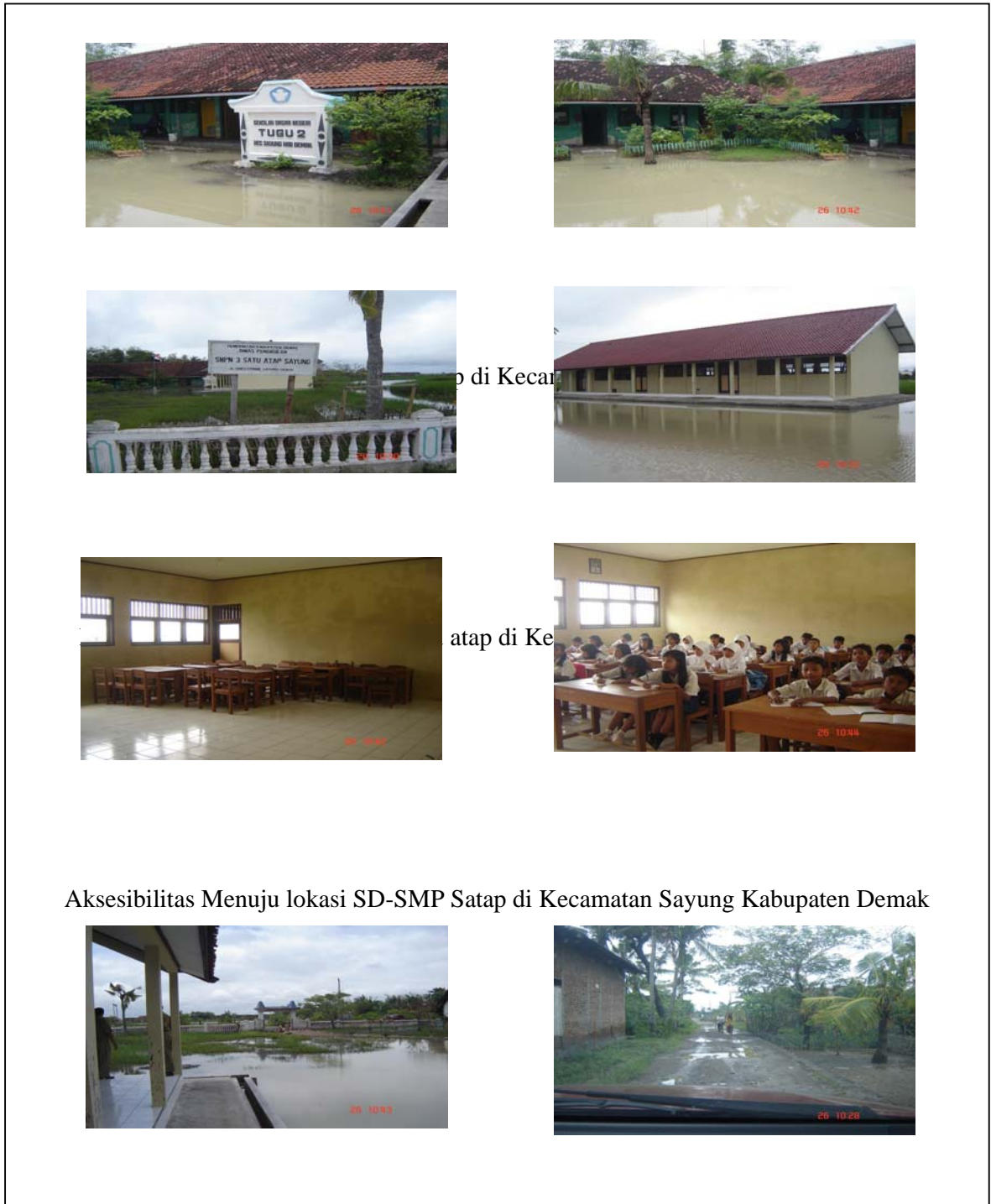
Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang

memadai. Berdasarkan data dari Kantor Depdiknas Kabupaten Demak, pada tahun 2005 diketahui ada 574 Sekolah Dasar (SD), 55 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 41 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah guru berturut-turut 5.209 untuk SD, 1.538 untuk SLTP dan 1.119 untuk SLTA.

Jumlah guru dan murid diatas dapat dihitung rasio murid terhadap guru, dimana rasio murid terhadap guru untuk SD adalah 21,78 untuk SLTP 15,91, dan untuk SLTA 12,97. Ini berarti bahwa setiap guru SD harus menangani sedikitnya 22 orang, begitu juga untuk SLTP dan SLTA.

Sumber yang sama didapat jumlah anak putus sekolah (*drop-out*) selama tahun 2005 menurut tingkat pendidikan SD sebanyak 99 orang, SLTP 246 orang dan SLTA 34 orang, sehingga jumlah seluruhnya mencapai 379 orang.

Adapun sebagai gambaran kondisi SD-SMP satu atap di SD Tugu 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :



Aksesibilitas Menuju lokasi SD-SMP Satap di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Sumber : Dokumentasi peneliti,
2009

Gambar 3.1
Kondisi SD – SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
3.1.3.2 Fasilitas Transportasi

Jalan merupakan sarana dan prasarana transportasi yang vital dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah. Tersedianya sarana dan prasarana ini dapat dilihat data dari panjang jalan yang dilaporkan oleh Kantor Kimpraswil Kabupaten Demak, dimana pada tahun 2005 panjang jalan kabupaten tercatat 426,51 Km dan panjang jalan propinsi 54,00 Km.

Menurut jenis permukaannya, jalan Kabupaten yang diaspal sepanjang 365,250 Km, berupa kerikil 46,06 Km dan masih berupa tanah 15,20 Km. Untuk jalan propinsi seluruhnya sudah diaspal. Sementara menurut kondisinya, untuk jalan Kabupaten 73,240 Km dalam kondisi baik, 180,735 Km dalam kondisi sedang, kondisi rusak 137,885 Km dan rusak berat 34,650 Km. Sementara untuk jalan propinsi 41,00 dalam kondisi baik dan 13,00 dalam kondisi sedang.

Pada tahun 2005 kendaraan bermotor yang diuji berdasarkan ketentuan wajib bayar dan bebas biaya di Kabupaten Demak tercatat 8.062 kendaraan, dengan rincian wajib bayar 8.062 kendaraan dan biaya 0 kendaraan. Sejumlah kendaraan bermotor yang diuji tersebut, sebagian besar berupa truk sebanyak 3.488 buah atau sekitar 43,26% dari total kendaraan bermotor yang diuji. Diikuti kemudian oleh *pick-up* sebanyak 2.283 buah (28,32%), bus 1.668 buah (20,69%) dan mobil sumbu III 541 buah (6,71%).

Angka-angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2004 jumlah kendaraan yang diuji hanya berjumlah 6.747 kendaraan. Jadi pada tahun 2005 ada kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diuji 19,49%.

3.2 Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Profil Kabupaten Demak Tahun 2005, kinerja pendidikan dasar dilihat dari sudut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi internal pendidikan berdasarkan jenjang SD, SMP dan SM.

3.2.1 Pemerataan Pendidikan

Berdasarkan profil Kabupaten Demak Tahun 2005, APK (Angka Partisipasi Kasar) tertinggi terdapat pada tingkat SD dan MI yaitu sebesar 98,51%, sedangkan terendah terdapat pada tingkat SM dan MA yaitu 32,48%. Tingginya APK pada SM dan MA karena banyaknya siswa di luar usia sekolah yang berada pada jenjang tersebut.

Gender juga merupakan masalah karena berdasarkan data per jenis kelamin memperlihatkan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari APK pada tingkat SD+MI, SMP+MTS dan SM+MA, masih menunjukkan bahwa perempuan lebih sedikit yang mengenyam pendidikan.

Tingkat SD+MI menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMP+MTs dan SM+MA. Berdasarkan kenyataan memperlihatkan bahwa perbedaan kinerja berdasarkan APK memperlihatkan masih terjadi kesenjangan antara pendidikan SD dan SMP sehingga berdampak pada angka yang melanjutkan ke jenjang SMP.

TABEL III.2
INDIKATOR PEMERATAAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2004/2005

NO.	Indikator	SD+MI	SMP+MTs	SM+MA
1.	APK	98,51	80,76	32,48
	Laki-laki	102,76	80,96	33,07
	Perempuan	94,25	77,93	31,74
2.	APM	88,78	64,78	24,20
3.	Perbandingan	0,22	0,49	
4.	Rasio			
	a. Sekolah	203	374	300
	b. Kelas	31	43	39
	c. Guru	26	15	12
	d. Ruang Kelas	1,07	0,83	0,98
	e. Kelas/Guru	0,86	0,35	0,31
5.	Angka	88,34	47,07	-
6.	Tingkat Pelayanan	187	103	179
7.	Kepadatan	154 Km2	79Km2	38Km2

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2005

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat APM tertinggi terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 88,78 % dan yang terendah di tingkat SM+MA yaitu 24,20%. Berdasarkan APM dapat diketahui tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat pada tingkat SD+MI. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Wajar akan menemui kendala karena kinerja SM+MA lebih buruk dibandingkan SD+MI.

Kenyataan menunjukkan bahwa semakin tinggi sekolah maka semakin kurang jumlah sekolahnya. Terlihat perbandingan SD dan SMP sebesar 0,22%, perbandingan tingkat SM dengan tingkat SMP sebesar 0,49%. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi wajib belajar dengan asumsi jumlah kebutuhan SMP sama dengan SD maka jumlah SMP masih kurang.

Indikator berikutnya bicara mengenai rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa terpadat terpadat terpadat di tingkat SMP+ MTs dengan angka 374 dan terjarang terpadat di tingkat SD+ MI dengan angka 203. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen.

Keheterogenan sekolah juga terlihat dan adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, C dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan harusnya di isi dengan 40 anak, pada kenyataannya bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat terpadat di tingkat SMP/MTs yaitu 43 dan terjarang di tingkat SD/MI sebesar 31.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terpadat pada tingkat SD+MI yaitu 26 dan terendah terpadat pada SM+MA yaitu 12. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 1,07. Hal ini menunjukkan pada tingkat itu masih membutuhkan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan kebutuhan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya pada tingkat SMP+ MTs dan SM+ MA rasionya masih di bawah satu.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 88,34%. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 47,07 dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab

rendahnya angka melanjutkan karena sekolah tingkat SM lebih kecil jumlahnya dari tingkat SMP.

Rendahnya jumlah sekolah di jenjang lebih tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD pelayanan lebih besar yaitu 187 jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau SM. Hal ini karena pada tingkat SD telah terjadi pemerataan dan wajib belajar 6 tahun telah berhasil. Sebaliknya, untuk tingkat SLTP dan tingkat SM, tingkat pelayanan sekolah belum merata diindikasikan pada TPS tingkat SMP sebesar 103 dan lebih besar di tingkat SM sebesar 179.

Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP, dan SM dikarenakan perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepada terbesar terdapat di tingkat SD+MI dan terkecil terdapat di tingkat SM. Banyaknya desa tertinggal juga mempengaruhi kinerja pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan indikator yang terdapat pada tabel 3 dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD+MI mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP+MTs dan tingkat SM+MA. Kinerja yang lebih unggul ini berdasarkan nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

BAB IV
ANALISIS KAJIAN PENENTUAN LOKASI GEDUNG
SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tahun 2008/2009, Depdiknas dalam hal ini Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan beberapa program alternatif untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada daerah-daerah APK yang rendah. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan APK tersebut salah satunya adalah dengan perluasan akses pendidikan. Adapun program alternatif yang dilaksanakan dalam mengatasi hal tersebut di atas, selain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang *over-capacity* adalah dengan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap di dekat lokasi anak (*the unreached*) di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar.

Perbandingan SD dan SMP di Kabupaten Demak sebesar 0,22%, perbandingan tingkat SM dengan tingkat SMP sebesar 0,49%. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi wajib belajar dengan asumsi jumlah kebutuhan SMP sama dengan SD maka jumlah SMP masih kurang. Daerah terpencil, terisolir, dan terpencar di Kabupaten Demak umumnya belum ada SMP, atau misalnya ada SMP, sekolah itu berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Karena jumlah lulusan SD di daerah tersebut pada umumnya relatif sedikit, maka pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dipandang tidak efisien. Dilain pihak daerah tersebut APK SMP masih rendah karena merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum

memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat. Salah satu cara pemberian kesempatan belajar yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP dengan tempat konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP tersebut tanpa membangun USB, yaitu dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap. Pengembangan SD-SMP Satu Atap ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada pada SD yang telah ada.

9. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak

Analisa ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Demak dideskripsikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Kepala Sekolah Dasar. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil SD di daerah terpencil pada tiap kecamatan.

a. Ketersediaan Sarana Fisik Pendidikan SD dan SMP

Sarana dan prasana belajar memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan di sekolah. Analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, peneliti mengambil tiga indikator utama kebutuhan sarana prasarana paling mendasar dalam memilih lokasi yang layak yaitu ketersediaan sarana pendidikan SD dan SMP, luas lahan, daya tampung dan jumlah penduduk usia sekolah. Adapun jumlah sekolah SD dan SMP tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Ketersediaan Sarana Pendidikan SD dan SMP Desa Terpencil di Kabupaten
Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah	
		SD	SMP
01.Sayung	SD Negeri Bedono	2	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	2	1
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	2	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	2	0
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	3	1
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	1	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	1	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	3	1
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	3	1
10.Wedung	SD Negeri Wedung	4	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	3	1
Jumlah		27	5

Sumber : Hasil Data Kepala Sekolah, 2008

Keputusan Menteri PU No.13/KPTS/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat, jenis sarana umum terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perbelanjaan dan niaga, sarana pemerintah dan umum, sarana rekreasi dan kebudayaan, serta sarana olah raga dan lapangan terbuka. Disebutkan bahwa sarana Pendidikan sebagai salah satu bagian dalam sarana umum.

Berdasarkan data diperoleh ketersediaan sarana pendidikan SD dan SMP di 11 Kecamatan menunjukkan terdapat 6 Kecamatan yang masih terdapat banyak SD tetapi belum ada SMP, diantaranya Kecamatan sayung, Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah 1 dan Kecamatan

Wedung, Jumlah SMP yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SD. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya Kecamatan memiliki 2 SD , yaitu di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah , Kecamatan Bonang dan Kecamatan Demak, 3 SD adalah Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kaaaranganyar dan Kecamatan Mijen, sedangkan yang terbanyak memiliki 4 SD adalah Kecamatan Wedung. Sehingga ketersediaan sarana pendidikan SD yang ada pada desa terpencil di tiap-tiap kecamatan melebihi jumlah sarana pendidikan SMP maka terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, untuk itu perlu penambahan SMP Seperti tercantum dalam Keputusan Menteri PU No.13/KPTS/1987 bahwa pendidikan untuk anak usia 13-15 tahun (SMP) sebagai berikut :

1. Minimum terdiri dari 6 ruang kelas, yang masing-masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain
2. Pencapaian maksimum adalah 3000 meter
3. Kelompok penduduk pendukung 4800 jiwa

Adapun daya tampung sarana pendidikan SD dan SMP daaapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.4
Daya Tampung Sarana pendidikan SD dan SMP Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama sekolah	Daya tampung SD	Daya tampung SMP
01.Sayung	SD Negeri Bedono	200	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	240	240
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	280	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	240	0

Kecamatan	Nama sekolah	Daya tampung SD	Daya tampung SMP
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	240	240
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	280	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	240	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	240	240
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	240	240
10.Wedung	SD Negeri Wedung	360	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	240	240
Jumlah		2800	1200
Rata-rata		255	110

Sumber : Hasil Data Kepala Sekolah, 2008

Daya tampung sarana pendidikan sekolah di daerah terpencil menunjukkan rata-rata kemampuan Sekolah dasar dalam menampung jumlah siswa sebesar 255 siswa. Jumlah siswa tersebut jika terbagi dalam 6 kelas maka setiap kelas terdiri dari maksimal berjumlah 43 siswa dan SMP sebesar 110 siswa terbagi dalam kelas setiap kelasnya hanya 19 siswa sehingga dibutuhkan sarana pendidikan SMP yang mampu menampung siswa dari SD sekitar 255 siswa 6 ruang per ruang 40 siswa. Untuk dapat dikembangkan SD-SMP Satu Atap maka setiap sekolah harus dibangun ruangan yang mampu menampung kurang lebih siswa dalam 6 kelas. Jika asumsi setiap kelas maksimal 40 siswa yang memiliki daya tampung untuk siswa sebanyak 240.

Pembangunan gedung baru dapat dilakukan jika ketersediaan lahan di setiap sekolah memadai. Standar minimal luas lahan yang harus dimiliki oleh sekolah untuk dapat dikembangkan SD-SMP Satu Atap adalah 2500m². Adapun ketersediaan lahan SD di daerah terpencil dapat dilihat pada tabel IV.5:

Tabel IV.5
Ketersediaan Lahan SD Di Tiap Kecamatan pada Daerah Terpencil di Kabupaten
Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama sekolah	Ukuran luas tanah	Kondisi bangunan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
01.Sayung	SD Negeri Bedono	1600m ²	336m ²	0	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	1350m ²	336m ²	0	0
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	1500m ²	336m ²	0	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	1100m ²	336m ²	0	0
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	1500m ²	336m ²	0	0
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	2500m ²	336m ²	0	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	1480m ²	336m ²	0	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	1050m ²	336m ²	0	0
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	950m ²	336m ²	0	0
10.Wedung	SD Negeri Wedung	2500m ²	504m ²	0	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	1650m ²	336m ²	0	0
Jumlah		16680 m ²	3864m ²	0	0

Sumber : Hasil Data Kepala Sekolah, 2008

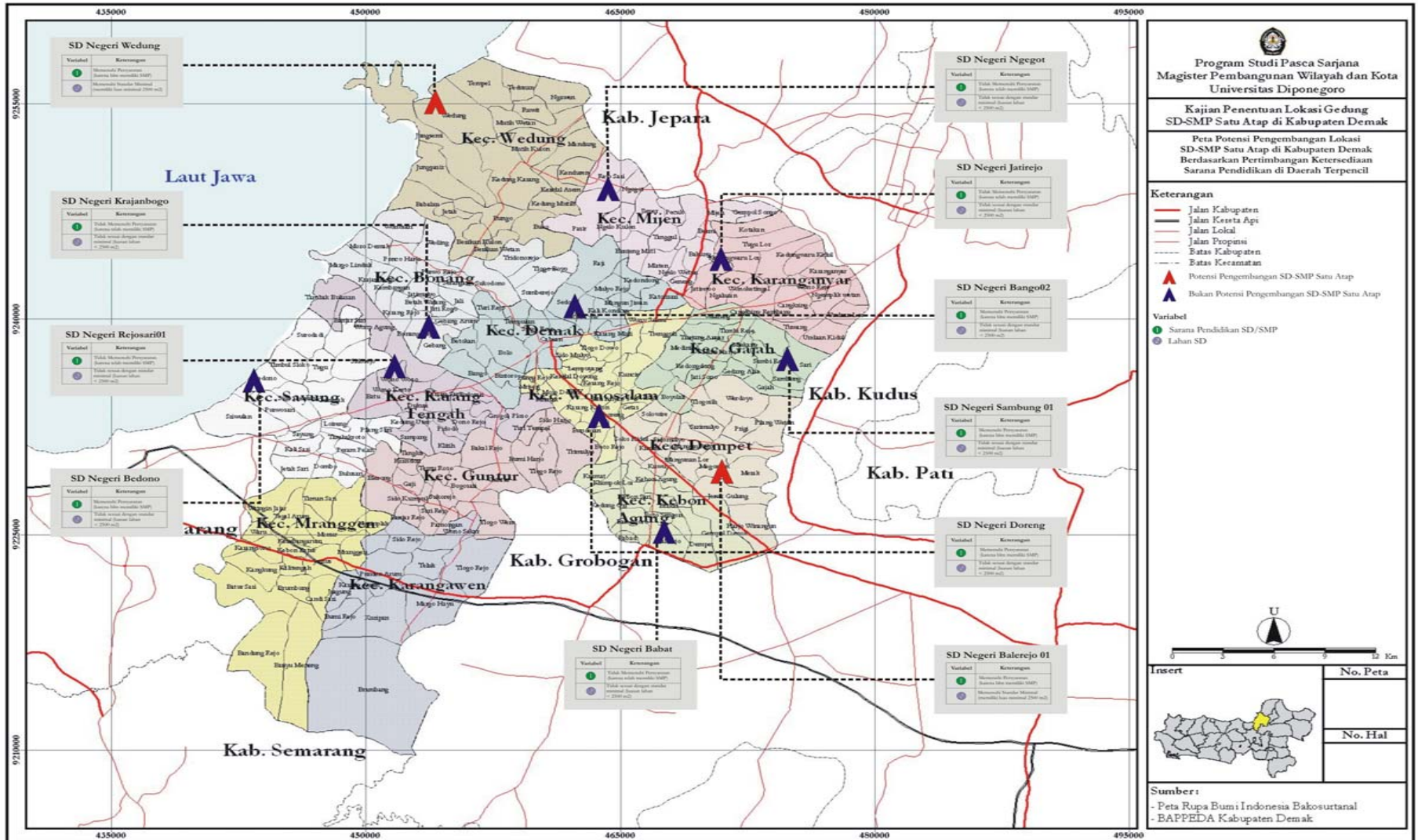
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua daerah memiliki bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah meskipun ukuran atau luasnya bervariasi dan tidak semuanya memenuhi standart luas bangunan untuk sekolah Satu Atap, akan tetapi lokasi daerah terpencil masih sangat memungkinkan untuk perluasan lahan karena harga tanah relatif murah dan ketersediaan lahan di daerah ini juga masih cukup luas.

Ketersediaan lahan seluas 2500 m² merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk dapat didirikan SD-SMP Satu Atap. Data penelitian menunjukkan hanya 2 daerah yang memiliki luas lahan yang sesuai standar minimal untuk dapat

didirikan SD-SMP Satu Atap yaitu Kecamatan Dempet (SD Negeri Balerejo 01) dan Kecamatan Wedung (SD Negeri Wedung).

Penentuan luas lahan dengan standar minimal 2500 m² ditetapkan karena Sekolah Dasar yang akan dijadikan Satu Atap dengan SMP akan dibangun lagi beberapa ruangan seandainya masih diperlukan seperti ruang belajar sebanyak 3 ruang, asrama guru sebanyak 4 ruang dan ruang kantor. Pembangunan ruangan baru disesuaikan dengan kondisi ruang kelas SD yang ada pada saat ini dan jumlah siswa yang akan ditampung. Apabila kondisi ruang kelas SD yang ada memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana belajar SD-SMP Satu Atap dan jumlah siswa SMP relatif sedikit, maka pembangunan ruang kelas baru relatif kurang diperlukan (Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap).

Mutu pendidikan dipengaruhi jumlah alokasi anggaran yang diberikan langsung pada unit-unit pendidikan sebagai faktor penunjang pendidikan, seperti pembangunan/rehabilitasi sekolah, buku-buku pelajaran, dan sarana pendidikan lain. Ditengah rendahnya komitmen terhadap anggaran, pemerintah memang berusaha menyiasati dengan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS). Kebijakan tersebut hendaknya tidak hanya dapat disalurkan untuk fasilitas sekolah berupa buku atau perlengkapan lain, akan tetapi pembangunan ruang kelas baru atau sekolah baru di daerah terpencil hendaknya dapat menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah daerah setempat.



b. Kebutuhan sarana pendidikan

Kebutuhan sarana pendidikan dalam penelitian ini akan diidentifikasi dari jumlah penduduk usia sekolah, jumlah anak usia sekolah menengah (13-15 Thn) dan jumlah lulusan SD. Adapun keadaan penduduk daerah terpencil sebagai berikut :

Tabel IV.6
Penduduk Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	Jumlah penduduk keseluruhan	Usia 13-15 Thn (Jiwa)	Jumlah lulusan
01. Sayung	Bedono	4883	174	44
02. Karangtengah	Rejosari	3460	125	40
03. Bonang	Krajanbogo	4838	162	53
04. Demak	Bango	4820	205	59
05. Wonosalam	Doreng	1188	268	44
06. Dempet	Balerejo	1556	249	49
07. Gajah	Sambung	4837	115	24
08. Karanganyar	Jatirejo	1375	162	20
09. Mijen	Ngegot	1474	194	43
10. Wedung	Wedung	4922	269	46
11. Kebonagung	Babat	1598	179	36
Jumlah		310253	2102	458

Sumber : Hasil Data Kepala Desa, 2008

Penduduk sebagai masyarakat pengguna sarana pendidikan sehingga perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan diri dan lingkungannya diantaranya sarana pendidikan dalam kelompok penduduk minimal 4800 jiwa harus berdiri 1 pelayanan sarana pendidikan SMP, dari tabel diatas terlihat 5 SD Desa terpencil yang penduduknya melebihi 4800 diantaranya

desa Bedono, desa Krajanbogo, desa Bango, desa Sambung dan desa Wedung sehingga perlu ada 1 pelayanan sarana pendidikan 1 SMP.

Penduduk usia sekolah di Kecamatan Dempet merupakan jumlah terbanyak yaitu 1491 orang sedangkan penduduk usia sekolah yang paling kecil dari 11 kecamatan yaitu di Kecamatan Gajah. Banyaknya penduduk usia sekolah pada sebuah daerah hendaknya mendapat perhatian serius oleh dinas pendidikan setempat dan pemerintah khususnya menyangkut jumlah sekolah yang proporsional dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada sehingga kebutuhan dalam bidang pendidikan daerah tersebut dapat terpenuhi artinya siswa tidak perlu ke luar daerah untuk dapat bersekolah karena hal ini akan menambah biaya transportasi yang harus mereka keluarkan.

Berdasarkan lulusan sekolah dasar di daerah terpencil pada tahun 2007 cukup tinggi. Tingginya angka lulusan siswa sekolah dasar tersebut belum sepenuhnya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan sekolah lanjutan di daerah terpencil hendaknya dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Demak. Jika hal ini tidak segera diatasi maka tujuan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar kelihatannya akan semakin jauh dari harapan.

Untuk dapat menentukan wilayah potensi lokasi pendirian SD-SMP Satu maka syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa wilayah tersebut harus memenuhi standar minimal sarana prasarana sekolah. Untuk wilayah yang memenuhi standar minimal maka akan diberikan skor 1 (satu) sedangkan yang tidak memenuhi standar minimal akan diberi nilai 0 (nol). Berdasarkan syarat-syarat ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan maka daerah yang memiliki potensi untuk didirikan SD-SMP Satu Atap dengan memperhatikan faktor ketersediaan sarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 7
Potensi Lokasi Pendirian SD-SMP Satu Atap Dengan Pertimbangan Ketersediaan Sarana Pendidikan Di Daerah Terpencil

No	Variabel	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	SD 10	SD 11
1	Sarana SD dan SMP	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
2	Daya Tampung *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lahan SD	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
4	Penduduk *)	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
Jumlah		2	0	1	2	1	3	2	0	0	4	0

Keterangan :

SD 1 : SD Negeri Bedono Kecamatan Sayung

SD 2 : SD Negeri Rejosari 01 Kecamatan Karangtengah

SD 3 : SD Negeri Krajanbogo Kecamatan Bonang

SD 4 : SD Negeri Bango 02 Kecamatan Demak

SD 5 : SD Negeri Doreng Kecamatan Wonosalam

SD 6 : SD Negeri Balerejo 01 Kecamatan Dempet

SD 7 : SD Negeri Sambung 01 Kecamatan Gajah

SD 8 : SD Negeri Jatirejo Kecamatan Karanganyar

SD 9 : SD Negeri Ngegot Kecamatan Mijen

SD 10 : SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung

SD 11 : SD Negeri Babat Kecamatan Kebonagung

*) : tidak ada standar minimal

0 : tidak sesuai standar

1 : sesuai standar minimal

2 : sesuai standar minimal

Berdasarkan data ketersediaan sarana pendidikan daerah terpencil pada tiap Kecamatan maka daerah yang memiliki potensi sebagai lokasi SD-SMP Satu Atap berdasarkan data yang ada bahwa ketersediaan pelayanan sarana SD

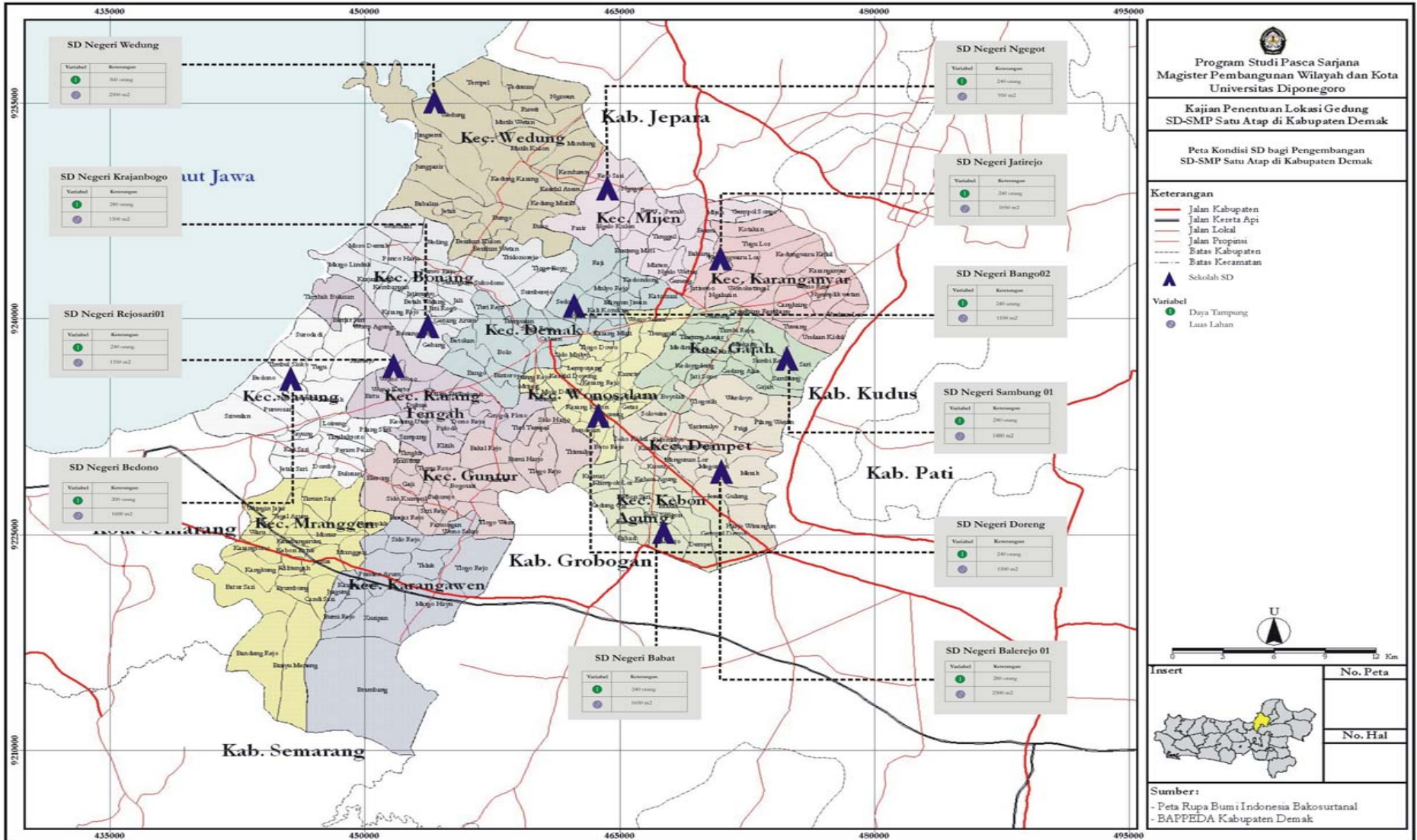
jumlahnya lebih banyak dibanding sarana SMP, terdapat 5 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 4800 jiwa, jumlah SMP yang ada lebih sedikit dibanding jumlah SMP yang tidak mampu menampung sejumlah lulusan SD yang ada sehingga perlu didirikan 1 unit SMP, dan hanya ada 2 Kec yang memiliki standar minimal luas lahan 2500 m² yaitu SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung dan SD Negeri Balerejo Kecamatan Dempet. Memenuhi standar minimal sarana prasarana pendidikan untuk didirikan SD-SMP Satu Atap. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri PU No. 13/KPTS/1987. disebutkan bahwa Sarana Pendidikan sebagai salah satu bagian dalam sarana umum, mempunyai peran tersendiri dan akan diangkat sebagai fokus utama penelitian ini. Untuk sarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang digunakan untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) :

- Minimum terdiri dari 6 ruang kelas, yang masing-masing dapat menampung murid sebanyak 40 orang dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain
- Luas Tanah min: 1500 m²
- Pencapaian Maksimum 3000 m
- Kelompok penduduk pendukung 4800 jiwa

Peningkatan kualitas pendidikan selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Namun sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Kabupaten Demak masih kurang memadai. Berdasarkan deskripsi data pada variabel ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Demak menggambarkan

bahwa dua daerah terpencil yaitu SD Negeri Balerejo 01 Kecamatan Dempet dan SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung

Adapun peta hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan adalah sbb :



10. Analisis Karakteristik Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Demak

Analisis karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan penting dilakukan sebagai dasar utama sebelum melakukan analisis lain, dengan tujuan utama mengetahui karakteristik penduduk pengguna sarana pendidikan menengah di Kabupaten Demak.

1. Karakteristik Orangtua Siswa

Penduduk mempunyai peran utama sebagai pengguna atau konsumen dari sarana pendidikan. Dalam analisa ini data yang dianalisa meliputi jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, jumlah pengeluaran, pendidikan formal terakhir dan tingkat partisipasi pendidikan di daerah terpencil Tahun 2008.

Tabel IV.8
Jenis Pekerjaan Masyarakat Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	Pegawai	Wiraswasta	Buruh/Tani
01. Sayung	Bedono	2	6	28
02.Karangtengah	Rejosari	1	2	27
03.Bonang	Krajanbogo	1	3	36
04.Demak	Bango	14	2	42
05.Wonosalam	Doreng	8	10	20
06.Dempet	Balerejo	4	10	16
07.Gajah	Sambung	2	3	42
08.Karanganyar	Jatirejo	2	4	14
09.Mijen	Ngegot	0	8	32
10.Wedung	Wedung	1	1	34
11.Kebonagung	Babat	1	2	12
Jumlah		36	51	303

Sumber: Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di daerah terpencil berprofesi sebagai petani atau buruh sedangkan sebagian lagi wiraswasta. Masyarakat di daerah desa Tugu Kecamatan Sayung pada dasarnya memiliki profesi yang sama dengan masyarakat di desa-desa terpencil lainnya yang ada di Kabupaten Demak. Mereka sebagian besar memiliki profesi sebagai petani dan pedagang. Kondisi pertanian di daerah Kabupaten Demak sendiri saat ini sebagian besar masih tergantung dengan kondisi alam, hal menyebabkan penghasilan petani juga sangat tergantung dengan kondisi alam. Meskipun demikian hal yang terpenting adalah perhatian masyarakat khususnya daerah terpencil dalam dunia pendidikan.

Masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan akan memberikan harapan bagi anak-anaknya untuk hidup lebih layak dan dengan harapan dapat bersaing dengan anak-anak lain di perkotaan. Kondisi ini tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan jika masyarakat di daerah terpencil tidak mendapat perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah setempat. Hasil pertanian yang tidak menentu karena masih sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan penghasilan masyarakat di daerah terpencil juga tidak menentu. Berikut ini adalah jumlah penghasilan rata-rata masyarakat di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Demak :

Tabel IV.9
Jumlah Penghasilan Masyarakat Daerah Terpencil di
Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	<Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-s/d Rp. 1.000.000,-	>Rp. 1.000.000,-	Jumlah
01. Sayung	Bedono	26	9	1	36
02. Karangtengah	Rejosari	25	4	1	30
03. Bonang	Krajanbogo	34	3	3	40
04. Demak	Bango	49	7	2	58
05. Wonosalam	Doreng	29	8	1	38
06. Dempet	Balerejo	24	2	4	30
07. Gajah	Sambung	40	4	3	47
08. Karanganyar	Jatirejo	17	3	0	20
09. Mijen	Ngegot	30	9	1	40
10. Wedung	Wedung	30	5	1	36
11. Kebonagung	Babat	9	1	5	15
Jumlah		313	55	22	390
Persentase		80.26%	14.10%	5.64%	100.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Profesi masyarakat desa terpencil yang sebagian besar adalah petani mengakibatkan pendapatan yang mereka terima tergantung dengan hasil panen setiap 3-4 bulan sekali. Berdasarkan data diatas maka beberapa lokasi yang memiliki jumlah penghasilan orangtua yang relatif kecil (< Rp. 500.000,-) diantaranya desa Sambung Kecamatan Gajah, desa Krajanbogo Kecamatan Bonang, desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar, desa Bango Kecamatan Demak, desa Wedung Kecamatan Wedung dan desa Rejosari kecamatan Karangtengah.

Tabel IV.10
Jumlah Pengeluaran Masyarakat Daerah Terpencil di
Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	<Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-s/d Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-s/d Rp.1.500.000,-	>Rp. 2.000.000,-
01. Sayung	Bedono	30	4	2	0
02.Karangtengah	Rejosari	22	4	3	0
03.Bonang	Krajanbogo	29	4	4	0
04.Demak	Bango	36	6	8	0
05.Wonosalam	Doreng	29	8	4	0
06.Dempet	Balerejo	22	4	4	0
07.Gajah	Sambung	33	6	6	0
08.Karanganyar	Jatirejo	8	5	5	0
09.Mijen	Ngegot	32	9	2	0
10.Wedung	Wedung	26	6	3	0
11.Kebonagung	Babat	7	3	3	0
Jumlah		283	63	44	0
Persentase		72.56%	16.16%	11.28%	0.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan bagi masyarakat di daerah terpencil mengakibatkan redahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan hendaknya dapat sejalan dengan kebijakan dalam bidang pendidikan. Menyelesaikan masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai langsung hanyalah kebijakan sepotong-potong jika tidak diimbangi dengan kebijakan dalam bidang pendidikan.

Tabel IV.11
Pendidikan Formal Terakhir Orangtua Siswa di
Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	Tidak tamat SD	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
01. Sayung	Bedono	0	21	8	7	0	36
02. Karangtengah	Rejosari	0	19	3	8	0	30
03. Bonang	Krajanbogo	0	16	8	15	1	40
04. Demak	Bango	0	39	9	10	0	58
05. Wonosalam	Doreng	0	29	2	7	0	38
06. Dempet	Balerejo	0	23	3	4	0	30
07. Gajah	Sambung	0	33	4	9	1	47
08. Karanganyar	Jatirejo	0	16	2	2	0	20
09. Mijen	Ngegot	0	26	6	8	0	40
10. Wedung	Wedung	0	24	4	8	0	36
11. Kebonagung	Babat	0	12	3	0	0	15
Jumlah		0	258	52	78	2	390
Persentase		0.00%	66.15%	13.33%	20.00%	0.51 %	100.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Kesadaran orangtua dalam bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sebagian besar masyarakat daerah terpencil di Kabupaten Demak lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Untuk kategori masyarakat terpencil hal tersebut cukup memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakatnya dalam bidang pendidikan. Kecenderungan masyarakat sudah memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu masyarakat di daerah terpencil sangat berharap agar pemerataan pendidikan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Kebijakan dalam anggaran

pendidikan tidak hanya digunakan untuk melengkapi fasilitas akan tetapi alokasi pendirian sekolah baru hendaknya juga mendapat perhatian serius.

Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah kondisi orangtua. Selain kemampuan orangtua untuk membiayai anak-anaknya bersekolah, hal lain yang sangat mendasar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah keinginan dan kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tanpa adanya kesadaran dari orangtua siswa keberhasilan pemerataan pendidikan nampaknya semakin jauh dari harapan. Kesadaran orangtua sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.

2. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Suatu daerah dikatakan memiliki tingkat partisipasi tinggi jika semua lulusan dapat melanjutkan ke jenjang di atasnya. Berikut hasil penelitian mengenai tingkat angka partisipasi kasar pendidikan menengah :

Tabel IV.13
Angka Partisipasi Kasar (APK) Daerah Terpencil di
Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	Anak sekolah usia 13-15	Usia 13 – 15 (jiwa)	APK
01.Sayung	Bedono	88	174	50.57%
02.Karangtengah	Rejosari	80	125	64.00%
03.Bonang	Krajanbogo	42	162	25.93%
04.Demak	Bango	177	205	86.34%
05.Wonosalam	Doreng	126	268	47.01%
06.Dempet	Balerejo	49	249	19.68%
07.Gajah	Sambung	24	115	20.87%
08.Karanganyar	Jatirejo	54	162	33.33%

Kecamatan	Desa	Anak sekolah usia 13-15	Usia 13 – 15 (jiwa)	APK
09.Mijen	Ngegot	129	194	66.49%
10.Wedung	Wedung	36	269	13.38%
11.Kebonagung	Babat	105	179	58.66%
Jumlah		910	2102	-
Tertinggi		177	269	86.34%
Terendah		24	115	13.38%
Rata – rata		81,72	191,09	44,21%

Sumber : Hasil Data Kepala Desa, 2008

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pendirian SD-SMP Satu Atap hendaknya didirikan pada daerah dengan angka partisipasi kasar yang tinggi. Angka partisipasi kasar diatas menunjukkan jumlah anak usia sekolah di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Demak.

Pada saat dicanangkan tahun 1994 program wajib belajar pendidikan dasar sebilan tahun ditargetkan tuntas pada tahun 2003/2004 dengan tolok ukur APK SMP mencapai minimal 90%. Namun akibat krisisi ekonomi yang terjadi target tersebut tidak dapat tercapai bahkan terus terjadi penurunan APK. Oleh sebab itu standar APK untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap ditentukan minimal sebesar 90%.

Pada umumnya di aderah terpencil, belum didirikan SMP atau SMP yang sudah ada jauh dari jangkauan lulusan SD setempat karena jumlah SD di daerah

tersebut pada umumnya relatif sedikit maka pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dipandang tidak efisien. Dilain pihak daerah tersebut APK SMP masih rendah dan merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat.

Berdasarkan data APK diatas nampak bahwa rata – rata angka partisipasi kasar daerah terpencil sebesar 44,21% jiwa. Angka tersebut berarti bahwa sebanyak 41,21% anak usia sekolah menengah yang mampu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah sedangkan sebanyak 55,79% tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Daerah terpencil dengan APK paling terkecil adalah daerah Kecamatan Wedung, Dempet dan Gajah.

Indikator lain yang sangat penting dalam mendirikan SD-SMP Satu Atap adalah tingginya angka putus sekolah (APS) di daerah tersebut. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi tingginya anak putus sekolah diantaranya faktor ekonomi orangtua atau kurangnya motivasi anak untuk bersekolah karena lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa. jumlah angka putus sekolah daerah terpencil di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.14
Jumlah Angka Putus Sekolah (APS) Daerah Terpencil di
Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama Sekolah	Tidak melanjutkan
01.Sayung	SD Negeri Bedono	0%
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	0%
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	76.19%
04.Demak	SD Negeri Bango 02	0%
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	0.015%
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	0%

Kecamatan	Nama Sekolah	Tidak melanjutkan
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	0%
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	0.037%
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	0%
10.Wedung	SD Negeri Wedung	77.77%
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	0.01%
Tertinggi		77.77%
Terendah		0%
Rata-rata		14.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan, 2008

Buku Panduan pedoman pengembangan SD-SMP Satu Atap (2006: 4) mengungkapkan bahwa salah satu Kriteria Calon SD-SMP Satu Atap adalah lulusan SD di daerah tersebut sebagian besar tidak melanjutkan (60% tidak melanjutkan, dan maksimal 40 anak). Berdasarkan data diatas maka beberapa lokasi yang memiliki angka putus sekolah sesuai dengan standar Pengembangan SD-SMP Satu Atap adalah SD Negeri Krajanbogo Kecamatan Bonang dan SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung dengan APS lebih dari 60%..

Salah satu tujuan analisa kependudukan adalah memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan (Rusli, 1988 : 77). Undang-undang No.3 Tahun 1972 menyatakan bahwa distribusi penduduk memiliki tujuan untuk peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh wilayah, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, serta, memperluas pertahanan dan keamanan nasional. Untuk itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan bidang pendidikan dapat dilakukan dengan mendirikan SD-SMP Satu Atap.

Berdasarkan Jumlah Warga Terdidik Calon Tenaga Kependidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Jumlah Angka Putus Sekolah (APS) maka daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan SD-SMP Satu Atap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 15
Potensi Lokasi Pendirian SD-SMP Satu Atap Dengan Pertimbangan Karakteristik Penduduk Terhadap Partisipasi pendidikan di Kabupaten Demak

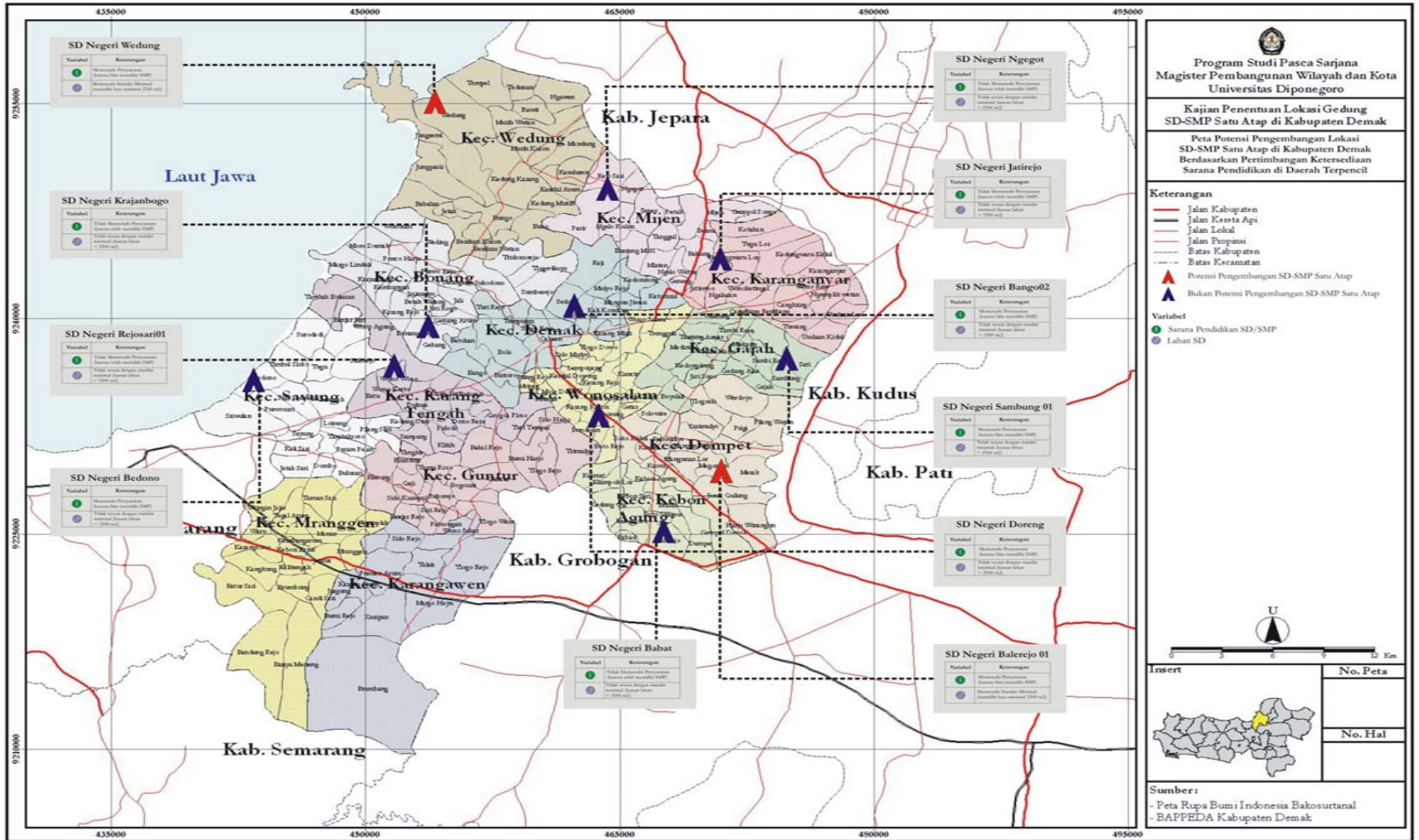
No	Variabel	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	SD 10	SD 11
2	Angka Partisipasi Kasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Angka Putus Sekolah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah		1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1

Keterangan :

- SD 1 : SD Negeri Bedono Kecamatan Sayung
- SD 2 : SD Negeri Rejosari 01 Kecamatan Karangtengah
- SD 3 : SD Negeri Krajanbogo Kecamatan Bonang
- SD 4 : SD Negeri Bango 02 Kecamatan Demak
- SD 5 : SD Negeri Doreng Kecamatan Wonosalam
- SD 6 : SD Negeri Balerejo 01 Kecamatan Dempet
- SD 7 : SD Negeri Sambung 01 Kecamatan Gajah
- SD 8 : SD Negeri Jatirejo Kecamatan Karanganyar
- SD 9 : SD Negeri Ngegot Kecamatan Mijen
- SD 10 : SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung
- SD 11 : SD Negeri Babat Kecamatan Kebonagung

Pada dasarnya semua daerah terpencil dengan angka partisipasi kasar yang rendah (<90%) dan angka putus sekolah yang tinggi (60%) memiliki kesempatan untuk dikembangkan SD-SMP Satu Atap. Namun demikian untuk mengembangkan SD-SMP Satu Atap tidak hanya mempertimbangkan dua indikator ini saja melainkan harus mempertimbangkan faktor lain. Berdasarkan data partisipasi pendidikan daerah terpencil maka wilayah yang memiliki potensi untuk didikan SD-SMP Satu Atap berada di SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung., Angka Partisipasi Kasar dan Angka Putus Sekolah sesuai dengan

standar minimal yang ada. Desa Wedung Kecamatan Wedung belum didirikan SMP sedangkan jarak menuju lokasi SMP yang ada di sekitar daerah terpencil sangat jauh dari tempat tinggal siswa sehingga SD-SMP Satu Atap dapat dikembangkan di daerah ini. Adapun peta hasil analisis karakteristik adalah sebagai berikut :



11. Analisis Aksesibilitas Penduduk Terhadap Pelayanan Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak

Analisa aksesibilitas pendudukan terhadap pelayanan sarana pendidikan menengah di Kabupaten Demak dalam penelitian ini dideskripsikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kepala keluarga. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengambil kepala keluarga di daerah terpencil pada tiap Kecamatan. Berbeda dengan analisis pada dua variabel sebelumnya, analisis dalam variabel ini dilakukan dengan metode deskriptif persentase. Sebelum diperoleh persentase tingkat kelayakan aksesibilitas layanan sarana pendidikan berikut ini deskripsi untuk tiap indikator aksesibilitas layanan pendidikan di Kabupaten Demak :

1. Aksesibilitas Sebaran Penduduk dan Layanan Sarana Pendidikan

Analisis aksesibilitas pendudukan terhadap kualitas pelayanan pendidikan dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan sepuluh indikator yaitu jarak rumah dengan sekolah, waktu tempuh ke sekolah, biaya transportasi ke sekolah, kondisi tanah di sekolah, keadaan daerah sekitar sekolah, kondisi jaringan jalan menuju sekolah, kondisi fisik jalan menuju sekolah pada musim hujan, alat transportasi yang biasa digunakan ke sekolah, keinginan menyekolahkan anaknya dan harapan terhadap SD-SMP Satu Atap ke depan.

Tabel IV.16
Jarak Rumah Dengan Sekolah Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama Sekolah	Jawaban Respoden		
		< 500 m	500-1.000 m	> 1.000 m
01.Sayung	SD Negeri Bedono	36	0	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	10	20	0
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	32	8	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	41	9	8
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	10	28	0
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	30	0	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	28	19	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	20	0	0
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	15	25	0
10.Wedung	SD Negeri Wedung	27	9	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	8	7	0
Jumlah		257	125	8
Persentase		65.90%	32.05%	2.05%

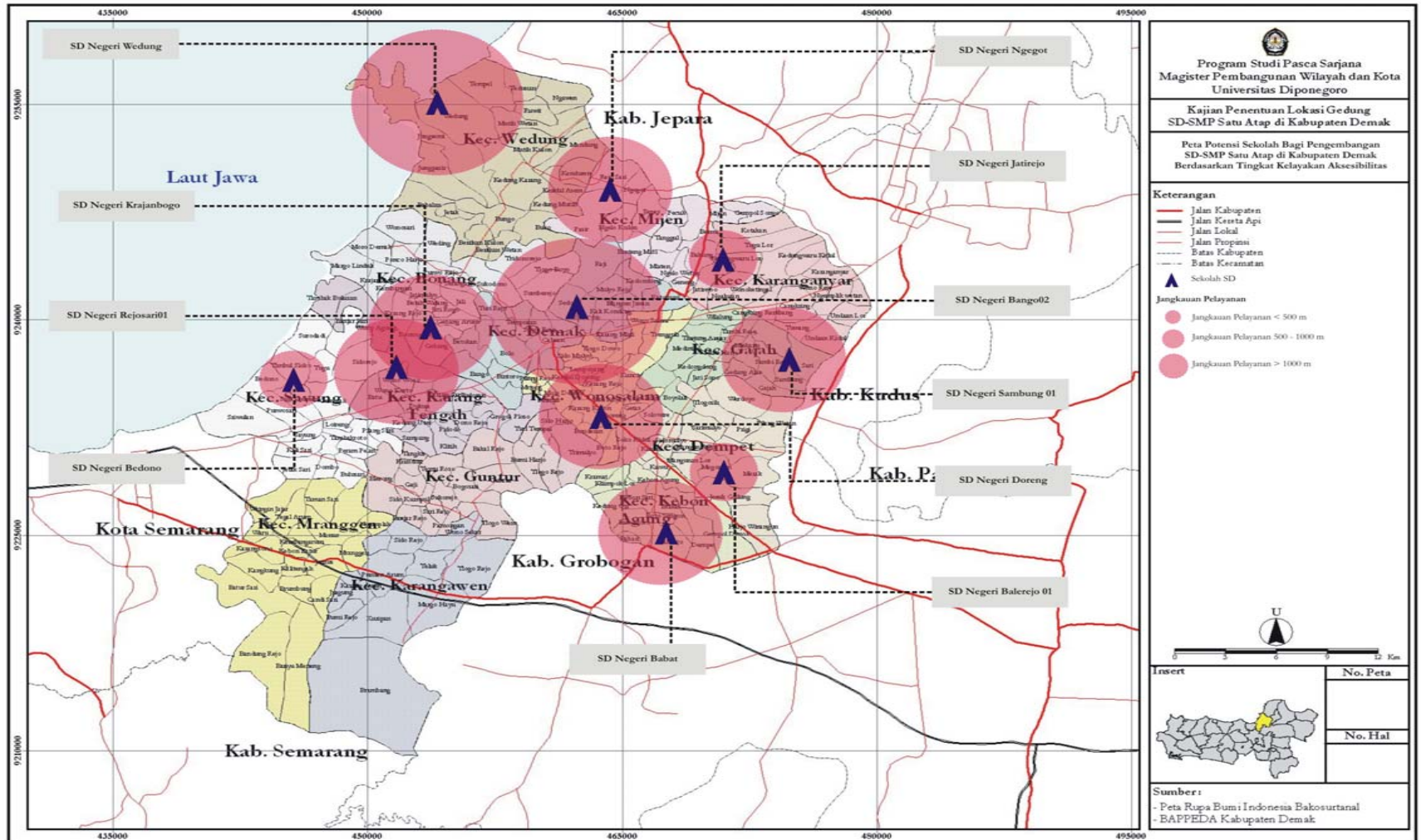
Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Salah satu alasan siswa tidak melanjutkan ke sekolah menengah adalah karena letak sekolah yang jauh dari rumah. Disamping biaya sekolah yang sudah mahal, jarak sekolah yang semakin jauh dari rumah akan menambah biaya yang harus dikeluarkan. Untuk

menentukan lokasi SD-SMP Satu Atap dibutuhkan lokasi sekolah yang strategis, artinya lokasi sekolah berada di daerah sekitar pemukiman penduduk. Jarak antara rumah dan sekolah berperan penting bagi siswa, orang tua, dan guru. Jika jarak rumah ke sekolah jauh lalu siswa menjadi bermalas-malasan untuk pergi ke sekolah apalagi jika harus di tempuh dengan jalan kaki. Jika harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor atau naik angkutan maka orangtua akan mengeluarkan biaya tambahan setiap hari, kondisi ini cukup memberatkan apalagi bagi masyarakat di daerah terpencil. Sebagian besar orangtua kurang memperhitungkan jarak rumah dengan sekolah. Banyak dari mereka yang memasukan anaknya ke sekolah dengan alasan, sekolah favorit dan bagus sehingga jarak tempuh lupa diperhatikan. Padahal untuk ukuran anak SD atau SMP jarak sekolah yang terlalu jauh dari rumah bisa membuat anak lelah ketika sampai di sekolah sehingga mereka kurang berkonsentrasi pada materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006:78). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

Standar jarak Sekolah Dasar menurut Chapin dalam Jayadinata (1999:161) disebutkan jarak antara sekolah dasar dengan tempat tinggal siswa dapat ditempuh selama 30 sampai 45 menit dengan jalan kaki atau sekitar 3 km. Berdasarkan data diatas menunjukkan semua wilayah memenuhi standar jarak yang ditentukan oleh Chapin, sehingga semua wilayah dapat dikembangkan SD-SMP Satu Atap berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa. Berikut ini adalah peta hasil analisa lokasi yang memiliki potensi untuk didirikan SD-SMP Satu Atap atas dasar pertimbangan jarak rumah dengan sekolah :



Hal ini diperkuat dengan hasil temuan mengenai waktu tempuh ke sekolah.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan :

Tabel IV.17
Waktu Tempuh Ke Sekolah Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama Sekolah	Jawaban Respoden		
		< 15 menit	15 – 30 menit	> 30 menit
01.Sayung	SD Negeri Bedono	36	0	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	10	20	0
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	24	16	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	58	0	0
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	28	10	0
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	30	0	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	28	19	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	18	2	0
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	15	25	0
10. Wedung	SD Negeri Wedung	36	0	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	13	2	0
Jumlah		286	94	0
Persentase		76.92%	23.08%	0.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Permasalahan yang muncul di daerah perkotaan terutama kota metropolitan salah satunya kemacetan di jalan sehingga anak-anak sering terlambat masuk sekolah meskipun sebenarnya jarak antara rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh, sedangkan pada masyarakat daerah terpencil permasalahan yang diharapkan anak-anak sering terlambat masuk sekolah karena jarak antara rumah dengan sekolah yang jauh sehingga waktu tempuh yang lama apalagi di daerah ini kondisi yang belum di aspal. Seperti halnya pada pembahasan jarak antara rumah

dengan lokasi sekolah, penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap ditentukan berdasarkan waktu tempuh yang dibutuhkan siswa lebih cepat.

Jarak tempuh ke sekolah yang relatif jauh mengakibatkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan juga relatif tinggi. Kondisi ekonomi orangtua di daerah terpencil yang relatif rendah hal ini cukup membebani mereka apalagi ditambah permasalahan di daerah tersebut belum ada sarana angkutan umum yang memadai sehingga memaksa anak-anak untuk menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Namun hasil penelitian menunjukkan waktu tempuh yang dibutuhkan siswa untuk sampai ke sekolah hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit karena rata-rata jarak antara rumah dengan sekolah sejauh kurang dari 500 meter.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya standar jarak SD menurut Chapin dalam Jayadinata (1999:161) disebutkan sekolah dapat ditempuh oleh siswa selama 30 sampai 45 menit dengan jalan kaki sehingga data waktu tempuh memperkuat data standar jarak yang ada bahwa semua wilayah dapat dikembangkan SD-SMP Satu Atap dengan aksesibilitas yang memadai.

Adapun biaya transportasi yang dibutuhkan untuk ke sekolah sebagai berikut:

Tabel IV.18
Biaya Transportasi Ke Sekolah Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama Sekolah	Jawaban Respoden		
		< Rp. 500	Rp. 500 – Rp. 1.000	> Rp. 1.000
01.Sayung	SD Negeri Bedono	36	0	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	10	20	0

Kecamatan	Nama Sekolah	Jawaban Respoden		
		< Rp. 500	Rp. 500 – Rp. 1.000	> Rp. 1.000
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	24	16	0
04.Demak	SD Negeri Bango 02	25	33	0
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	19	19	0
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	20	10	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	28	19	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	20	0	0
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	15	25	0
10. Wedung	SD Negeri Wedung	33	3	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	10	5	0
Jumlah		237	153	0
Persentase		56.92%	43.08%	0.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Biaya merupakan masalah yang paling mendasar dan sering dijadikan alasan oleh orang tua siswa jika anaknya harus putus sekolah atau tidak melanjutkan lagi. Biaya yang harus dikeluarkan oleh orangtua untuk membiayai anak-anaknya memang tidak sedikit meskipun sekarang di beberapa daerah telah membebaskan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian permasalahan muncul kembali dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) mengakibatkan biaya transportasi menjadi naik. Padahal biaya ini harus dikeluarkan oleh orangtua setiap hari.

Menurut alfred Weber dalam Sirojuzilam (2006: 36) menjelaskan bahwa biaya transportasi merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan lokasi gedung. Untuk itu penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap harus mempertimbangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Lokasi dipilih dengan biaya yang paling murah, karena SD-SMP Satu Atap yang akan didirikan

di daerah terpencil dengan asumsi pendapatan masyarakat di daerah tersebut relatif kecil.

Terdapat tiga indikator yang memiliki hubungan saling mempengaruhi yaitu jarak antara rumah dengan sekolah, waktu tempuh ke sekolah dan biaya transportasi. Jarak yang jauh akan menyebabkan waktu tempuh lebih lama dan jika tidak memungkinkan dijangkau dengan jalan kaki maka akan membutuhkan biaya transportasi yang tinggi. Oleh sebab itu penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap harus mempertimbangkan ketiga indikator yang saling berhubungan tersebut. Pengembangan SD-SMP Satu Atap akan sangat membantu masyarakat di daerah terpencil dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, selain itu juga memudahkan akses siswa untuk ke sekolah. Jarak tempuh yang lebih dekat diharapkan akan berdampak positif terhadap konsentrasi belajar siswa, dengan semakin dekat jarak ke sekolah siswa tidak lagi kelelahan setibanya di sekolah sehingga dalam mengikuti pelajaran siswa lebih fokus dan lebih siap.

Tabel IV.19
Alat Transportasi Yang Biasa Digunakan Ke Sekolah Daerah Terpencil
di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Nama sekolah	Jawaban Responden			Jumlah
		Angkutan Umum	Sepeda	Jalan Kaki	
01.Sayung	SD Negeri Bedono	0	0	36	36
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	0	20	10	30
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	0	8	32	40
04.Demak	SD Negeri Bango 02	0	41	17	58
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	0	19	19	38

Kecamatan	Nama sekolah	Jawaban Responden			Jumlah
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	0	10	20	30
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	0	9	38	47
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	0	10	10	20
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	8	32	0	40
10.Wedung	SD Negeri Wedung	0	3	33	36
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	0	0	15	15
Jumlah		8	152	230	390
Persentase		2.05%	42.82%	55.13%	100.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Layak tidaknya setiap SD untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap harus mempertimbangkan kondisi transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar lokasi daerah terpencil dapat ditempuh dengan jalan kaki.

Di daerah terpencil perjalanan menuju sekolah lebih banyak ditempuh dengan naik sepeda atau jalan kaki meskipun jarak ke sekolah sangat jauh. Penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap juga harus mempertimbangkan alat transportasi yang biasa digunakan anak-anak ke sekolah.

Tujuan pengembangan program SD - SMP Satu Atap untuk mengatasi kendala yang dihadapi anak - anak lulusan sekolah dasar yang tinggal di daerah - daerah terpencil. Konsep pembangunan SD SMP Satu Atap ini adalah mendekatkan lembaga pendidikan SMP ke SD di daerah dengan kondisi geografis yang sulit atau terpencil, agar tamatan SD dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP.

Untuk tinjauan mengenai kesiapan kondisi tanah sebagai lokasi SD SMP

Satu Atap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.20
Kondisi Tanah Di Sekolah

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
01.Sayung	SD Negeri Bedono	35	1	0
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	30	0	0
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	16	20	4
04.Demak	SD Negeri Bango 02	15	29	15
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	32	6	0
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	30	0	0
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	39	8	0
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	16	3	1
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	28	12	0
10. Wedung	SD Negeri Wedung	36	0	0
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	9	6	0
Jumlah		286	70	19

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Datar dan tidak rawan longsor
- B : Datar agak dekat dengan lereng gunung
- C : Miring dan rawan longsor

Salah satu pertimbangan pendirian lokasi SD-SMP Satu Atap adalah kondisi tanah yang stabil atau tidak rawan longsor, hal ini terkait dengan perencanaan jangka panjang agar sekolah tidak terbebani renovasi gedung pada setiap tahunnya.

Berdasarkan data hasil penelitian beberapa wilayah di daerah terpencil relatif datar dan tidak rawan longsor sehingga jika dibangun gedung sekolah diharapkan dapat tahan lama. Longsor merupakan proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. Bangunan yang berada di atas tanah yang rawan longsor sering terjadi retak-retak sehingga bangunan cepat rusak.

Secara umum kondisi tekstur tanah wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dari sudut kemiringan tanah Kabupaten Demak rata-rata datar.

Selain kondisi tanah yang tidak rawan longsor, pertimbangan lain dalam menentukan lokasi sekolah adalah kemungkinan terjadi banjir di daerah tersebut. Berikut data keadaan lokasi sekolah di tiap Kecamatan :

Tabel IV.21
Keadaan lokasi Sekolah Dasar Desa Terpencil

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
01. Sayung	SD Negeri Bedono	7	25	4
02. Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	6	22	2
03. Bonang	SD Negeri Krajanbogo	11	29	0
04. Demak	SD Negeri Bango 02	32	25	1
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	25	11	2
06. Dempet	SD Negeri Balerejo 01	19	11	1
07. Gajah	SD Negeri Sambung 01	28	18	1
08. Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	9	11	1
09. Mijen	SD Negeri Ngegot	12	26	2
10. Wedung	SD Negeri Wedung	26	8	2

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
11. Kebonagung	SD Negeri Babat	5	10	0
Jumlah		179	195	16

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Tidak pernah banjir
 B : Kadang – kadang banjir
 C : Rawan banjir

Untuk mendirikan SD-SMP Satu Atap diperlukan daerah yang bebas dari banjir karena hal ini dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat prestasi siswa. Dimana pemilihan lokasi yang optimal merupakan langkah strategis, karena dengan lokasi optimal diharapkan dapat memaksimalkan jumlah siswa, membantu kontrol biaya operasional dan dapat menunjang prestasi siswa yang optimal. Dengan perencanaan penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekolah tersebut secara maksimal dalam mencerdaskan anak bangsa.

Tabel IV.22
Kondisi Jaringan Jalan Menuju Sekolah

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
01. Sayung	SD Negeri Bedono	6	30	0
02. Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	6	24	0
03. Bonang	SD Negeri Krajanbogo	12	27	1
04. Demak	SD Negeri Bango 02	15	44	0
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	11	27	0
06. Dempet	SD Negeri Balerejo 01	5	25	0

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
07. Gajah	SD Negeri Sambung 01	15	32	0
08. Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	3	17	0
09. Mijen	SD Negeri Ngegot	9	31	0
10. Wedung	SD Negeri Wedung	20	16	0
11. Kebonagung	SD Negeri Babat	3	12	0
Jumlah		105	284	1

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Layak dan tidak memerlukan perbaikan
 B : Layak di lewati tetapi memerlukan perbaikan
 C : Tidak layak untuk dilewati

Menentukan lokasi sangat terkait dengan daerah pelayanan yang menjadi target pelayanan. Kondisi jalan yang secara umum di Kabupaten Demak masih memerlukan perbaikan. Jika kondisi jaringan jalan tidak diperbaiki hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah. Untuk itu dalam penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap perlu mempertimbangkan kondisi fisik jalan sebagai sarana penunjang bagi siswa dalam menempuh pendidikan di sekolah satu atap tersebut.

Kondisi daerah terpencil di Kabupaten Demak sebagian besar belum di aspal sehingga kondisi jalan pada musim penghujan becek dan jika musim kemarau berdebu. Kendala yang sering dialami masyarakat dipedesaan adalah terhambatnya aktivitas karena perubahan cuaca. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya di aspal mengakibatkan anak-anak menjadi malas ke sekolah. Dampak lain yang ditimbulkan jika jalanan becek adalah ruang belajar menjadi

kotor karena pada saat masuk ruang kelas banyak sekali tanah yang menempel pada sepatu yang dipakai anak-anak sehingga menyebabkan suasana belajar menjadi tidak nyaman karena ruang belajar kelas kotor.

Selain kondisi jaringan jalan yang layak dilewati, pertimbangan lain dalam menentukan lokasi sekolah adalah kondisi fisik jalan menuju sekolah pada saat musim hujan di tiap Kecamatan :

Tabel IV.23
Kondisi Fisik Jalan Menuju Sekolah Pada Musim Hujan

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden		
		A	B	C
01. Sayung	SD Negeri Bedono	8	19	9
02. Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	6	16	8
03. Bonang	SD Negeri Krajanbogo	5	32	3
04. Demak	SD Negeri Bango 02	32	25	1
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	10	27	1
06. Dempet	SD Negeri Balerejo 01	10	16	5
07. Gajah	SD Negeri Sambung 01	18	24	6
08. Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	9	10	2
09. Mijen	SD Negeri Ngegot	6	30	4
10. Wedung	SD Negeri Wedung	11	24	1
11. Kebonagung	SD Negeri Babat	2	13	0
Jumlah		117	234	39

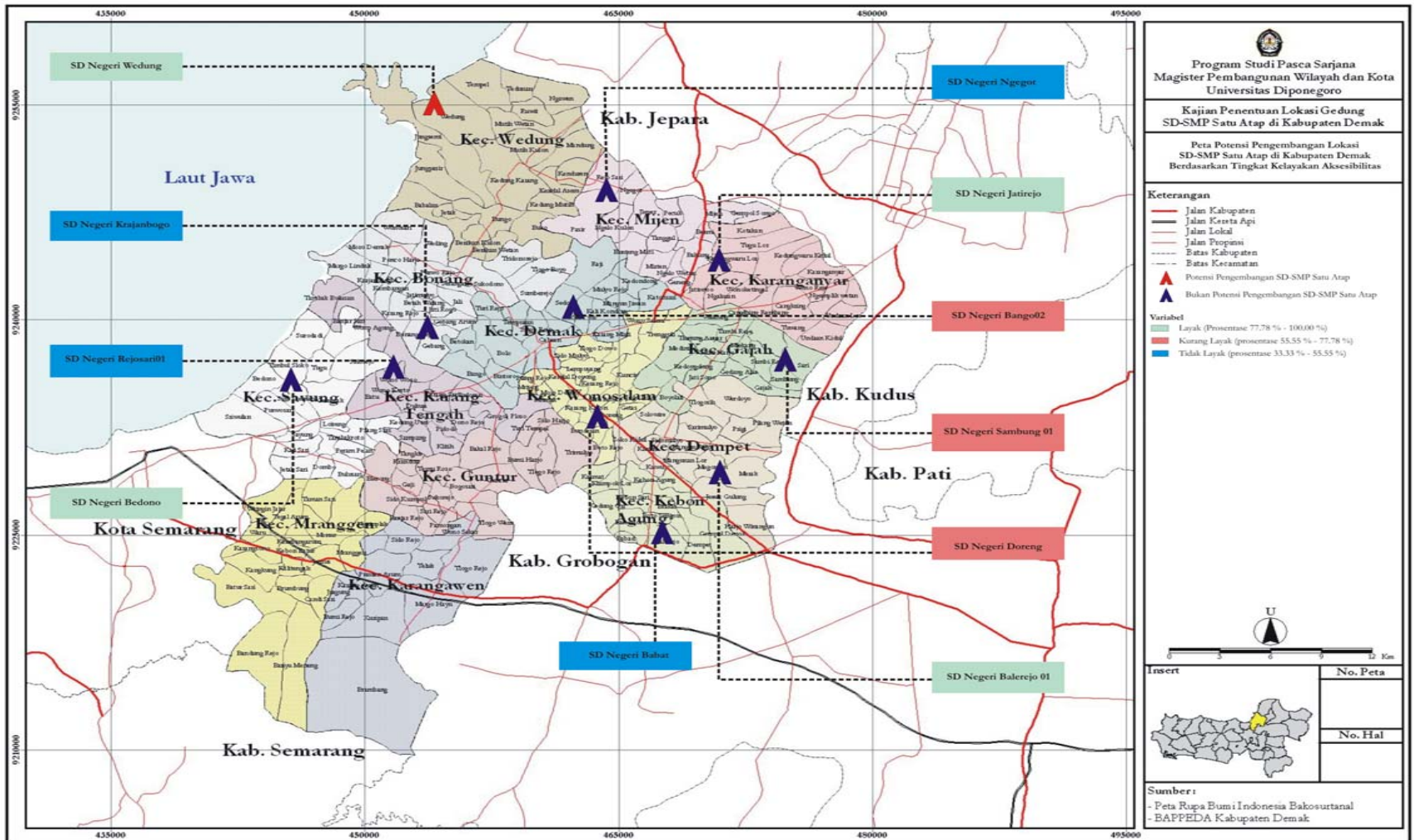
Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Baik untuk dilewati
- B : Agak rusak
- C : Becek dan sulit dilewati

Kondisi fisik jalan menuju sekolah pada musim hujan di tiap Kecamatan kebanyakan dapat dilewati, meskipun terdapat fisik jalan yang agak rusak. Kondisi

ini tidak jauh berbeda dengan di Desa Tugu Kecamatan Sayung tempat dimana saat ini sudah berdiri SD-SMP Satu Atap.



2. Sebaran Layanan Sarana Pendidikan

Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana pendidikan merupakan permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Berikut ini adalah sebaran sarana layanan sarana pendidikan SD dan SMP daerah terpencil di Kabupaten Demak :

Tabel IV.24
Sebaran Layanan Pendidikan Daerah Terpencil di Kabupaten Demak Tahun 2008

Kecamatan	Desa	Instansi		Jumlah
		SD/MI	SMP/MTs	
01. Sayung	Bedono	2	0	2
02. Karangtengah	Rejosari	2	1	3
03. Bonang	Krajanbogo	2	0	2
04. Demak	Bango	3	0	3
05. Wonosalam	Doreng	3	1	4
06. Dempet	Balerejo	1	0	1
07. Gajah	Sambung	1	0	1
08. Karanganyar	Jatirejo	3	1	4
09. Mijen	Ngegot	3	1	4
10. Wedung	Wedung	4	0	4
11. Kebonagung	Babat	3	1	4
Jumlah		27	5	32
Persentase		83.33%	16.67%	100.00%

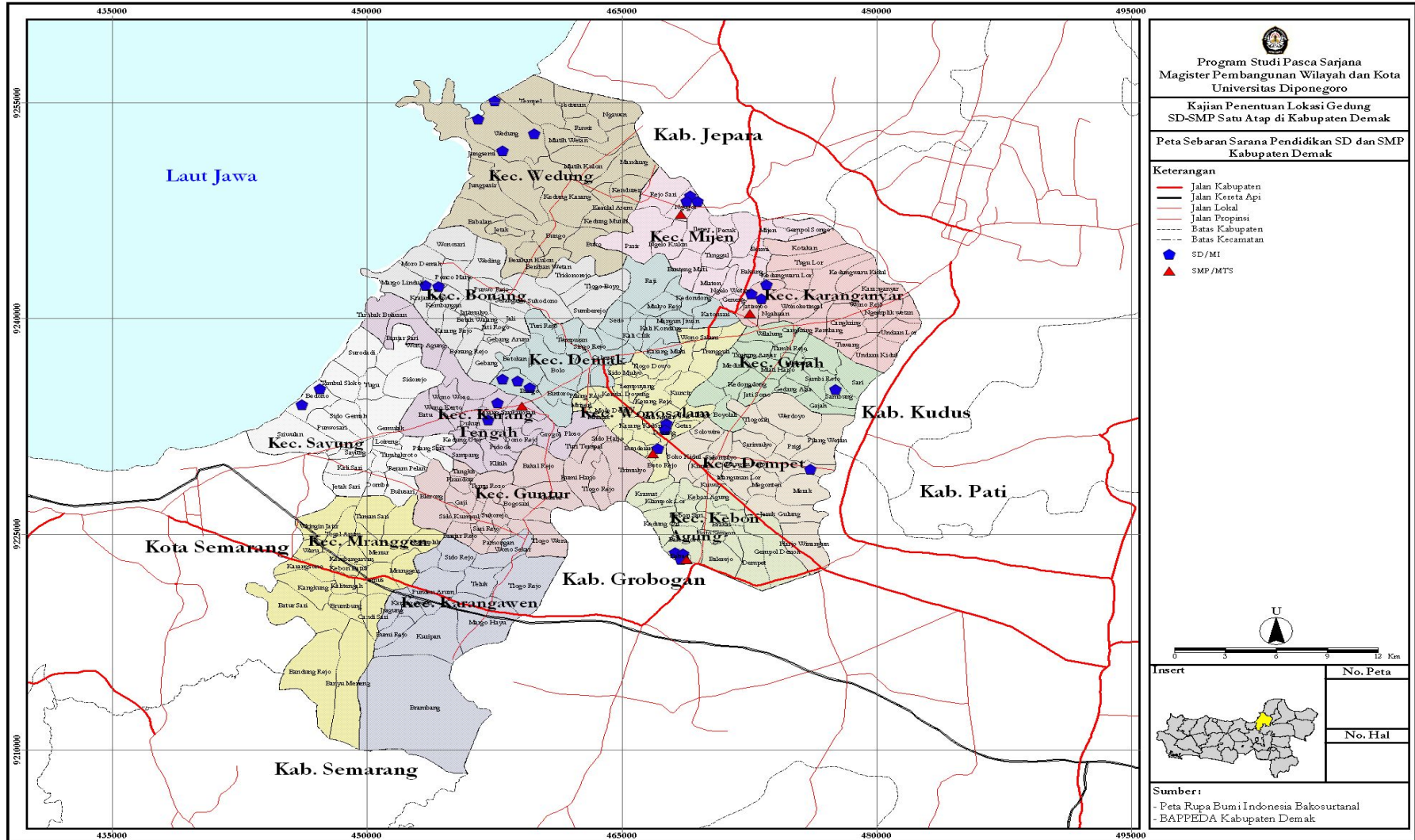
Sumber : Hasil Data Kepala Desa, 2008

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kecamatan Sayung terdapat 2 SD, di Kecamatan Karangtengah terdapat 2 SD dan 1 SMP/MTs, di Kecamatan Bonang terdapat 2 SD, di Kecamatan Demak terdapat 3 SD, di Kecamatan Wonosalam terdapat 3 SD dan 1 SMP/MTs, di Kecamatan Dempet terdapat 1 SD, di Kecamatan Gajah terdapat 1 SD, di Kecamatan Karanganyar terdapat 3 SD

dan 1 SMP/MTs, di Kecamatan Mijen terdapat 3 SD dan 1 SMP/MTs, di Kecamatan wedung terdapat 4 SD dan yang terakhir di Kecamatan Kebonagung terdapat 3 SD dan 1 SMP/MTs.

Daerah terpencil rata-rata memiliki jumlah SD antara 2 sampai dengan 3 SD dan tidak semuanya terdapat SMP di sekitar lokasi SD tersebut walaupun terdapat SMP lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal siswa sehingga sebagian besar siswa yang bertempat tinggal di daerah terpencil tidak melanjutkan sekolahnya karena lokasi SMP yang sangat jauh. Kondisi ini sangat ironis dimana satu sisi pemerintah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dengan memberikan fasilitas bebas biaya sekolah namun disisi lain banyak anak-anak di daerah terpencil tidak dapat melanjutkan karena lokasi sekolah yang sangat jauh. Seandainya mereka dapat melanjutkan sekolah dengan tidak dipungut biaya sama sekali namun mereka tidak mampu mengeluarkan biaya operasional menuju ke sekolah.

Metode perencanaan pendidikan secara mikro yang berupa proses pemetaan kembali sekolah yang baru dengan daya tampung yang lebih besar, dimana sumber-sumber yang ada dapat digunakan secara optimal, disamping itu diusahakan mutu pendidikan yang lebih berbobot dan mempunyai relevansi dengan pembangunan. Dalam membangun sebuah lembaga sekolah, sasaran yang harus diperhatikan adalah pembangun sekolah harus berada ditempat yang layak. Adapun peta sebaran pelayanan Pendidikan SD dan SMP adalah sebagai berikut :



Hasil perhitungan deskriptif persentase tingkat kelayakan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Demak diperoleh data sebagai berikut :

Tabel IV.25
Deskriptif Tingkat Kelayakan Aksesibilitas Kabupaten Demak

Kecamatan	Desa	Tingkat Kelayakan		
		Prosentase	Kelayakan	Bobot
01. Sayung	Bedono	80.60%	Layak	1
02. Karangtengah	Rejosari	33.30%	Tidak layak	0
03. Bonang	Krajanbogo	30.00%	Tidak layak	0
04. Demak	Bango	60.30%	Kurang layak	0
05. Wonosalam	Doreng	55.30%	Tidak layak	0
06. Dempet	Balerejo	93.30%	Layak	1
07. Gajah	Sambung	63.80%	Kurang layak	0
08. Karanganyar	Jatirejo	90.00%	Layak	1
09. Mijen	Ngegot	50.00%	Tidak layak	0
10. Wedung	Wedung	94.40%	Layak	1
11. Kebonagung	Babat	46.70%	Kurang layak	0

Sumber : Data Penelitian 2008

Tingkat kelayakan aksesibilitas daerah terpencil merupakan gambaran dari indikator jarak sekolah dari rumah, waktu tempuh ke sekolah, besar biaya ke sekolah, kondisi tanah, keadaan daerah, kondisi jaringan, kondisi fisik jalan dan alat transportasi menuju sekolah berdasarkan persepsi orangtua siswa. Hasil deskriptif persentase menunjukkan tingkat aksesibilitas yang layak untuk dikembangkan SD-SMP Satu Atap berada di Kecamatan Wedung. Hal ini disebabkan dari delapan indikator kecamatan wedung memiliki tingkat kelayakan paling tinggi (94,40%).

Pertimbangan pada indikator-indikator seperti kondisi tanah sekitar, kondisi jaringan jalan, kondisi fisik jalan, dan alat transportasi menuju sekolah, maka dapat dikatakan hampir semua lokasi calon SD-SMP Satu Atap memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup memadai. Kondisi fisik di daerah sekitar sekolah yang sangat mendukung menunjukkan kesiapan daerah-daerah terpencil di Kabupaten Demak untuk didirikan SD-SMP Satu Atap.

Aksesibilitas menunjuk adanya kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah yang erat kaitannya dengan jarak. Penentuan lokasi ini harus memperhatikan konsep fasilitas pendidikan yang terpusat (Bintarto, 1979: 24).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 bahwa Standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup kriteria minimal sarana dan kriteria minimum prasarana dan penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 jiwa yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh 3 kilo meter melalui lintas jalan kaki. Selain itu lebih memperhatikan kondisi lokasi yang memiliki luas lahan minimum 2500 m persegi, Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dan Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api

Selain itu Juga berpedoman pada panduan pelaksanaan program Block Grant Unit Sekolah Baru dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang memuat

tentang kriteria-kriteria umum dan khusus untuk kelayakan lokasi SD-SMP Satu Atap

Menurut R. G. Soekadijo (2000: 107) persyaratan penentuan lokasi yang terpenting dalam mendirikan sebuah bangunan publik adalah syarat sentralisasi dan aksesibilitas. Sentralisasi dimaksudkan agar lokasi sebuah bangunan publik harus berada berdekatan dengan pemukiman penduduk, sedangkan syarat aksesibilitas dimaksudkan agar lokasi mudah ditemukan dan mudah dijangkau. Lokasi sesuai untuk didirikan SD-SMP Satu Atap berdasarkan syarat ini berada di daerah terpencil dengan jarak yang dekat dengan rumah, waktu tempuh singkat, biaya transportasi yang murah atau dapat ditempuh dengan jalan kaki, kondisi tanah tidak rawan longsor dan banjir sehingga dapat dilewati serta sebaran sarana layanan pendidikan di daerah tersebut tidak seimbang antara jumlah SD dengan jumlah SMP.

Pemilihan lokasi SD-SMP Satu Atap tidak hanya mempertimbangkan faktor aksesibilitas saja akan tetapi juga harus memperhatikan faktor sarana pendukung dan karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Untuk mewujudkannya, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan program penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu tuntas pada tahun 2008. Mengingat makin mendekatnya waktu pencapaian target tersebut, pemerintah

mempertegas kembali dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

SD-SMP Satu Atap merupakan salah satu program pemerintah guna mempercepat pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Tujuan dari program SD - SMP Satu Atap sendiri untuk mengatasi kendala yang dihadapi anak - anak lulusan sekolah dasar yang tinggal di daerah - daerah terpencil. Konsep pembangunan SD-SMP Satu Atap ini adalah mendekatkan lembaga pendidikan SMP ke SD di daerah dengan kondisi geografis yang sulit atau terpencil, agar tamatan SD dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP.

12. Analisa Penentuan Lokasi SD-SMP Satu Atap

Penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap dalam penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan tiga variabel yaitu ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, karakteristik penduduk terhadap partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan dan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Demak. Lokasi SD-SMP Satu Atap harus disesuaikan dengan kesiapan lokasi daerah mulai dari kesiapan sarana pendidikan, tingkat partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan dan kemudahan aksesibilitas penduduk di daerah terpencil terhadap layanan sarana pendidikan.

Pertimbangan dalam menentukan lokasi SD-SMP Satu Atap harus melihat seluruh indikator yang ada. Setelah dilakukan analisa deskriptif pada tiap

indikator maka diperoleh wilayah tertentu yang memenuhi standar minimal atau standar kelayakan untuk dikembangkan SD-SMP Satu Atap yang mewakili setiap variabel.

Lokasi yang diprioritaskan untuk dikembangkan SD-SMP Satu Atap adalah wilayah yang mewakili semua variabel penelitian. Lokasi yang terpilih tersebut adalah SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung. Hal ini didasarkan pada data dari analisis kualitatif pada variabel ketersediaan sarana pendidikan terpilih SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung dan SD Negeri Balerejo Kecamatan Dempet. Analisis kualitatif pada variabel kedua yaitu partisipasi pendidikan terpilih SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung. Analisis kuantitatif dengan deskriptif persentase pada variabel aksesibilitas juga terpilih SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung. Berdasarkan ketiga analisis tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai daerah yang dapat dikembangkan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

Adapun rekap hasil analisis dari beberapa variabel adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 26

Hasil Penilaian Potensi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak

No	Indikator	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	SD 9	SD 10	SD 11
1.1	Sarana SD dan SMP	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
1.2	Daya Tampung ^{*)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Lahan SD	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
1.4	Jumlah Penduduk	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
2.2	Angka Partisipasi Kasar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Angka Putus Sekolah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3.1	Tingkat Aksesibilitas	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Jumlah		4	2	3	3	2	5	3	2	1	7	1

Keterangan :

SD 1 : SD Negeri Bedono Kecamatan Sayung

SD 2 : SD Negeri Rejosari 01 Kecamatan Karangtengah

SD 3 : SD Negeri Krajanbogo Kecamatan Bonang

SD 4 : SD Negeri Bango 02 Kecamatan Demak

SD 5 : SD Negeri Doreng Kecamatan Wonosalam

SD 6 : SD Negeri Balerejo 01 Kecamatan Dempet

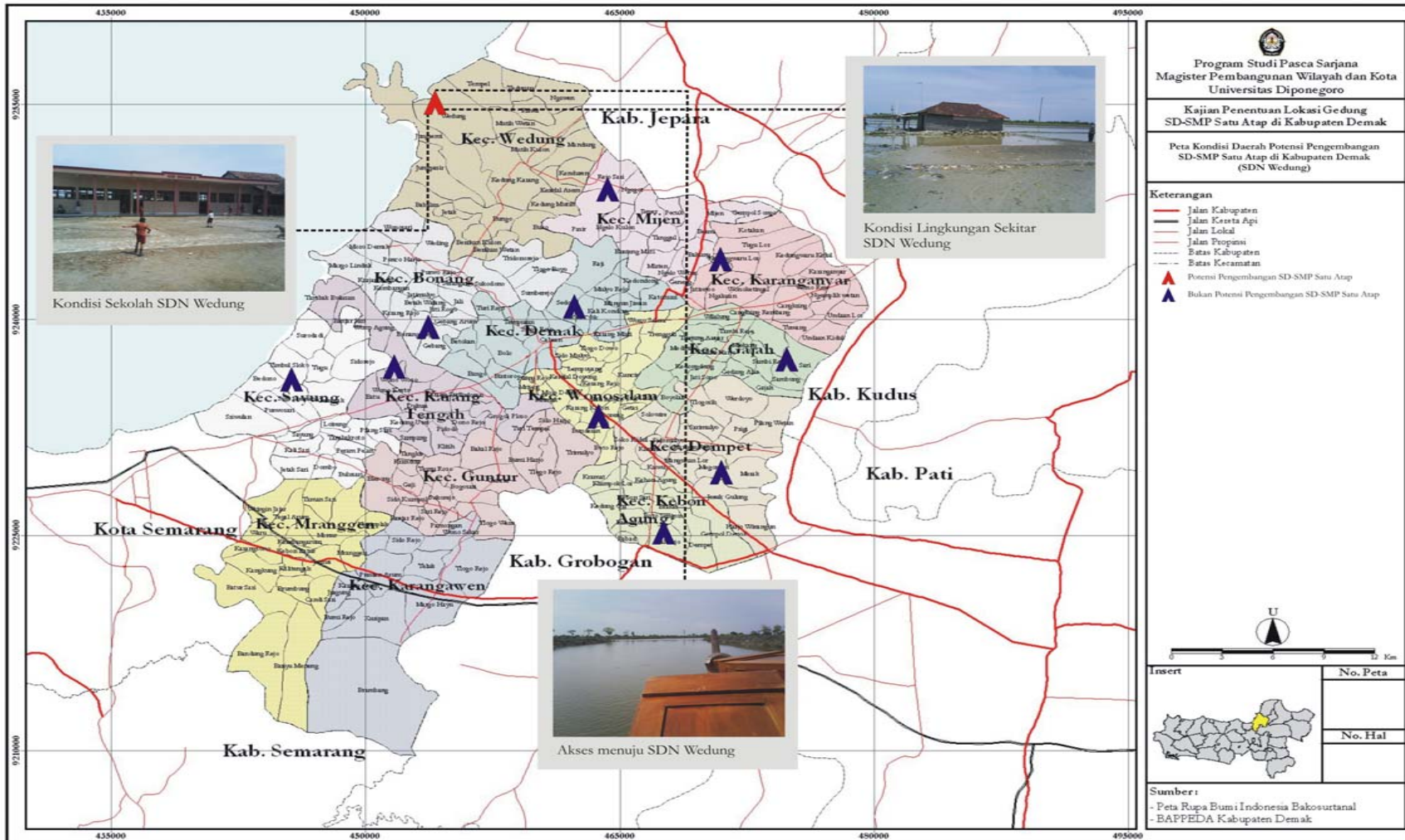
SD 7 : SD Negeri Sambung 01 Kecamatan Gajah

SD 8 : SD Negeri Jatirejo Kecamatan Karanganyar

SD 9 : SD Negeri Ngegot Kecamatan Mijen

SD 10 : SD Negeri Wedung Kecamatan Wedung

SD 11 : SD Negeri Babat Kecamatan Kebonagung



Pertimbangan lain yang digunakan untuk menentukan pendirian lokasi SD-SMP Satu Atap adalah motivasi orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya sebab meskipun APK dan APS di daerah tersebut sangat tinggi tetapi orangtua tidak bersemangat atau tidak memotivasi anak-anaknya untuk bersekolah maka program SD-SMP Satu Atap akan sia-sia. Keinginan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah satu atap untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.27
Keinginan Menyekolahkan Anaknya

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden				Jumlah
		A	B	C	D	
01.Sayung	SD Negeri Bedono	15	3	17	1	36
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	11	2	15	2	30
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	6	0	34	0	40
04.Demak	SD Negeri Bango 02	25	0	29	4	58
05. Wonosalam	SD Negeri Doreng	12	5	16	5	38
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	8	2	11	9	30
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	31	0	15	1	47
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	10	3	5	2	20
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	6	6	27	1	40
10. Wedung	SD Negeri Wedung	23	1	12	0	36
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	1	4	8	2	15
Jumlah		132	29	200	29	390
Persentase		33.85%	7.44%	51.28%	7.44%	100.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Ya karena mudah dijangkau, dan tidak memerlukan waktu lama
- B : Tidak karena sulit dijangkau dan sarana prasarana kurang
- C : Ya karena mudah dijangkau, mutu dan sarana prasarana cukup
- D : Tidak karena walaupun mudah dijangkau tetapi mutunya kurang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar orang tua tetap berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya jika didirikan SD-SMP Satu

Atap di daerahnya. Karena menurut mereka dengan adanya SD-SMP Satu Atap lokasi sekolah mudah dijangkau, mutu, sarana dan prasarananya cukup. Harus diakui bahwa salah satu kendala untuk menekan angka putus sekolah (APS), karena masih banyak orangtua yang belum memiliki kesadaran mendorong pendidikan anak. Akibatnya, banyak orangtua yang lebih memilih mengeksploitasi anak bekerja atau mencari nafkah bagi keluarga, ketimbang menyekolahkan anak. Berdasarkan data hasil penelitian sebagian besar orangtua termotivasi untuk menyekolahkan anaknya jika didirikan SD-SMP Satu Atap di desanya. Sedangkan harapan orang tua seandainya didirikan SD-SMP Satu Atap di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.28
Harapan Terhadap SD-SMP Satu Atap Ke Depan

Kecamatan	Sekolah	Jawaban Respoden				Jumlah
		A	B	C	D	
01.Sayung	SD Negeri Bedono	1	3	2	30	36
02.Karangtengah	SD Negeri Rejosari 01	1	4	2	23	30
03.Bonang	SD Negeri Krajanbogo	1	11	25	3	40
04.Demak	SD Negeri Bango 02	16	14	19	9	58
05.Wonosalam	SD Negeri Doreng	5	4	8	21	38
06.Dempet	SD Negeri Balerejo 01	4	1	5	20	30
07.Gajah	SD Negeri Sambung 01	1	4	0	42	47
08.Karanganyar	SD Negeri Jatirejo	2	2	8	8	20
09.Mijen	SD Negeri Ngegot	6	11	4	19	40
10.Wedung	SD Negeri Wedung	6	2	7	21	36
11.Kebonagung	SD Negeri Babat	4	5	4	2	15
Jumlah		47	61	84	198	390
Persentase		12.05%	15.64%	21.54%	50.7 7%	100.00%

Sumber : Hasil Data Kepala Keluarga, 2008

Keterangan :

- A : Siswanya semakin bertambah
- B : Selalu mengikuti kegiatan tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten
- C : Mampu bersaing dengan sekolah yang ada di kota

D : Jawaban a, b, c semua benar
Kesadaran akan pentingnya pendidikan nampaknya sudah mulai dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai golongan tidak terkecuali masyarakat di daerah terpencil. Untuk menyambut antusiasme masyarakat tersebut khususnya masyarakat di daerah terpencil, pemerintah mengadakan program pendirian SD-SMP Satu Atap. Penyelenggaraan program SD-SMP satu atap dilaksanakan untuk membantu siswa SD di daerah pelosok dan terpencil yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena tidak adanya SMP di daerah tersebut.

Daerah terpencil yang biasanya SMP belum didirikan karena alasan jumlah siswa yang tidak memadai sementara siswa lulusan SD yang akan melanjutkan harus mencari sekolah yang jarak jauh sehingga membangun unit sekolah baru SMP dipandang tidak efisien nampaknya tidak dapat dijadikan alasan. Sebab data hasil penelitian menunjukkan APK dan ASP di daerah terpencil cukup tinggi.

Sebagian besar orangtua di yang berada daerah terpencil berharap kualitas SD-SMP Satu Atap tidak berbeda dengan SD-SMP konvensional. Selain itu dengan adanya SD-SMP Satu Atap anak-anak semakin termotivasi untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Partisipasi penduduk merupakan pertimbangan kedua setelah ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan. Dalam petunjuk mekanisme penetapan dan pelaksanaan pemilihan lokasi SD-SMP Satu Atap diperlukan partisipasi dari masyarakat persebaran pengguna sarana pendidikan. Ketimpangan antara jumlah lulusan dan jumlah siswa yang melanjutkan merupakan salah satu pertimbangan

dalam variabel ini, selain itu kemampuan ekonomi orangtua siswa untuk membiayai anak-anaknya merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini dimaksudkan agar pendirian SD-SMP Satu Atap di desa terpencil tidak sia-sia karena orangtua siswa ternyata tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Berdasarkan analisa karakteristik penduduk pendirian SD - SMP Satu Atap dapat didirikan di daerah Kecamatan Wedung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi sedangkan jumlah sekolah, penduduk usia sekolah dan angka putus sekolah yang tidak seimbang artinya belum ada SMP di daerah ini sedangkan penduduk usia sekolah cukup tinggi dan angka putus sekolah yang tinggi. Daerah terpencil di Kecamatan Wedung ini juga belum didirikan SMP sedangkan jarak menuju lokasi SMP yang ada di sekitar daerah terpencil sangat jauh dari tempat tinggal siswa. Kondisi bangunan (lahan) yang akan digunakan untuk pendirian SD-SMP Satu Atap juga sudah siap dan cukup representative.

Pertimbangan selanjutnya adalah aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan harus dipertimbangkan. Kondisi daerah pelosok (terpencil) sangat jauh untuk menuju ke SMP/MTs. Waktu tempuh yang dibutuhkan siswa untuk menuju ke sekolah cukup lama sehingga siswa sering terlambat sehingga sesampainya di sekolah siswa kelelahan dan kurang berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. Dampak lain yang ditimbulkan karena akses ke sekolah yang sangat sulit bertambahnya anggaran atau biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orangtua siswa padahal sebagian besar profesi orangtua yang tinggal di daerah terpencil adalah petani atau buruh dengan tingkat ekonomi yang relatif rendah.

Ketiga analisa diatas dapat dijadikan dasar dalam menentukan lokasi SD-SMP Satu Atap, secara garis besar dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, karakteristik penduduk terhadap partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan dan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan maka lokasi SD-SMP Satu Atap dapat didirikan di Kecamatan Wedung. Alternatif pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan dan selanjutnya penentuan tempat pendirian SD-SMP Satu Atap seperti jumlah ruang belajar yang lebih banyak dibanding daerah lain, belum adanya SMP di daerah tersebut sedangkan akses menuju SMP di daerah Tambakgojoyo harus naik perahu sehingga membutuhkan waktu yang lama, tersedia lahan yang memadai untuk didirikan SD-SMP Satu Atap di daerah ini selain itu APK di kecamatan wedung sangat rendah sedangkan APS-nya sangat tinggi. Untuk itu kecamatan wedung dipilih menjadi alternatif utama untuk didirikan SD-SMP Satu Atap.

Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak sudah dimulai pada tahun 2007 di Desa Tugu Kecamatan Sayung. Penentuan lokasi SD-SMP Satu Atap di daerah ini dipandang tidak efektif. Selain semakin menurunnya partisipasi masyarakat, lokasi sekolah di nilai juga tidak tepat sasaran. Gambaran mengenai lokasi SD-SMP Satu Atap di Desa Tugu Kecamatan Sayung dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar IV.1
Halaman Depan SD-SMP Satu Atap di Desa Tugu Kecamatan Sayung

Pada gambar IV.1 terlihat halaman sekolah tergenang air pada saat musim penghujan. Kondisi ini akan mengganggu siswa pada saat proses pembelajaran. Lantai di dalam kelas basah atau lembab karena sekitar sekolah tergenang oleh air banjir. Dampak lanjutan dari bencana banjir ini menyebabkan penurunan kualitas kesehatan lingkungan sekolah pada daerah pasca-banjir.

Disamping banjir, faktor lain yang menunjukkan bahwa lokasi SD-SMP Satu Atap tidak sesuai dengan standar adalah lokasi sekolah cukup jauh dari pemukiman penduduk. Menurut Chapin dalam Jayadinata (1999:161) disebutkan standar jarak sekolah dengan pemukiman $\pm \frac{3}{4}$ km atau jika ditempuh dengan jalan kaki ± 10 menit sedangkan lokasi SD-SMP Satu Atap yang ada di Kecamatan Sayung $\pm 1,5$ km atau ditempuh dengan jalan kaki membutuhkan waktu 20 menit. Meskipun masih dapat dilewati sepeda motor, akan tetapi akses jalan menuju sekolah juga becek pada saat musim penghujan. Untuk akses jalan menuju sekolah dapat dilihat pada gambar IV.2 berikut:



Gambar IV.2
Akses Jalan Menuju SD-SMP Satu Atap di Desa Tugu Kecamatan Sayung

Buruknya aksesibilitas di lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap, merupakan salah satu faktor penyebab kurang optimalnya program ini. Kontrol terhadap pemanfaatan penggunaan lahan (*land-used control*) yang tidak sesuai masih belum berjalan. Akibatnya pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung seperti berjalan tanpa rencana, sehingga memicu menurunnya partisipasi masyarakat di daerah ini yang pada dasarnya penduduk dari kalangan bawah. Sebagian besar pendapatan masyarakat di Desa Tugu Kecamatan Sayung antara Rp. 500.000,-s/d Rp. 1.000.000,-. Daerah ini termasuk daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah. Untuk itu kondisi inilah yang menjadi pertimbangan oleh Dinas Pendidikan setempat dalam mendirikan SD-SMP Satu Atap di Desa Tugu Kecamatan Sayung yang dirasa tepat karena penghasilan masyarakatnya rendah.

Penentuan Kecamatan Wedung sebagai lokasi pendirian SD-SMP Satu Atap karena di daerah ini lebih siap dibandingkan di daerah lain. Ketersediaan sarana prasarana belajar seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, jumlah modul, kesiapan tenaga pengajar dan ketersediaan lahan untuk pendirian SD-SMP Satu

Atap merupakan dasar pertimbangan utama. Sebagai daerah terpencil, Kecamatan Wedung memiliki tingkat angka partisipasi kasar yang paling rendah dibandingkan dengan daerah terpencil lain di Kabupaten Demak dan angka putus sekolah yang paling tinggi. Selain itu, dibandingkan kondisi aksesibilitas pada SD-SMP Satu Atap di desa Tugu Kecamatan Sayung tingkat aksesibilitas di Desa Wedung jauh lebih baik. Antusiasme masyarakat daerah sekitar juga cukup tinggi karena harapan mereka dengan adanya SD-SMP Satu Atap akan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Desa Wedung. Untuk itu, Kecamatan Wedung merupakan lokasi yang paling tepat saat ini untuk didirikan SD-SMP Satu Atap. Berikut ini adalah lokasi lokasi rencana pendiriakn SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Wedung :

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian serta analisa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelayakan secara umum SD didekatkan dengan SMP yang diterapkan sebelumnya di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah memenuhi kriteria-kriteria minimum dalam panduan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap ternyata setiap musim penghujan sekolah menjadi banjir, sedangkan dalam penentuan lokasi baru SD-SMP Atap didasarkan kesiapan daerah terpencil memiliki ketersediaan sarana pendidikan SD lebih besar dibanding sarana pendidikan SMP, ada 6 kecamatan memiliki jumlah penduduk yang besar tetapi belum didirikan SMP, usia 13-15 cukup banyak dibandingkan dengan daya tampung SMP/MTs yang rata-rata belum mencukupi dan lahan yang cukup seperti dijelaskan dalam panduan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap th 2006, harus memiliki minimal luas lahan 2500 m²
2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat daerah terpencil dilihat dari pendapatan, pengeluaran dan pendidikan rata-rata kurang juga pada tingkat partisipasi pendidikan ini ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah (APS). Rata-rata APK daerah terpencil di Kabupaten Demak sebesar 44,21%. Menurut panduan pengembangan SD-SMP Satu Atap, dijelaskan bahwa daerah terpencil yang akan dikembangkan SD-SMP Satu Atap harus memiliki APK kurang dari 90%, APS lebih besar dari 60% dan. APK menunjukkan daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang. Kelayakan lokasi SD-SMP Satu Atap ditujukan pada daerah yang memiliki

APK rendah dan APS yang tinggi. Selain APK dan APS, kesiapan pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil juga dilihat dari ketersediaan calon tenaga kependidikan di daerah tersebut.

3. Sarana pelayanan pendidikan harus berada dekat dengan rumah, bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, biaya murah atau mudah ditempuh jalan kaki, kondisi tanah tidak miring rawan longsor dan tidak banjir pada musim penghujan, sebagaimana dijelaskan Suhardjo (1988:26) bahwa dalam pengukuran aksesibilitas, jarak merupakan unsur yang penting. Dimensi jarak yang diukur dalam aksesibilitas meliputi jarak fisik yang diukur dengan panjang, waktu tempuh dan jarak ekonomi yang diukur dengan biaya yang dibutuhkan menuju lokasi.

Berdasarkan hasil analisa penenlitian, alasan pemilihan kelayakan lokasi baru SD-SMP Satu Atap di SD wedung Kecamatan Wedung ada beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan yaitu :

- 1) Sarana SD banyak
- 2) Sarana SMP sedikit
- 3) Daya tampung SMP kurang
- 4) Lahan 2500 m²
- 5) Lulusan SD banyak
- 6) Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa minim
- 7) APK (Angka Partisipasi Kasar) rendah
- 8) APS (Angka Putus Sekolah) tinggi
- 9) Dekat rumah
- 10) Jalan kaki
- 11) Biaya murah

- 12) Mudah dijangkau
- 13) Kondisi tanah tidak miring
- 14) Tidak longsor
- 15) Bebas banjir

5.2 Rekomendasi

Selanjutnya dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil penelitian ini dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kelayakan calon SD-SMP Satu Atap untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dan ada kelebihan lahan apabila diadakan pengembangan .
2. Untuk mendukung penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kesiapan daerah terpencil dalam pengembangan SD-SMP Satu Atap. dalam keterpaduan pengelolaan yang menyangkut permasalahan-permasalahan teknis manajerial.
3. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi referensi Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan terutama yang berkaitan dengan perencanaan Tata Ruang di daerah terpencil.
4. Perlu adanya penentuan kebijakan dari pemerintah Daerah Tingkat II Demak (Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Demak) terutama dalam verifikasi kelayakan lokasi SD di Daerah Terpencil sehingga dalam penentuan lokasi tepat pada sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Barrath, Paul, 1998, *Building For The Future*, Journal of Bank Marketing volume 30 (May), hal. 45 – 53.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, 1978. *Pola Kota dan Permasalahan Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- C. Branch, Melvile. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar & Penjelasan*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Chappin, Jr. FS, And Kaiser. E.J, 1979. *Urban Land Use Planning*, Univercity Of Illinois Press, Urbana Illinois.
- Daldjoeni,N. 1992. *Geografi Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Darmono. 2001. *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta Grasindo
- Darwent, *Urban Land Use Planning*, Urbana And Chicago. University of Illionis Press, 1975.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1987. *Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota*. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidik Masalah Bangunan.
- Dilworth, James B., 1996, *Operations Management*, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Djojodipuro, Marsudi. *Teori Lokasi*. 1992. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Doxiadies Constantios, 1975. *Ekistics An Introduction To The Science of Human Settermarts*, Hutchinson and Co Publishers, London.
- Glasson,1977. *Denatured Visions Landscape and Culture in The Twentieth Century*. New York : Harry and Abraham.
- <http://sarana.dikmenjur.net>. (website resmi Dinas Pendidikan)

<http://www.pu.go.id>. (website resmi Dinas PU)

<http://www.suaramerdeka.com>. (website surat kabar harian Suara Merdeka)

<http://www.kompas.com>. (website surat kabar harian Kompas)

Hansen, 1981. *Landscape Architecture*. London : MIT Press.

Jones, Melvyn dan F. William Hornby. 1991. *An Introduction to Settlement Geography*. New York: Cambridge University Press.

Kotler, Philip, 1997, *Marketing Management : Analysis ,Planning , Implementation, and Control*, Ninth Edition, Prentice Hall, Inc., USA.

Krajewski, Lee J. & Ritzman, Larry P., 1996, *Operations Management : Strategy and Analysis*, Fourth Edition, Wesley Publishing Company.

Lloyd dan Dicken, 1998. *The Urban Design Process*. New York : Van Nostrand Reinhold Company.

Mantra, Ida Bagoes dan Kasto. 2000. *Langkah-Langkah Penelitian Survey Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) – UGM. Yogyakarta.

Marshal, 1997. *Public Space*, Australia : Press Syndicate University of Cambridge.

Morril. Richard L, 1974. *The Spatial Organization of Society*, Duxbury Press California.

Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nasution, S. 1994. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi akasara.

Noori, Hamid & Radford, Russel, 1995, *Productio and Operations Management Total Quality and Responsiveness*, International Edition, McGraw – Hill, Inc, USA.

Northam, 1975. *Publik Space*. Australia : Press Syndicate University of Cambrige.

Perroux, Francois, 1995. *Urban Parks and Open Space*. Washington DC : ULI – the Urban Land Institue, 1995.

Sadono Sukirno, 1985. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LP FEUI, Jakarta.

- Sadono Sukirno, 1996. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Savitri, Eka Febriani. 2002. *Studi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Kota di Kota Baru Bumi Serpong Damai*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Sjahrizal, 1985. *Pembangunan Kota Dalam Rangka Penataan Ruang*, Tata Loka Vol 5.
- Stanley, Thomas J., dan Sewall, Murphy A., 1976, *Image Inputs to a Probabilistic Model : Predicting Retail Potential*, Journal of Marketing volume 40 (July), hal. 48 – 53.
- Suharsimi, Arikunto, 2004. *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi: Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sujarto, Djoko, 1992. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau Dari Segi Perencanaan Lokal*, BPA UGM, Yogyakarta.
- Sutanto, 1986. *Penginderaan Jarak Jauh Untuk Penggunaan Lahan*, Fak. Geografi UGM, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tim IKIP, 1980. *Peran dan Signifikansi Pendidikan*.
- Tjahjati, Budi. 2000. *Pembangunan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Stadium General Bagi Mahasiswa Planologi TA 2000/2001.
- Todaro, 2000. *Ilmu Ekonomi Tradisional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Wilsher, 1997. *Urban Economics*. Boston : Richard D. Irvin
- Yeates, R & B.Garner. 1980. *The North American Cities Third Edition*. Ontario: Queen's University Ontario
- Yunus, H S, 2000. *Struktur Tata Ruang Kota* . Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Yunus, H.S, 1991. *Perkembangan Kota Dan Faktornya*, Fak. Geografi UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No : 24 tahun 2007, *Standar Minimal Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK*
- Panduan Block Grant tahun 2006 , *Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap*

KAJIAN PENENTUAN LOKASI SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN DEMAK

SURVEI PENELITIAN

Oleh:

**MIARSIH
NIM : L4D006086**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008**

PENDAHULUAN

Peneliti merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Untuk memenuhi Tesis sebagai persyaratan kelulusan Magister, maka mahasiswa diharuskan untuk melakukan kegiatan penelitian. Oleh karena itu Kami melakukan penelitian mengenai Studi Penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.

Studi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemenuhan Wajib Belajar 9 Tahun sesuai target harus selesai pada tahun 2008/2009. Kendala muncul untuk penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun tersebut antara lain kurangnya dukungan dana. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) membutuhkan dana yang besar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia masih berlangsung sampai sekarang ini sehingga pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk memenuhi target penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun tidak dapat dilaksanakan. Hal memunculkan alternatif diterapkannya kebijakan Gedung SD-SMP Satu Atap oleh Dinas

Pendidikan. Namun, masih dibutuhkan studi pengembangan untuk pelaksanaan SD-SMP Satu Atap tersebut khususnya di Kabupaten Demak sebagai wilayah studi.

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penelitian mengenai Studi Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya menyangkut pengembangan pendidikan dalam kaitannya dengan teori pengembangan wilayah dan kota dalam dunia nyata. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah kota, berupa strategi pengembangan wilayah khususnya bidang pendidikan.

Oleh karena itu, melalui kuesioner ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Untuk itu, peneliti mengharapkan bantuan Anda untuk mengisi kuesioner yang kami ajukan dengan sebenar-benarnya.

Atas bantuan Anda, Kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS PENELITI

Nama	: Miarsih
Alamat	: Jl. Boegenvil No : 1 Perum Kalikondang Pesona Asri Kabupaten Demak
No. Telp.	: 081390140860
Tanggal/ Jam	:
Lokasi	:
Kode	:

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Isilah terlebih dahulu identitas anda pada tempat yang telah disediakan
2. Untuk pertanyaan yang berupa pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda benar dengan menyilang (✖) atau melingkari (○) alternatif jawaban yang telah disediakan.
3. Untuk pertanyaan tertutup, pilihlah alternatif jawaban yang telah disediakan dengan memberi tanda *check mark*
4. Apabila anda menemui pertanyaan pilihan yang memperbolehkan adanya suatu jawaban yang tidak terdapat dalam pilihan-pilihan yang disediakan, maka jawaban dapat diisikan pada tempat yang telah tersedia.
5. Untuk menjawab pertanyaan terbuka (isian), anda diharapkan memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban dituliskan pada tanda titik-titik (.....).
6. Isilah jawaban dengan jujur sesuai dengan kondisi yang ada, demi mendapatkan data dan informasi yang akurat.
7. Jawaban anda tidak akan dinilai benar atau salah, melainkan diisi sesuai dengan kondisi dan pengalaman responden. Informasi yang didapatkan dari survei ini akan dijamin kerahasiannya dan tidak disebarluaskan.

Demak, Mei
2008

Kepada
Yth Bapak/Ibu . (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan)
Se Kabupaten Demak
Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini , kami sampaikan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan lokasi pengembangan SD-SMP satu atap di Kabupaten Demak, pada lingkungan sekolah Bapak/Ibu. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung kepada masyarakat pengguna sarana pendidikan umumnya dan kepala keluarga siswa yang duduk di kelas 6 pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Demak.

Adapun identitas kami sebagai pelaksana studi ini adalah sebagai berikut :

Nama : MIARSIH
NIM : L4D006086
Institusi : Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Universitas Diponegoro Semarang
Alamat : Jl. Bugenvile No : 1 Perumnas Kalikondang Pesona Asri

Kabupaten Demak

Kami berharap, Bapak/ibu berkenan mengisi kuesioner ini dengan apa adanya atau sesuai dengan kondisi sekolah dan sarana pelayanan pendidikan di lingkungan Bapak/Ibu. Penelitian ini bersifat ilmiah, sebagai bahan untuk penyusunan Tugas Akhir (Tesis) pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.Semarang Data yang Bapak/Ibu berikan, kami jamin kerahasiaannya. Perlu diketahui bahwa penyebaran kuesioner ini telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan kegiatan penelitian ilmiah.

Demikian atas perhatian dan kesediaannya mengisi kuesioner ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Salam hormat

MIARSIH

Kepada
Yth Bapak/Ibu Kepala Desa
(KecamatanKabupaten Demak)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini , kami sampaikan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan lokasi pengembangan SD-SMP satu atap di Kabupaten Demak, pada sekolah di lingkungan desa Bapak/Ibu. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung kepada masyarakat pengguna sarana pendidikan umumnya dan kepala keluarga siswa yang duduk di kelas 6 pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Demak.

Adapun identitas kami sebagai pelaksana studi ini adalah sebagai berikut :

Nama : MIARSIH
NIM : L4D006086
Institusi : Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Universitas Diponegoro Semarang
Alamat : Jl. Bugenvile No : 1 Perumnas Kalikondang Pesona Asri

—
Kabupaten Demak

Kami berharap, Bapak/ibu berkenan mengisi kuesioner ini dengan apa adanya atau sesuai dengan kondisi sekolah dan sarana pelayanan pendidikan di lingkungan Bapak/Ibu. Penelitian ini bersifat ilmiah, sebagai bahan untuk penyusunan Tugas Akhir (Tesis) pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.Semarang Data yang Bapak/Ibu berikan, kami jamin kerahasiaannya. Perlu diketahui bahwa penyebaran kuesioner ini telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan kegiatan penelitian ilmiah.

Demikian atas perhatian dan kesediaannya mengisi kuesioner ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Salam hormat

MIARSIH

LEMBAR KUESIONER I

**KUESIONER UNTUK KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK
(K-01)**

Responden: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

PETUNJUK

Kuesioner ini diisi oleh petugas melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan Kec/Kota di mana calon SD-SMP Satu Atap berada.

IDENTITAS

1.	Nama Kecamatan	
2.	Nama Kepala Dinas Pendidikan	
3.	Alamat Kantor	
4.	Nomor telepon (bila ada)	

1. Apakah pada tahun 2008 Kecamatan/Kota menyelenggarakan program penyuluhan wajar dikdas 9 tahun di desa-desa terpencil? Bila YA, berapa kali kegiatan tersebut diselenggarakan? Di desa mana saja dilaksanakan?

-

2. Desa mana saja yang termasuk daerah terpencil, dan terisolasi, ?

-

3. Berapa jumlah (persentase) Lulusan SD di daerah/kecamatan Bapak/Ibu yang tidak melanjutkan ?

1.	15% - 30%	
2.	30% - 45%	
3.	45% - 60%	
4.	>60%	

Beri tanda silang

4. Desa mana di daerah Bapak/Ibu yang memiliki angka putus sekolah yang tinggi? Berapa persentase tiap desa?

-

5. Apakah penyebab tingginya angka putus sekolah pada desa tersebut?

-

6. Apakah di daerah anda membutuhkan penambahan SLTP baru?

-

7. Di desa mana lokasi yang paling sesuai untuk lokasi SLTP yang baru?

-

..... 2008.
Mengetahui,
Ka Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan

.....,

Petugas,

.....

.....

LEMBAR KUESIONER II

**KUESIONER KEPALA SD
(K-02)**

Responden: Kepala SD (terpencil)

A. IDENTITAS

Nama SD	
Nomor Statistik Sekolah (NSS) (bila ada)	
Alamat lengkap	
Nomor telepon (bila ada)	
Jumlah lokal (dalam satuan ruang)	
Jumlah guru	
Nama kepala sekolah	
No. Telepon Kepala Sekolah	
SMP/MTs terdekat dari SD ini	
Jarak dan alat transport ke SMP terdekat	

1. Alasan lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, urutkan alasan-alasan tersebut dari yang paling utama dengan memberi angka 1 s.d. 9 pada kolom sebelah kanan.

No	Alasan tak melanjutkan	Urutan alasan dari yang paling utama dengan memberi nomor 1 s.d. 9*)
1	SMP/MTs yang ada terlalu jauh/tak terjangkau	
2	Tidak mampu membiayai	
3	Transportasi sulit/mahal	
4	Kondisi geografis (medan sulit)	
5	Daerahnya terpencil	
6	Pendidikan kurang penting	
7	Bekerja	
8	Menikah	
9	Lain-lain, sebutkan:	

2. Data siswa sd/mi pendukung (bila ada)

1) SD/MI pendukung I

- a. Nama :
- b. Jarak ke calon SD-SMP Satu Atap : km
- c. Waktu tempuh : jam

2) SD/MI pendukung II

- a. Nama :
- b. Jarak ke calon SD-SMP Satu Atap : km

c. Waktu tempuh : jam

3. Berapa luas (dalam meter persegi) lahan sekolah secara keseluruhan?

4. Apa status kepemilikan lahan calon SD-SMP Satu Atap (SHM, kas desa, sewa, atau lainnya)?

5. Apakah lahan sekolah siap bangun (dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kemiringan tanah dan kelabilan tanah)? Bila tidak, jelaskan alasannya.

6. Sebutkan alat transportasi (darat, sungai, laut) menuju calon SD-SMP Satu Atap yang terjangkau oleh siswa pada umumnya?

..... 2008
Mengetahui,
Kepala SD

.....
Petugas,

.....
.....

LEMBAR KUESIONER III

**KUESIONER UNTUK KEPALA DESA/LURAH
(K-03)**

Responden: Kepala Desa/Lurah

A. IDENTITAS

Nama Desa	
Nama Kepala Desa	
Alamat kantor desa/kalurahan	
Nomor telepon (bila ada)	
Kecamatan	

**B WARGA DESA TERDIDIK YANG KEMUNGKINAN BISA
DIJADIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Nama warga terdidik	Usia	Pendidikan Tertinggi	Jurusan	Jarak rumah ke SD/MI calon SD-SMP satu atap
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

C. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

1. Sebutkan mata pencaharian penduduk setempat, rata-rata penghasilan, dan prosentasenya?

No.	Jenis Pekerjaan	Prosentase	Rata-rata Penghasilan (Rp)
1.	Pegawai Negeri		
2.	Pegawai Kantor		
3.	Petani		
4.	Buruh Pabrik		
5.	Lain-lain		

2. Apakah anak-anak biasa membantu orangtua mencari nafkah? Bila YA, jelaskan jenis pekerjaan tersebut dan kapan anak-anak tersebut bekerja.

3. Berapa usia rata-rata penduduk setempat pada saat menikah?

4. Kegiatan apa yang dilakukan oleh anak setelah lulus SD? Bila bekerja, di bidang apa mereka bekerja? Jenis keterampilan apa yang mereka butuhkan?

5. Seberapa banyak anggota masyarakat yang mendambakan didirikannya SMP di area pendukung calon SD/SMP Satu Atap? Nyatakan dalam persen.

—

..... 2008
Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Petugas,

.....

.....

LEMBAR KUESIONER IV

**KUESIONER UNTUK KEPALA SD-SMP SATAP
DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
(K-04)**

Responden: Kepala SD-SMP satu atap

PETUNJUK

1. Kuesioner ini diisi oleh petugas melalui wawancara untuk menggali berbagai macam kendala berkaitan dengan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
2. Agar pengisian dapat lebih akurat, wawancara dapat dilakukan juga dengan guru dan atau tenaga TU. Bila Kepala Sekolah tidak di tempat, wawancara dapat dilakukan dengan guru dan atau tenaga TU.
3. Kuisisioner ini berkaitan dengan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengenai berbagai kendala yang dihadapi.

A IDENTITAS

Nama dan Jabatan	
Nama SD-SMP satu atap (sekolah)	
Alamat lengkap	
Nomor telepon (bila ada)	

B DATA SISWA

1. Berapa jumlah siswa (rombongan belajar) SD-SMP Satu atap?

2. Berapa jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SD-SMP Satu atap ?

3. Berapa jumlah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SD-SMP Satu Atap ?

4. Alasan lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, urutkan alasan-alasan tersebut dari yang paling utama dengan memberi angka 1 s.d. 9 pada kolom sebelah kanan.

No	Alasan tak melanjutkan	Urutan alasan dari yang paling utama dengan memberi nomor 1 s.d. 9*)
----	------------------------	--

1	SMP/MTs yang ada terlalu jauh/tak terjangkau	
2	Tidak mampu membiayai	
3	Transportasi sulit/mahal	
4	Kondisi geografis (medan sulit)	
5	Daerahnya terpencil	
6	Pendidikan kurang penting	
7	Bekerja	
8	Menikah	
9	Lain-lain, sebutkan:	

5 Sebutkan mata pencaharian penduduk setempat, rata-rata penghasilan, dan prosentasenya?

No.	Jenis Pekerjaan	Prosentase	Rata-rata Penghasilan (Rp)
1.	Pegawai Negeri		
2.	Pegawai Kantor		
3.	Petani		
4.	Buruh Pabrik		
5.	Lain-lain		

C DATA PRASARANA

6 Sebutkan alat transportasi (darat, sungai, laut) menuju calon SD-SMP Satu Atap yang terjangkau oleh siswa pada umumnya?

7. Berapa luas (dalam meter persegi) lahan sekolah secara keseluruhan?

8. Apa status kepemilikan lahan calon SD-SMP Satu Atap (SHM, kas desa, sewa, atau lainnya)?

9. Apakah lahan sekolah siap bangun (dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kemiringan tanah dan kelabilan tanah)? Bila tidak, jelaskan alasannya.

10. Sebutkan berbagai kendala berkaitan dengan pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.?

..... 2008
Mengetahui,
Kepala SD –SMP Satu atap Kec Sayung

.....
Petugas,

.....
.....

LEMBAR KUESIONER V

KUESIONER UNTUK KEPALA KELUARGA (K-05)

Responden: Kepala Keluarga/orang tua yang mempunyai anak bersekolah di kelas 6 SD dan SD-SMP satu atap Kec. Sayung

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Alamat Rumah : RT/RW:
Desa/kelurahan :
Kecamatan :
3. Umur :Tahun
4. Asal sekolah putra bapak/Ibu :
5. Pendidikan terakhir bapak/ibu :
 - a. Tidak sekolah
 - b. Tidak tamat SD
 - c. Tamat SD
 - d. SLTP
 - e. SLTA
 - f. Perguruan tinggi
 - g. Tamat lainnya (sebutkan)
6. Pekerjaan bapak/ibu sehari-hari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Pegawai swasta
 - c. Wiraswasta
 - d. Tidak bekerja
 - e. Lainnya (sebutkan)
7. Penghasilan bapak/ibu tiap bulan sebesar :
 - a. Kurang dari Rp. 500.000,-
 - b. Rp. 500.000,- - Rp Rp. 1.000.000,-
 - c. Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-

- d. Rp. 1.500.000,- - Rp 2.000.000,-
8. Pengeluaran untuk kebutuhan keluarga bapak/ibu selama sebulan sebesar :
- a. Kurang dari Rp. 500.000,-
 - b. Rp. 500.000,- - Rp Rp. 1.000.000,-
 - c. Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-
 - d. Lebih dari Rp 2.000.000,-

KONDISI PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN
AKSESIBILITAS DAN EKONOMI – Berhubungan dengan jarak dan kemudahan mencapai sarana/sekolah yang dituju

- 9 Berapa jarak dari rumah ke lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
- a. Kurang dari 500 meter
 - b. Antara 500 – 1000 meter
 - c. Lebih dari 1000 meter
10. Berapa lmenit waktu tempuh dari rumah ke lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
- a. Kurang dari 15 menit
 - b. Antara 15 – 30 menit
 - c. lebih dari 30 menit
11. Besar biaya untuk mencapai ke lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
- a. Kurang dari Rp. 500,-
 - b. Antara Rp. 500,- - Rp. 1.000,-
 - c. Lebih dari Rp. 1.000,-
12. Bagaimana kondisi tanah di lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
- a. Datar dan tidak rawan longsor
 - b. Datar agak dekat dengan lereng gunung
 - c. Miring dan rawan longsor

13. Bagaimana keadaan daerah sekitar SD tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
 - a. Tidak pernah banjir
 - b. Kadang-kadang banjir
 - c. Rawan banjir
14. Bagaimana kondisi jaringan jalan menuju lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu ?
 - a. Layak dan tidak memerlukan perbaikan
 - b. layak dilewati tapi memerlukan perbaikan
 - c. Tidak layak untuk dilewati
15. Bagaimana kondisi fisik jalan menuju lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu bila musim penghujan ?
 - a. Baik untuk dilewati
 - b. Agak rusak
 - c. Becek dan sulit untuk dilewati
16. Moda untuk menuju ke lokasi SD/tempat bersekolah putra /putri bapak/ibu biasanya menggunakan ?
 - a. Angkutan umum
 - b. Sepeda
 - c. Jalan kaki
17. Apakah bapak/ibu akan tetap menyekolahkan putra/putrinya apabila SD tersebut dijadikan SD-SMP satu atap ? bila YA/TIDAK alasannya
 - a. Ya karena mudah dijangkau, dan tidak memerlukan waktu yang lama
 - b. Tidak karena sulit dijangkau dan sarana prasarana kurang
 - c. Ya karena mudah dijangkau, mutu dan sarana prasarana cukup
 - d. Tidak karena walaupun mudah dijangkau tetapi mutunya kurang
18. Bagaimana kondisi yang diinginkan SD-SMP satu atap kedepan ?
 - a. Siswanya semakin bertambah
 - b. Selalu mengikuti kegiatan baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten
 - c. Mampu bersaing dengan sekolah yang ada di kota

d. Jawaban a. b dan c semua benar

PENUTUP

☺ Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan pada kami, semoga kerjasama yang terjalin ini dapat berlangsung di masa yang akan datang.